



# PEMBINAAN DISIPLIN DI LINGKUNGAN MASYARAKAT KOTA Di Daerah Nusa Tenggara Barat



Direktorat  
Budaya

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

711.4865

LAL

T

REKORD ARKIB  
DIREKTORAT PERMUSEURAN

**PERPUSTAKAAN**

**DI BANGUN PERMUSEUMAN**

No. 1. DOK : 280/13

KLASIFIKASI:

ASAL : H 19/3-96

**PEMBINAAN DISIPLIN**  
**DI LINGKUNGAN MASYARAKAT KOTA**  
**Di Daerah Nusa Tenggara Barat**

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
BAGIAN PROYEK PENGKAJIAN DAN PEMBINAAN  
NILAI-NILAI BUDAYA NUSA TENGGARA BARAT  
1995/1996



SUSUNAN TIM PENELITI/PENULISAN  
PEMBINAAN DISIPLIN DI LINGKUNGAN MASYARAKAT  
KOTA DI DAERAH NUSA TENGGARA BARAT

1. H. LALU WACANA : PENANGGUNGJAWAB  
ASPEK/ANGGOTA
2. H. B TITIEK WIDIANI, S.H. : SEKRETARIS/ANGGOTA
3. MOHAMAD YAMIN : ANGGOTA

**Penyunting**

1. H. LALU WACANA
2. H. B TITIEK WIDIANI, S.H.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Allah Swt, yang telah melimpahkan rahmatnya sehingga Bagian Proyek Pengkajian dan Pembinaan Nilai-nilai Budaya Propinsi Nusa Tenggara Barat tahun 1995/1996 dapat melaksanakan kegiatan penerbitan buku yang berjudul "PEMBINAAN DISIPLIN DI LINGKUNGAN MASYARAKAT KOTA DI DAERAH NUSA TENGGARA BARAT"

Buku ini merupakan hasil penelitian/kegiatan Bagian Proyek Penelitian, Pengkajian dan Pembinaan Nilai-nilai Budaya Propinsi Nusa Tenggara Barat tahun 1992/1993.

Berhasilnya usaha penerbitan buku ini, selain memperluas khsanah perpustakaan kita, juga dimaksudkan agar dapat dipergunakan sebagai pelengkap atau bahan pembanding terhadap studi tentang kedisiplinan maupun studi kebudayaan pada umumnya.

Kami menyadari pula bahwa berhasilnya usaha penerbitan buku ini berkat kerjasama yang baik antara Tim Penyusun, Tim Penyunting, serta bantuan dari Pemerintah Daerah Tk I, Pemerintah Daerah Tk II, Kanwil Depdikbud Propinsi Nusa Tenggara Barat, Instansi terkait dan para Informan.

Oleh karena itu kami menyampaikan ucapan terima kasih yang

sebesar-besarnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya. Semoga penerbitan buku ini bermanfaat.

Mataram, Pebruari 1996

Bagian Proyek Pengkajian dan Pembinaan Nilai-nilai Budaya Propinsi Nusa Tenggara Barat



## KATA PENGANTAR

Proyek Penelitian, Pengkajian dan Pembinaan Nilai-nilai Budaya Daerah tahun anggaran 1992/1993 adalah merupakan kelanjutan dari Proyek Inventarisasi dan Pembinaan Nilai-nilai Budaya tahun-tahun sebelumnya. Bagian Proyek di Nusa Tenggara Barat dalam tahun anggaran 1992/1993 melaksanakan kegiatan penelitian/penganalisaan data kebudayaan daerah sebanyak tiga aspek, dan perekaman upacara tradisional satu jenis upacara. Naskah berjudul "Pembinaan Disiplin di Lingkungan Masyarakat Kota di Daerah Nusa Tenggara Barat" ini adalah merupakan salah satu aspek yang diteliti.

Kegiatan penelitian ini dilaksanakan oleh sebuah Tim yang diangkat oleh Pemimpin Bagian Proyek Penelitian, Pengkajian dan Pembinaan Nilai-nilai Budaya Nusa Tenggara Barat dengan Surat Keputusan Nomor : 11/B.5/P3NB-NTB/V/1992 tanggal 14 Mei 1992.

Disadari bahwa naskah laporan ini masih jauh dari kesempurnaan. Namun betapa pun adanya, kesungguhan Tim Peneliti yang telah berusaha dengan segala kemampuan yang ada untuk menghasilkan karya terbaiknya sehingga tersusunnya naskah ini pantas kita hargai, semoga naskah ini bermanfaat.

Keberhasilan penyusunan naskah laporan ini tidak terlepas dari adanya jalinan kerjasama yang baik antara Tim Peneliti secara keseluruhan dengan Pemimpin Bagian Proyek maupun dengan pihak-pihak lain yang terkait.

Untuk itu semua kami sampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih.

Mataram, 22 Februari 1993  
Pemimpin Bagian Proyek,

*ttd*

**SUHADI, HP.**  
**NIP 130516576**

**SAMBUTAN KEPALA KANTOR WILAYAH  
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
PROPINSI NUSA TENGGARA BARAT**

Ass. Wr. Wb.

Saya menyambut dengan gembira dan rasa syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas terbitnya buku :

1. Wujud, Arti dan Fungsi Puncak-Puncak Kebudayaan Lama dan Asli bagi Masyarakat Pendukungnya di Daerah Nusa Tenggara Barat.
2. Pembinaan Disiplin di Lingkungan Masyarakat Kota di Daerah Nusa Tenggara Barat;

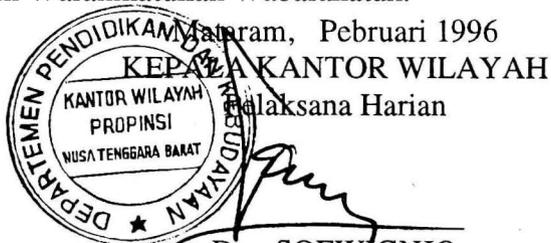
yang merupakan hasil dari kegiatan Bagian Proyek Pengkajian dan Pembinaan Nilai-nilai Budaya Nusa Tenggara Barat tahun 1995/1996.

Penerbitan buku ini merupakan realisasi kebijaksanaan pemerintah dalam pembangunan di bidang kebudayaan dalam rangka pembinaan dan pengembangan kebudayaan Nasional yaitu dengan menggali, menyebarkan informasi sebanyak mungkin tentang kebudayaan bangsa dan mengembangkan Nilai-nilai yang terkandung di dalamnya sesuai dengan tuntutan pembangunan serta perkembangan zaman.

Saya memahami bahwa buku ini masih perlu disempurnakan. Oleh karena itu tegur sapa dari pembaca akan diterima dengan senang hati.

Akhirnya kepada segenap anggota Tim Penyusun yang telah melaksanakan tugas dengan baik saya ucapkan terima kasih.

Wassalammu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.



Drs. SOEWIGNJO

Nip. 130099622

## DAFTAR ISI

	Halaman
SUSUNAN TIM PENELITI/PENULISAN .....	i
KATA PENGANTAR I .....	ii
KATA PENGANTAR II .....	iii
SAMBUTAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPDIKBUD PROPINSI NTB.....	iv
DAFTAR ISI .....	v
DAFTAR PETA .....	vii
DAFTAR FOTO .....	viii
DAFTAR TABEL .....	ix
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Masalah .....	3
C. Tujuan .....	3
D. Ruang Lingkup .....	4
E. Metodologi .....	5
<b>BAB II. GAMBARAN UMUM KOTA DAN DAERAH PENELITIAN</b>	
A. Gambaran Umum Kota .....	9
B. Gambaran Umum Daerah Penelitian .....	12
C. Berbagai Permasalahan Kota .....	25
<b>BAB III. DISIPLIN MASYARAKAT DI LINGKUNGAN PEMUKIMAN KELURAHAN AMPENAN UTARA</b>	
A. Disiplin Dalam Penanganan Limbah Keluarga/Sampah .....	51

B. Disiplin Dalam Partisipasi Masyarakat Terhadap Kegiatan Sosial .....	61
C. Disiplin Terhadap Administrasi Pemerintahan .....	70
D. Disiplin Dalam Hubungan Ketetangaan .....	77
BAB IV. DISIPLIN MASYARAKAT DI LINGKUNGAN TEMPAT-TEMPAT UMUM DI KELURAHAN AMPENAN UTARA	
A. Disiplin Di Lingkungan Pasar/Perkotaan .....	83
B. Disiplin Di Lingkungan Terminal .....	98
C. Disiplin Di Lingkungan Tempat Hiburan .....	109
D. Disiplin Di Jalan Raya .....	112
BAB V. UPAYA PEMBINAAN DISIPLIN PADA MASYARAKAT KOTA	
A. Pembinaan Oleh Pemerintah .....	127
B. Pembinaan Oleh Tokoh Masyarakat .....	139
BAB VI. KESIMPULAN DAN SARAN.....	142
DAFTAR KEPUSTAKAAN .....	148
LAMPIRAN :	
1. Daftar Informan .....	150
2. Daftar Istilah .....	153
3. Satu Set Foto .....	155

## DAFTAR PETA

Nomor	Halaman
Peta 1 : Peta Wilayah Nusa Tenggara Barat .....	29
Peta 2 : Peta Wilayah Kota Administratif Mataram .....	30
Peta 3 : Peta Wilayah Kecamatan Ampenan .....	31
Peta 4 : Peta Kelurahan Ampenan Utara .....	32

## DAFTAR FOTO

No. Foto	Halaman
1. Kantor Kelurahan Ampenan Utara .....	155
2. Salah satu aspek penting yang menunjang ketertiban masyarakat adalah tertibnya administrasi .....	156
3. Disiplin masyarakat dalam hal berpartisipasi dibidang kebersihan .....	157
4. Situasi pasar Kebonroek, Ampenan Utara .....	158
5. Terminal Kebonroek, Kelurahan Ampenan Utara .....	159
6. Barisan Angkutan Tradisional (Cidomo) sedang menanti penumpang .....	159
7. Petugas kebersihan sedang mengangkut limbah keluarga dari TPS .....	160
8. Halaman rumah penduduk yang cukup bersih di lingkungan Tinggar, Kelurahan Ampenan Utara .....	160

## DAFTAR TABEL

No. TABEL	Halaman
II. 1. Jumlah Penduduk dan Kepala Keluarga di Kecamatan Ampenan Tahun 1990 .....	33
II. 2. Kepadatan Penduduk Kecamatan Ampenan per Kilometer persegi Tahun 1990 .....	34
II. 3. Jumlah Penduduk Kecamatan Ampenan menurut Kewarganegaraan Tahun 1990 .....	35
II. 4. Jumlah Penduduk Menurut Golongan Umur Tahun 1990 .....	36
II. 5. Jumlah Penduduk Menurut Golongan Umur Tahun 1990 (Lanjutan) .....	37
II. 6. Jumlah Penduduk WNI di Kecamatan Ampenan Dewasa, Anak dan Jenis Kelamin Tahun 1990 .....	38
II. 7. Jumlah Kepala Keluarga dan Jumlah Jiwa Menurut Kewarganegaraan di Kelurahan Ampenan Utara .....	39
II. 8. Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan di Kelurahan Ampenan Utara .....	40
II. 9. Jumlah Sarana/Prasarana Komunikasi di Kelurahan Ampenan Utara .....	41
II. 10. Data Jumlah Sarana/Prasarana Pemasaran di Kelurahan Ampenan Utara .....	42
II. 11. Jumlah Sarana/Prasarana Perumahan Penduduk di Kelurahan Ampenan Utara .....	43
II. 12. Data Jumlah Penduduk Menurut Agama di Kelurahan Ampenan Utara .....	44
II. 13. Data Monografi Kelurahan Ampenan Utara Kecamatan Ampenan Tahun 1992 .....	45

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. LATAR BELAKANG**

Menurut DR. J. M. Nas dengan mengutip pendapat Wirth, kota adalah suatu pemukiman yang relatif besar, padat dan permanen, dihuni oleh orang-orang yang heterogen kedudukan sosialnya. Karena jumlah penduduknya dan kepadatannya, keadaan daerahnya merupakan tempat tinggal permanen dan sifat yang heterogen di kota. Maka hubungan sosial menjadi longgar, acuh dan tidak pribadi (impersonal relation). 1)

Seperti perkembangan kota pada umumnya, Ampenan Utara pada awalnya adalah desa yang mengalami perkembangan menjadi kota. Faktor yang mendorong perkembangannya menjadi kota adalah karena berhasil menjadi pelabuhan.

Sejak awal abad ke-19, pernah menjadi pusat pemerintahan daerah Lombok pada tahun 1895 s.d. 1898 dan terminal bus dari sekitar dasawarsa ke 3 abad ke 20 sampai sekarang.

Tingkat pertambahan penduduk dan heterogenitas masyarakat kota Ampenan Utara sangat tinggi. Hal itu ditandai dengan banyaknya suku bangsa yang bermukim di sana, seperti Sasak, Jawa, Bali, Bugis, Timor, Melayu, Banjar, Cina, Arab dan lain-lain.

Pertambahan penduduknya dipengaruhi oleh derasnya arus urbanisasi dari daerah belakang dan sekitarnya yang terjadi secara terus menerus. Pada umumnya penduduk pendatang dari daerah belakang dan sekitarnya tertarik oleh harapan untuk memperoleh lapangan pekerjaan yang memadai di tempat yang baru.

Sebahagian dari mereka yang datang itu adalah tenaga buruh, seringkali karena dikampungnya tidak memiliki tanah atau karena hasil pertaniannya yang diusahakannya tidak pernah mencukupinya karena faktor iklim atau sempitnya tanah garapan. Di tempat yang baru, mereka hidup dalam keadaan melarat dan jorok, karena tidak memiliki modal maupun pengetahuan untuk mendapatkan tempat tinggal yang layak dan sehat.

Pertambahan penduduk yang tinggi dan kurangnya prasarana dan sarana kehidupan menyebabkan timbulnya berbagai permasalahan. Beberapa permasalahan yang teridentifikasi adalah masalah pencemaran lingkungan sebagai akibat pengelolaan limbah yang kurang benar, masalah transportasi, masalah kesempatan kerja dan masalah pemukiman yang kurang memenuhi persyaratan hidup. Ketatnya persaingan masyarakat untuk mendapatkan prasarana dan sarana kehidupan, tidak jarang warga kota kurang memperhatikan orang lain demi pemenuhan kebutuhan pribadinya. Kurangnya pemahaman sejumlah warga kota Ampenan Utara terhadap lingkungan juga menyebabkan timbulnya permasalahan di kota.

Mereka yang berasal dari pedesaan sebahagian besar tidak biasa dengan kondisi kehidupan di perkampungan kota yang sudah padat. Mereka masih bersikap dan berperilaku seperti di daerah asalnya.

Tingkat kedisiplinan warga kota yang masih rendah dalam memtaati segala peraturan dan kaidah-kaidah sosial yang berlaku menambah jumlah permasalahan yang sudah ada.

Tiap-tiap kelompok masyarakat memiliki aturan-aturan, kaidah sosial dan pengendalian sosial yang berbeda untuk menjaga kelangsungan kelompok.

Sehubungan dengan itu maka untuk menjaga ketertiban dalam masyarakat perlu adanya pembinaan disiplin terhadap mereka. Pembinaan disiplin diarahkan untuk memperbaiki kesetiakawanan sosial agar mereka selalu bersatu, aman, damai dan harmonis.

## **B. Masalah**

Sesuai tujuan penelitian ini, maka dalam laporan ini akan diungkapkan tentang Pembinaan Disiplin di lingkungan Masyarakat Kota di Wilayah Kelurahan Ampenan Utara. Laporan ini diharapkan dapat mengandung berbagai permasalahan yang terdapat dalam masyarakat dan cara mengatasinya dalam rangka pelaksanaan disiplin di lingkungan masyarakat. Sementara itu permasalahan terus berkembang yang diikuti oleh berbagai usaha pemerintah dan tokoh masyarakat untuk menegakkan disiplin masyarakat.

Sehubungan dengan itu ada beberapa pokok permasalahan yang akan diungkapkan dalam laporan ini antara lain :

- a. Sejauh mana tingkat disiplin warga masyarakat di lingkungan kota di Kelurahan Ampenan Utara.
- b. Aturan-aturan dan kaidah-kaidah sosial yang berlaku pada lingkungan masyarakat kota di Kelurahan Ampenan Utara.
- c. Upaya-upaya yang dilakukan dalam rangka pembinaan disiplin pada masyarakat kota di Kelurahan Ampenan Utara.

## **C. Tujuan**

Berkenaan dengan masalah di atas penelitian bertujuan untuk mengungkapkan dan mendeskripsikan tingkat disiplin warga

masyarakat di wilayah Kelurahan Ampenan Utara, Kecamatan Ampenan, Kotif Mataram Propinsi Nusa Tenggara Barat. Sebagai acuan sampai sejauh mana tingkat disiplin warga masyarakat Kelurahan Ampenan Utara, dalam kajian ini akan diungkapkan pula aturan-aturan dan kaidah sosial yang berlaku di kalangan masyarakat Kelurahan Ampenan Utara.

Upaya pembinaan disiplin yang telah dilakukan oleh pihak-pihak terkait dalam masalah ini juga akan digunakan untuk mengetahui sejauh mana warga masyarakat telah mematuhi berbagai aturan dan kaidah sosial yang berlaku, karena itu pengungkapannya juga merupakan tujuan dari penelitian ini.

Hasilnya diharapkan akan dapat dijadikan dasar kebijakan-kebijakan yang akan dapat dijadikan dasar kebijakan-kebijakan yang akan ditempuh terhadap warga di daerah perkotaan, khususnya di Ampenan Utara (Kelurahan Ampenan Utara). Hal ini penting artinya mengingat semakin kompleksnya permasalahan-permasalahan yang muncul di wilayah Kelurahan Ampenan Utara sejalan dengan berkembangnya wilayah itu sebagai bagian dari Kotif Mataram yang sedang menuju Kota IBADAH (Indah, Bersih, Aman, Damai dan Harmonis) dan Berbunga.

Asumsi dalam penelitian ini adalah, semakin padat suatu lingkungan pemukiman, semakin rendah tingkat disiplin warga masyarakatnya.

#### **D. Ruang Lingkup**

Penelitian tentang pembinaan disiplin dilingkungan masyarakat kota di Kelurahan Ampenan Utara akan dilakukan pada dua lokasi tempat berlangsungnya aktivitas masyarakat, yaitu di lingkungan pemukiman dan di tempat umum.

Lingkungan pemukiman yang dimaksud meliputi lingkungan kampung Bugis, Lingkungan Pondok Perasi, Lingkungan

Telagamas, Lingkungan Dayan Peken, Lingkungan Karang Ujung, Lingkungan Otak Desa. Lingkungan Tinggar, Lingkungan Pelembak dan Lingkungan Jempong Wareng.

Tempat-tempat umum meliputi pasar Kebonroek, bioskop Ramayana, terminal Kebonroek, dan lingkungan jalan raya di sekitar Ampenan Utara melalui data dan informasi yang terkumpul di lokasi itu diharapkan dapat mencerminkan permasalahan kedisiplinan yang terdapat di Ampenan Utara. Kedua lingkungan tersebut merupakan daerah pusat kota dimana diperkirakan terdapat berbagai permasalahan yang disebabkan karena kurangnya disiplin warga masyarakatnya.

Data dan informasi yang akan diungkapkan di lingkungan pemukiman antara lain adalah disiplin warga masyarakat terhadap penanganan limbah keluarga, kebersihan lingkungan, partisipasi warga masyarakat terhadap kegiatan sosial, administrasi pemerintahan dan hubungan dalam bertetangga. Sementara itu pada lingkungan tempat-tempat umum ( pasar, pertokoan, terminal, bioskop dan jalan raya ), data dan informasi yang akan diungkap adalah disiplin terhadap kebersihan, aturan-aturan dalam pelayanan, aturan-aturan di tempat umum dan disiplin terhadap peraturan-peraturan formal.

## **E. Metodologi**

Metode pengumpulan untuk menghimpun data-data, yang dipergunakan dalam laporan ini bersifat kualitatif dan kuantitatif.

Metode kualitatif berupa wawancara, pengamatan dan pendokumentasian dengan mempergunakan alat potret. Agar pembahasan dapat menjangkau satu kesatuan yang utuh, maka lingkungan pemukiman yang diambil sebagai objek penelitian adalah Kecamatan Ampenan, termasuk wilayah Kota Administratif Mataram.

Metode kuantitatif berupa kuesioner pembinaan disiplin di lingkungan masyarakat kota yang disusun berdasarkan kerangka acuan *Pembinaan Disiplin di Lingkungan Masyarakat Kota* yang disusun oleh Tim Pusat. Pertanyaan yang dipergunakan dalam kuesioner bersifat terbuka. Artinya setiap reponden menjawab pertanyaan itu menurut pengertian dan logikanya sendiri. Responden dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan itu secara pendek atau secara panjang lebar. Demikian pula pertanyaan-pertanyaan itu tidak bersifat absolut tetap dapat diubah oleh pewawancara dan petugas lapangan, asal tetap dalam konteks isinya.

Untuk mendapatkan data yang lebih akurat juga dilakukan observasi pada lingkungan pemukiman dan tempat-tempat umum. Pengumpulan bahan yang mempergunakan metode kualitatif dikerjakan langsung oleh Tim. Petugas lapangan hanya mengumpulkan bahan yang mempergunakan metode kuantitatif saja.

Sebelum melakukan kegiatan perekaman dan penelitian, diadakan persiapan seperlunya. Pertama, dilakukan survai untuk menentukan lokasi penelitian. Kedua, dilakukan studi kepustakaan. Ketiga, penyusunan pedoman penelitian. Keempat menghubungi Lurah Ampenan Utara untuk melaporkan mengenai rencana penelitian dan meminta izin untuk bertemu dengan Kepala Lingkungan yang berada di Kelurahan Ampenan Utara. Kelima, mengadakan pertemuan dengan Kepala Lingkungan.

Dari hasil survai, ditentukan lokasi penelitian hanya Kelurahan Ampenan Utara saja. Alasan penelitian itu adalah bahwa lokasi itu telah memenuhi kriteria yang ditetapkan di dalam Kerangka Acuan. Pertama, lokasi ini terletak di Lingkungan wilayah Kota Administratif Mataram . Kedua, disitu terdapat pasar, bioskop, terminal angkutan kota dan lokasi itu termasuk

salah satu pemukiman yang padat penduduknya. Selain itu, lokasi itu mudah dijangkau dengan segala alat transportasi. Ongkos angkutan kota hanya Rp. 250,00.

Tugas perekaman dibagi rata kepada anggota Tim dan petugas lapangan. Masing-masing ditugaskan mewawancarai informan yang telah dikelompokkan berdasarkan tugas dan fungsinya dalam masyarakat, antara lain seperti pemimpin formal, pemimpin informal, informan, pelaku dan marginalman. Karena informan yang dipilih tersebar pada ke sembilan lingkungan yang ada di wilayah Kelurahan Ampenan Utara, maka petugas peneliti dibagi menurut wilayahnya.

Hasil rekaman dibuat tabulasi dan didiskusikan dalam Tim. Selanjutnya masing-masing menyusun laporan satu bab atau lebih, untuk selanjutnya disunting oleh Ketua Tim, kemudian diketik dan digandakan sesuai dengan keperluan.

## CATATAN

1) Ilhami, Drs.

1989 Strategi Pembangunan Perkotaan di Indonesia,  
Surabaya, Penerbit Usaha Nasional.

## **BAB II**

### **GAMBARAN UMUM KOTA DAN DAERAH PENELITIAN**

#### **A. Gambaran Umum Kota Ampenan**

Kota Ampenan sebagai salah satu kota dari tiga kota yang ada dalam lingkungan Kota Administratif Mataram terletak kira-kira 2 KM di sebelah barat pusat kota Mataram. Antara kota Ampenan dengan kota Mataram dihubungkan dengan jalan raya dan dapat dicapai dengan segala jenis kendaraan umum dan kendaraan perseorangan. Delapan kilometer di sebelah utara kota Ampenan terletak kawasan wisata Senggigi yang banyak dikunjungi wisatawan mancanegara maupun nusantara. Dua kilometer di sebelah timur kota Ampenan terletak pula bandar udara Selaparang yang ramai sesuai dengan perkembangan kemajuan pembangunan, khususnya pariwisata di Nusa Tenggara Barat. Sebagai bekas pelabuhan utama di pulau Lombok sebelum dekade kedelapan abad kedua puluh, kota Ampenan memang mempunyai letak yang strategis.

Sebagai kota pelabuhan laut, kota Ampenan mulai dibangun pada sekitar awal abad kedelapan belas. Kota ini juga pernah menjadi ibukota afdeling Lombok (Daerah Lombok) pada awal

pemerintahan Belanda di pulau Lombok dari tahun 1895 sampai 1898.

Meskipun sebagai kota pusat pemerintahan dan pusat perdagangan sampai abad kedua puluh penduduknya sangat sedikit. Namun menurut ukuran waktu itu tergolong banyak juga. Jumlahnya tidak lebih dari 300 jiwa. Sebagai perbandingan menurut sensus tahun 1930 penduduk Kedistrikan Ampenan sebanyak 15.000 jiwa 2). Kedalamnya sudah termasuk kota Ampenan sebagai kota kedistrikan. Dari jumlah yang sekitar 300 jiwa tersebut terdiri atas berbagai kelompok etnis dan ras, seperti Sasak, Bali, Jawa, Bugis/Makasar, Melayu, Banjar, Cina, Arab, India dan Eropa. Sebagai kota pelabuhan dan kota dagang di Ampenan terdapat kantor Douane, Kantor Dagang, KPM, Bank Dagang, dan Veem milik orang Eropa dan orang Cina. Sampai kedatangan Jepang, penduduk kota Ampenan baru mencapai sekitar 1.300 jiwa.

Melihat penduduknya yang sangat banyak itu, pada awalnya kota Ampenan adalah pusat pemukiman yang berpenduduk jarang. Penduduknya tersebar ke dalam kampung-kampung yang terpisah satu dengan yang lain diselisihi jalan raya, sungai, tanah kosong atau kebun kelapa dan buah-buahan. Tiap-tiap kampung dihuni oleh satu kelompok etnis. Tiap-tiap pendatang baru selalu memilih tempat tinggal di dekat orang-orang yang berbahasa sama dan beragama yang sama. Hal yang demikian itu masih dapat dilihat dari nama-nama dan riwayat kampung yang ada sekarang, diantaranya seperti Kampung Arab, Kampung Bugis, Kampung Melayu, Kampung Banjar, Otak Desa, Sukaraja, Karang Ujung, Kampung Tangsi dan lain-lain.

Tiap-tiap kelompok masyarakat mempunyai latar belakang kultural yang bervariasi, menurut daerah asalnya yang mempunyai keyakinan, agama dan politik yang berbeda.

Tempatnya juga tidak terlepas dari ikatan-ikatan kekerabatan dan kelompok masing-masing. Selain itu mereka juga tetap mengadakan hubungan dengan keluarga mereka di desa asal. Terutama mereka tidak pernah melupakan keluarga mereka dalam setiap peristiwa perkawinan dan kematian.

Keberadaan kelompok-kelompok etnis itu semakin kukuh karena ditunjang oleh sistem pemerintahan Belanda. Pada zaman Belanda organisasi pemerintahan tidak disusun berdasarkan teritorial tetapi berdasarkan etnis. Dalam sistem pemerintahan seperti itu kelompok etnis yang bukan Sasak tidak tunduk kepada pemerintahan setempat yang diperuntukkan etnis Sasak, tetapi mereka tunduk pada pemerintahan terdekat yang satu etnis dengan mereka, atau langsung dibawah pemerintahan Kontroler (Bld. Controler) tanpa melalui Kepala Distrik Ampenan.

Tiap-tiap kelompok etnis yang bukan Sasak, masing-masing mempunyai Kepala Pemerintahan sendiri yang sebutannya berbeda menurut asal etnis, seperti Kapitan, Juragan, Penghulu dan lain-lain. Sistem pemerintahan seperti itu baru berakhir setelah Perang Dunia Kedua.

Untuk kelancaran urusan pemerintahan desa dan pelayanan masyarakat, pada tahun 1960 Kota Ampenan dimekarkan menjadi desa Ampenan Utara dan Ampenan Selatan. Kemudian pada tahun 1963 desa Ampenan Utara dimekarkan lagi dengan terbentuknya desa Ampenan Tengah. Pemekaran terakhir adalah merupakan suatu tuntutan kebutuhan karena penambahan penduduk kota yang sangat pesat.

Kepesatan penambahan penduduk Kota Ampenan yang demikian itu tidak saja disebabkan oleh faktor alami tetapi juga karena migrasi dari daerah belakang (daerah pedesaan). Mereka yang datang karena tertarik untuk menjadi buruh di pelabuhan Ampenan yang semakin ramai, di pabrik-pabrik dan berbagai

Perusahaan yang terdapat di Ampenan sebahagian di antara mereka yang datang karena terdesak oleh keadaan tanah garapan yang semakin sempit dan karena kegagalan panen di desa asalnya. Jumlah mereka semakin bertambah-tambah sejak Perang Dunia Kedua usai. Menurut hasil registrasi penduduk tahun 1990, penduduk kota Ampenan berjumlah 401.339 jiwa 3).

Laju pertumbuhan penduduk kota Ampenan tidak sebanding dengan kecepatan pembangunan sarana dan fasilitas yang dibutuhkan, seperti air bersih, saluran pembuangan air limbah dan listrik. Walaupun pada akhir-akhir ini hampir semua rumah penduduk sudah terjangkau listrik, tetapi saluran pembuangan air limbah dan pengadaan air bersih masih tetap merupakan masalah.

Mereka yang hidup berdesakan di kampung yang sempit tidak lagi dapat membuat sumur yang airnya dapat dijamin kebersihannya.

## **B. Gambaran Umum Daerah Penelitian**

### **1. Lokasi dan Lingkungan Alam**

Berdasarkan kriteria yang paling tepat sebagai sampel daerah penelitian adalah Kelurahan Ampenan Utara. Dalam Kelurahan tersebut terdapat pasar, toko, terminal dan bioskop. Penduduknya juga padat sesuai dengan kriteria daerah sampel yang diharapkan. Kelurahan Ampenan Utara merupakan salah satu dari tujuh kelurahan di dalam wilayah Kecamatan Ampenan, Kabupaten Lombok Barat, Propinsi Nusa Tenggara Barat. Kelurahan Ampenan Utara merupakan gabungan dari perkampungan yang mengelompok kecuali Jempong Wareng.

Kelurahan Ampenan Utara terletak di daerah pantai Selat Lombok.

Batas-batasnya :

- a. Di sebelah utara : Kali Meninting dan desa Sesela
- b. Di sebelah timur : Kelurahan Rembiga dan desa Pejeruk
- c. Di sebelah barat : Selat Lombok

Luas Kelurahan Ampenan Utara : 400 Ha, dengan peruntukan

- a. Jalan : 4,261 Ha
- b. Sawah dan ladang : 114,890 Ha
- c. Bangunan umum : 25,935 Ha
- d. Pemukiman/perumahan : 152,080 Ha
- e. Jalur hijau : 6,270 Ha
- f. Pekuburan : 13,500 Ha
- g. Lain-lain : 83,064 Ha

---

400 Ha 4).

Terletak pada ketinggian 0-5 m dari permukaan laut. Curah hujan rata-rata per tahun 718 mm dengan suhu rata-rata : 25<sup>o</sup>-32<sup>o</sup> C.5)

Letaknya sangat strategis dapat dicapai dari segala arah dengan segala jenis kendaraan. Jarak dari pusat pemerintahan Kecamatan hanya 1 Km, dari pusat pemerintahan Kabupaten dan Propinsi sekitar 2,5 Km. Dengan ketiga pusat pemerintahan di atas Ampenan Utara dihubungkan dengan jalan raya beraspal hotmix. Kurang lebih 2 Km di sebelah timur dari pusat pemerintahan kelurahan Ampenan Utara terletak Bandar Udara Selaparang yang sangat ramai, rata-rata tujuh belas kali penerbangan sehari dengan berbagai type pesawat terbang dari berbagai Perusahaan Penerbangan, Merpati Nusantara Airlines, Sempati dan Bouraq. Tidak jauh di sebelah utara kota Ampenan terletak kawasan wisata Senggigi yang ramai dikunjungi wisatawan mancanegara dan wisatawan Nusantara. Perkembangan pariwisata dalam beberapa tahun ini memang cukup pesat.

Sebagai ilustrasi, jumlah wisatawan mancanegara yang berkunjung ke daerah ini selama enam tahun terakhir sejak 1984 meningkat dengan tajam dari 7.084 menjadi 107.210 6).

Kelurahan yang meliputi daerah seluas 400 Ha, terbagi dalam sembilan lingkungan : Kampung Bugis, Pondok Perasi, Telagamas, Dayan Peken, Karang Ujung, Otak Desa, Pelembak, Tinggar dan Jempong Wareng.

Seluruhnya terpisah dari Kelurahan dan Desa sekitarnya dengan batas-batas yang tegas. Sembilan lingkungan yang meliputi seluruh wilayah Kelurahan, satu sama lain mempunyai batas yang nyata, berupa jalan besar dan kecil. Kecuali Lingkungan Jempong Wareng, letaknya berjauhan dari lingkungan yang lain, di batasi oleh sawah.

Pusat pemerintahan Kelurahan Ampenan Utara terletak di wilayah Lingkungan Dayan Peken, yang di lalui oleh jalan raya yang menghubungkan kota Mataram dengan kawasan wisata pantai Senggigi dan sekitarnya. Wilayah Lingkungan (dulu : kampung). Dayan Peken ini terdiri atas pekarangan-pekarangan yang padat dengan rumah-rumah letaknya berdekatan antara satu dengan yang lain.

Bentuk dan bahan rumah-rumah penduduk di Kelurahan Ampenan Utara sangat beragam, menggambarkan tingkat sosial ekonomi pemiliknya. Tinggi rendahnya tingkat sosial ekonomi seseorang di Kelurahan Ampenan Utara dapat dilihat pada besar kecilnya dan gaya rumah mereka. Orang-orang kaya pada umumnya membuat rumah yang besar atau indah dan bersih dengan bahan-bahan yang bermutu. Rumah mereka biasanya dilengkapi dengan berbagai fasilitas, seperti air bersih, listrik dan sanitasi.

Berbeda dengan rumah warga masyarakat yang tergolong kurang mampu. Rumah-rumahnya kecil, letaknya berdesak-desakan.

Bahannya pun seadanya seperti genteng atau seng kualitas rendah. Bahkan ada yang atapnya dari alang-alang, lantai tanah atau ubin. Fasilitas yang ada, seperti, listrik, air bersih, sanitasi dan jamban keluarga terbatas. Beberapa diantaranya tidak memiliki sumur dan jamban sendiri.

Untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari masih berat. Ada diantaranya yang memiliki tanah pekarangan sebatas rumah mereka yang kecil itu saja. Bagi mereka yang seperti ini hidup serba sulit. Akan membuat sumur dan WC tidak memiliki tempat lagi. Rumah yang letaknya jauh dari selokan juga mengalami kesulitan membuang air limbah dapur.

Untuk memperoleh air bersih mereka menumpang pada sumur tetangga. Sebagian ada pula yang mendapat air bersih dari kran tetangga mereka yang kaya dan baik hati. Orang kaya tersebut mengikhhlaskan air bersih yang dimilikinya bagi tetangganya yang tidak memiliki sumur dan tidak berlangganan air bersih. Mereka diberi cuma-cuma tanpa dipungut bayaran.

## 2. Penduduk

Sampai akhir bulan Juni 1992, jumlah penduduk Kelurahan Ampenan Utara adalah 16.606 jiwa 7).

Kepadatan rata-rata 4.152 jiwa kilometer persegi. Mereka terdiri dari laki-laki : 8.225 jiwa dan perempuan 8.381 jiwa. Kedalamnya termasuk warga negara asing (WNA) yang jumlahnya 300 jiwa, dengan rincian laki-laki : 153 jiwa dan perempuan 147 jiwa.

Penduduk Kelurahan Ampenan sangat heterogen. Di situ terdapat berbagai suku dan bangsa, seperti Sasak, Bima, Sumbawa, Jawa, Bugis, Melayu, Bali, Arab, Cina dan lain-lain. Warga negara asing kebanyakan adalah orang-orang Cina.

Berdasarkan agama mereka dapat dirinci ke dalam : Islam : 14.098 jiwa, Kristen : 157 jiwa, Katolik : 61 jiwa, Hindu : 1.231 jiwa dan Budha : 1.059 jiwa 8).

Mobilitas penduduk sangat tinggi. Hal ini terlihat dari jumlah penduduk 14.668 jiwa yang terhimpun ke dalam 3.153 KK pada tahun 1989 telah bertambah menjadi 16.606 jiwa pada bulan Juni 1992. Pertambahan dalam tiga tahun terakhir kurang lebih 13,2 %.

Akibat kekurangan lahan dan biaya untuk membangun rumah bagi keluarga baru sering terjadi bahwa dua atau tiga keluarga batih tinggal dalam satu rumah dengan makan bersama. Di samping itu ada pula dua atau tiga keluarga batih yang tinggal serumah, akan tetapi masing-masing mengurus ekonomi rumah tangga mereka sendiri-sendiri dan mempunyai dapur sendiri pula. Terutama di lingkungan Dayan Peken, Otak Desa, Tinggar dan Pelembak rumah-rumah dibangun berdekatan, hampir-hampir tidak terdapat tanah pekarangan yang dapat ditanami pohon pelindung atau buah-buahan.

Pada akhir-akhir ini menampakkan keseimbangan antara yang lahir, yang meninggal, yang datang dan yang pindah. Sampai bulan Juni 1992 tercatat lahir laki-laki 19 jiwa, perempuan 23 jiwa, meninggal laki-laki 16 jiwa, perempuan 9 jiwa, pindah laki-laki : 6 jiwa, perempuan 3 jiwa dan yang datang laki-laki 4 jiwa, perempuan 5 jiwa. Pertambahan penduduk hanya 17 jiwa ( 0,10 % ) 9).

Orang-orang yang datang adalah mereka yang mencari pekerjaan atau yang pindah rumah atau pindah pekerjaan. Demikian pula orang-orang yang pergi adalah mereka yang pindah. Hal ini memang adalah suatu yang biasa dalam kedudukannya sebagai kota tumpuan harapan bagi pencari pekerjaan dan pengusaha. Kota Ampenan memang sejak lama telah menjadi sasaran para pengadu nasib, sebab di situ terdapat berbagai kegiatan ekonomi yang menjanjikan harapan daripada hidup di desa yang hanya dapat memberi upah di bawah standar.

Kalau tidak dipaksa oleh keadaan lahan yang sempit, tingginya harga tanah di kota khususnya Ampenan masih akan terus dipadati oleh para urban yang datang mencari pekerjaan. Kota Ampenan juga diselamatkan dari hal itu oleh karena faktor transportasi yang sudah sangat lancar. Sekarang kota Ampenan dapat dicapai dengan segala jenis kendaraan dari berbagai jurusan. Ongkos angkutan kota juga relatif murah. Jauh dekat ongkosnya dalam kota hanya Rp 250,00 (dua ratus lima puluh rupiah).

Banyak orang yang bekerja di Ampenan tidak tinggal di Ampenan. Kalau tidak pulang pergi, mereka dapat tinggal di luar Ampenan masih dalam wilayah Kotif Mataram. Mereka yang bekerja di Ampenan kebanyakan menjadi pembantu rumah tangga dan buruh pada pabrik rokok, perusahaan tembakau, bengkel mobil dan lain-lain.

### 3. Kehidupan Sosial Ekonomi Dan Budaya

#### a. *Mata Pencaharian*

Mata pencaharian hidup penduduk kota Ampenan Utara sangat bervariasi. Hal ini terlihat dari data penduduk menurut mata pencaharian.

Menurut data dari tahun 1989 adalah seperti rincian berikut ini : (Monografi Kelurahan Ampenan Tahun 1989) : hl. 79).

Petani pemilik	:	99 orang	
Petani penggarap	:	90 orang	(7,77 %)
Buruh tani	:	27 orang	
Nelayan	:	504 orang	( 18,14 % )
Pencari hasil hutan	:	-	
Industri	:	18 orang	
Dokter	:	3 orang	
Mantri kesehatan	:	6 orang	
Bidan	:	2 orang	

Guru agama	: 84 orang
Pegawai negeri	: 288 orang ( 10,36 % )
Pegawai swasta	: 185 orang ( 6,66 % )
Buruh pekerja	: 525 orang ( 18,89 % )
Dukun bayi	: 6 orang
Tukang cukur	: 4 orang
Tukang jahit	: 48 orang
Tukang kayu	: 62 orang
Tukang batu	: 55 orang
Tukang las	: 2 orang
Pedagang	: 260 orang ( 9,36 % )
Lain-lain	: 511 orang ( 18,39 % )

---

Jumlah 2.779 orang

Dari berbagai jenis lapangan kerja di atas yang terbanyak adalah menjadi buruh pekerja, nelayan dan lain-lain.

Mereka yang bekerja lain-lain ini adalah orang-orang yang mengerjakan bermacam-macam pekerjaan tanpa memilih jenis tertentu. Mereka kerjakan apa saja sesuai dengan tawaran dan adanya kesempatan.

Banyak yang bekerja sebagai buruh pekerja adalah lumrah karena Ampenan sendiri adalah sebagai bekas kota pelabuhan utama di Lombok sampai dasawarsa kedelapan abad kedua puluh.

Mereka yang bekerja dalam bidang pertanian, baik dengan mengerjakan tanahnya sendiri atau tanah orang lain atas dasar sistem sakap-menyakap atau bagi hasil atau menyewa tanah. Kebanyakan dari tanah-tanah milik para petani adalah sangat kecil. Sebagian tanah sawah yang terdapat di lingkungan kelurahan Ampenan Utara adalah milik penduduk dari kelurahan/desa tetangga. Hanya keuntungannya seluruh sawah yang ada berpengairan teknis.

Rata-rata para petani menanam padi dua kali dan satu kali palawija dalam setahun dengan pola tanam padi-padi-palawija.

Pola tanam yang demikian diatur oleh pemerintah untuk memotong siklus perkembangan hama seperti wereng, tikus dan lain-lain yang sering mengganggu tanaman padi. Pola tanam yang demikian telah menampakkan hasilnya ditandai dengan hampir tidak ada gangguan wereng sejak pola tanam tersebut diterapkan pemerintah.

Kebaikan dari pola tanam yang demikian itu, pembagian air dapat diatur secara adil dan merata. Perselisihan karena air di antara para petani juga tidak pernah terjadi lagi.

Masa tanam padi ditetapkan pemerintah mulai bulan Oktober sampai dengan bulan Mei. Pada saat-saat tanaman padi sedang memerlukan air, masih dalam musim hujan dan air sedang melimpah-limpah dari sumbernya melalui jaringan irigasi yang sudah teratur.

Sementara penghasilan penduduk dari sektor pertanian masih sangat kecil, karena jenis tanaman yang ditanamnya belum berorientasi pada pasar.

Selama ini mereka hanya menanam padi dan palawija serta beberapa jenis tanaman hortikultura yang bernilai ekonomis rendah.

Bagi petani penggarap atas dasar bagi hasil membagi semua jenis hasil sawah secara belah pinang. Belah pinang dalam bahasa Sasak disebut belah komak. Bibit dan ongkos membajak, menanam dan ongkos panen ditanggung bersama dengan pemilik tanah.

Mengolah tanah adalah pekerjaan laki-laki, sedangkan pekerjaan menanam padi adalah tugas wanita. Pekerjaan menyiangi dan panen merupakan pekerjaan bersama-sama laki-laki dan perempuan. Hasil panen diangkut dari sawah ke rumah dengan mempergunakan truck, pick up dan cidomo atau cicar. Bila memerlukan uang mereka menjual gabah pada huler terdekat atau

dengan menjual beras pada pasar terdekat.

Bagi mereka yang hidup dari menangkap ikan kebanyakan yang tinggal di kampung Bugis dan lingkungan Pondok Perasi. Penghasilannya sekedar mencukupi kehidupan sehari-hari. Hanya sebahagian kecil saja di antara mereka yang dapat menabung untuk persediaan pada waktu-waktu mereka tidak dapat turun melaut.

Pada musim angin Barat adalah masa pacekelik bagi mereka. Antara bulan Desember sampai bulan Maret mereka hanya turun melaut pada saat-saat air tenang saja. Ada kalanya dalam sebulan hampir tiada hari yang tenang, terutama sekitar bulan Januari. Bagi mereka yang tidak mempunyai tabungan maka untuk memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari adalah dengan menjual atau menggadaikan alat-alat rumah tangga dan perhiasan yang dimilikinya, kecuali mereka yang mempunyai pekerjaan ganda. Kehidupannya yang demikian selalu berulang setiap tahun.

Alat-alat yang utama dalam menangkap ikan adalah sampan bercadik, sampan bermotor, lampu strongking, jala, pancing dan kadang-kadang para nelayan memperlengkapi dirinya dengan tombak ikan. Pekerjaan menangkap ikan dilakukan laki-laki sedangkan wanita-wanita tugasnya memasarkan ikan, menambal dan merajut jala. Ikan dijual di pasar terdekat, di tempat pelelangan ikan atau pada tengkulak-tengkulak yang kebanyakan dari pada mereka adalah wanita.

Bagi buruh pekerja yang jumlahnya adalah terbesar dari jenis-jenis pekerja lainnya kebanyakan di antaranya bekerja sebagai buruh pelabuhan di Lembar.

Mereka pada mulanya adalah buruh pelabuhan Ampenan Lembar sewaktu kedua pelabuhan ini masih merupakan pelabuhan pasangan dari sekitar kurang lebih 18 tahun yang lalu.

Penulis sebut pelabuhan pasangan karena kegiatan pada kedua pelabuhan itu diatur secara bergiliran sesuai dengan musim. Selama musim angin Tenggara, pusat kegiatan di Ampenan dan pada musim angin Barat antara Desember sampai Maret kegiatan pindah ke Lembar karena selama itu pelabuhan Ampenan kurang aman dari hempasan gelombang.

Sejak tahun 1974 seluruh kegiatan pindah seluruhnya ke pelabuhan Lembar. Pelabuhan Ampenan dijadikan pangkalan Angkatan Laut.

Buruh-buruh pelabuhan Ampenan yang selama ini bekerja secara mobil antara kedua pelabuhan, menjadi buruh tetap di pelabuhan, menjadi buruh tetap di pelabuhan Lembar. Dalam melaksanakan tugas setiap hari mereka dijemput oleh perusahaan tempat mereka bekerja.

Setelah buruh pekerja 18,89 % dan nelayan 18,14 % menyusul yang terbanyak adalah pekerja lain 18,39 %.

Mereka ini adalah para pekerja yang tidak terikat oleh suatu jenis pekerjaan tertentu. Apa saja dikerjakannya asal mendapat upah. Bidang pekerjaan lainnya yang tergolong banyak dikerjakan oleh warga kelurahan Ampenan Utara adalah pegawai negeri 10,36 %, pegawai swasta 6,56 %, dan 9,36 % adalah pedagang.

Usaha perdagangan banyak dipegang oleh Cina. Kebanyakan toko adalah milik mereka. Selebihnya adalah toko buku dan toko sarung milik orang Arab. Kios-kios di pasar pun banyak dimiliki orang Cina.

#### 4. Sistem Kekerabatan

Dari jumlah 16.606 jiwa penduduk kelurahan Ampenan Utara hampir 80 % adalah orang Sasak. Sistem kekerabatan orang Sasak berdasarkan hubungan patrilineal yang diikuti dengan pola menetap virilokal.

Istilah kekerabatannya menunjukkan angkatan-angkatan. Semua kakak laki-laki dan kakak wanita ayah dan ibu, beserta isteri maupun suami masing-masing yang umurnya lebih tua dari ayah dan ibu diklasifikasikan menjadi dua dengan istilah amaq kaka (uwa laki-laki) dan inaq kaka (uwa wanita). Adapun adik-adik dari ayah dan ibu diklasifikasi kedalam dua golongan yang dibedakan menurut jenis kelamin menjadi amaq rari bagi adik laki-laki dan inaq rari bagi adik perempuan.

Pada umumnya perkawinan menurut adat Sasak dilakukan secara selarian akibat pacar-pacaran secara langsung atau tidak langsung. Secara tidak langsung maksudnya berpacaran dengan melalui perantara yang disebut subandar. Subandar pada umumnya adalah wanita yang telah menikah sebab adakalanya juga wanita yang belum menikah.

Orang Sasak Ampenan telah lama meninggalkan adat perkawinan secara selarian. Sebagai gantinya mereka lakukan dengan cara melamar. Akibatnya rangkaian kegiatan yang berhubungan dengan perkawinan secara selarian ditinggalkannya pula. Mereka cukup hanya dengan mengadakan upacara pernikahan yang disertai dengan acara syukuran. Upacara dipimpin oleh penghulu yang dihadiri oleh petugas Pembantu Pegawai Pencatat Nikah Talak Rujuk (P3NTR) dan segenap kerabat, sahabat dan handai tolan dari kedua belah pihak. Tempat upacara tidak terlalu prinsip dimana saja baik dirumah mempelai laki-laki maupun dirumah calon mempelai wanita yang memungkinkan.

Demikian pula tempat tinggal setelah upacara perkawinan selesai dapat secara virilokal, neolokal, matrilocak atau patrilocak sesuai kesepakatan dan keadaan tanpa terikat oleh adat yang berlaku. Bagi suami isteri baru yang menetap secara matrilineal karena si isteri adalah seorang anak tunggal atau karena si suami seorang yang miskin sehingga dia rela menyerahkan diri untuk diambil anak oleh mertuanya.

Pola tempat menetap seperti itu dalam bahasa Sasak disebut dengan istilah turut nina atau bau isik pemanggang, artinya turut perempuan atau tertangkap pemanggang. Dalam hal seperti di atas si suami masuk menjadi anggota keluarga isterinya dan anak-anak beserta keturunan mereka kelak akan diperhitungkan secara matrilineal dan mewarisi harta pusaka keluarga pihak si isteri.

Bagi sepasang suami isteri yang kemudian mengalami ketidakcocokan dalam kehidupan mereka, dapat cerai atas kesepakatan kedua belah pihak, dan dinyatakan secara tegas dimuka penghulu. Mereka yang menyesal setelah terjadi perceraian, maka mereka boleh rujuk kembali sebelum melebihi seratus hari. Setelah tiga kali talak mereka tidak boleh rujuk lagi kecuali setelah isteri tersebut kawin dengan orang lain dan cerai atas persetujuan bersama, bukan karena dipaksa oleh bekas suami pertama.

Seorang isteri yang diceraikan suaminya berhak atas harta bersama dengan pembagian suami berbanding isteri adalah 2 berbanding 1. Dalam bahasa Sasak disebut dengan istilah berson belembah, artinya menjunjung memikul. Maksudnya isteri memperoleh satu bagian dan suami memperoleh dua bagian. Harta bawaan menjadi hak masing-masing. Sesuai dengan sistem kekerabatan yang patrilinealistik anak-anak ikut kepada bapak mereka.

Akibat dari perkawinan timbul keluarga batih (Sasak : koren). Keluarga inti yang berdasarkan monogami terdiri dari suami, isteri, anak-anak, anak tiri, orang yang menumpang dan pembantu rumah tangga. Anak-anak laki-laki yang sudah kawin, masing membuat rumah disekitar kediaman orang tua mereka. Dengan demikian suatu rumah tangga yang sudah tua terdiri dari keluarga yang virilokal. Didalamnya terdapat suatu keluarga batih senior dan beberapa keluarga batih junior. Tiap-tiap keluarga batih maupun keluarga luas harus tetap memelihara hubungan dengan

kelompok kerabatnya yang lebih luas, ialah kadang waris. Kadang waris ialah semua kerabat tunggal leluhur dari pancar laki-laki, sedangkan kerabat luas dari pihak wanita disebut dengan istilah kadang jari. Hubungan baik dengan kadang waris maupun dengan kadang jari harus selalu dipelihara baik dalam keadaan suka maupun duka. Setiap kadang waris dan kadang jari tidak boleh dilupakan dalam dua peristiwa, yaitu tatkala ada kematian dan perkawinan. Suatu keluarga batih atau keluarga luas yang dengan sengaja tidak memberitahukan salah satu anggota kadang waris atau kadang jarinya mengenai salah satu dari kedua peristiwa di atas mengisyaratkan suatu pemutusan hubungan kekerabatan. Bagi kerabat yang dilupakan akan menjauhkan diri dari kerabat yang dengan sengaja melupakannya.

Untuk mencegah keretakan kekerabatan yang tidak dikehendaki seperti di atas maka setiap terjadi peristiwa kematian atau perkawinan sekurang-kurangnya seorang dari keluarga batih senior dari keluarga luas virilokal harus selalu diberitahukan atau diundang selaku mewakili keluarga luas. Itulah latar belakang budaya Sasak mengapa pada waktu ada kematian atau perkawinan selalu menyelenggarakan pesta yang agak besar. Maksudnya supaya sanak saudara dan kerabat dapat merata diundang. Pada umumnya kedua upacara itu memerlukan banyak waktu dan banyak biaya. Sehingga bagi orang sasak di Ampenan yang sangat terikat oleh waktu dan hidup dengan penghasilan yang pas-pasan telah lama menyelenggarakan kedua upacara di atas secara sederhana. Dalam penyelenggaraannya mereka cukup dengan melaksanakan sesuai tuntunan ajaran agama Islam tanpa diikuti upacara adat dengan undangan yang sangat terbatas pula.

### **C. Berbagai Permasalahan Kota**

Sebagai ibukota Kabupaten dan Propinsi, Kotif Mataram yang letaknya sangat strategis merupakan pintu gerbang dalam hubungan Nusa Tenggara Barat dengan dunia luar.

Kemajuan Kota Administratif Mataram menjadi tolok ukur bagi kemajuan dan keberhasilan pembangunan di Propinsi Nusa Tenggara Barat.

Dalam kedudukannya yang demikian kota Mataram berfungsi sebagai pusat segala aktivitas dan kebutuhan masyarakat.

Kota Administratif Mataram kini terus berkembang dengan ciri-ciri perkotaan dilihat dari segi kehidupan budaya, ekonomi, politik, keamanan dan ketertiban.

Banyak tenaga pencari kerja yang datang dari berbagai daerah dan pedesaan. Mereka berdatangan karena terdesak oleh kebutuhan hidup. Di kota Administratif Mataram mereka yang berhasil sebagai pegawai pemerintah mendapat tempat yang memadai, tetapi sebahagian besar hidup dalam keadaan melarat dan jorok karena tidak memiliki modal maupun pengetahuan untuk mendapatkan tempat tinggal yang layak. Bagi mereka yang kurang beruntung hidup tanpa fasilitas sanitasi dan utilitas. Mereka hidup berdesak-desakan dalam rumah yang mereka buat dari bahan seadanya.

Menghadapi masalah ini tugas pemerintah kota Mataram semakin kompleks. Pemerintah harus mampu menyediakan sarana dan fasilitas untuk memenuhi kebutuhan masyarakat kota yang terus meningkat. Terutama mampu mewujudkan tatanan dan suasana kehidupan kota yang nyaman dan tertib, sesuai dengan semboyan Mataram sebagai Kota IBADAH yakni Indah, Aman, Damai dan Harmonis.

Betapa besar permasalahan yang dihadapi oleh Kotif Mataram dapat dilihat dari data-data yang bersumber dari Kepala Sub Dinas Kebersihan sebagai berikut:

Kota Administratif Mataram meliputi Kecamatan Mataram, Kecamatan Cakranegara dan Kecamatan Ampenan. Seluruhnya terbagi kedalam 23 Kelurahan dan 241 lingkungan. Luas seluruhnya 61,36 kilo meter persegi atau tepatnya 6.136,887 Ha. Dengan penduduk sejumlah 275.089 jiwa.

Setiap hari mereka menghasilkan sampah 700 meter kubik yang berasal dari pemukiman 300 meter kubik, pasar 89 meter kubik, pertokoan 96 meter kubik, jalan 65 meter kubik dan lain-lain 64 meter kubik. Tanpa partisipasi seluruh lapisan masyarakat pemerintah tidak mampu mengatasi masalah kebersihan dan persampahan di kota, sedangkan kesadaran masyarakat akan kebersihan belum merata. Dana dan sarana yang dimiliki Kotif Mataram juga belum memadai. Truck, gerobak, kontiner, bulduser dan upah buruh sangat terbatas. Belum lagi masalah lahan Tempat Pembuangan Sementara (TPS) dan Tempat Pembuangan Akhir (TPA).

Sulit sekali untuk mendapatkan lahan TPA yang memenuhi persyaratan teknis, karena keadaan topografi Kotif Mataram yang rata.

Dengan tingkat kemampuannya yang sekarang ini Kotif Mataram hanya baru mencapai tingkat pelayanan 60 % dari 23 kelurahan masing-masing.

Sarana yang dimiliki oleh Kotif Mataram dan yang berasal dari bantuan pihak swasta baru berupa 6 buah truck bantuan PLP, 6 buah truck (kayu) usia di atas 10 tahun, 1 buah truck (kayu) bantuan BAPINDO, 140 buah gerobak dorong yang kebanyakan dalam keadaan rusak, TPS 45 buah dan TPA 0,80 Ha. Personil yang menangani sampah setiap hari juga masih belum mencukupi. Jumlahnya baru 211 orang, dengan penempatan masing-masing di Kecamatan Ampenan 45 orang, Kecamatan Mataram 109 orang dan Kecamatan Cakranegara 57 orang.

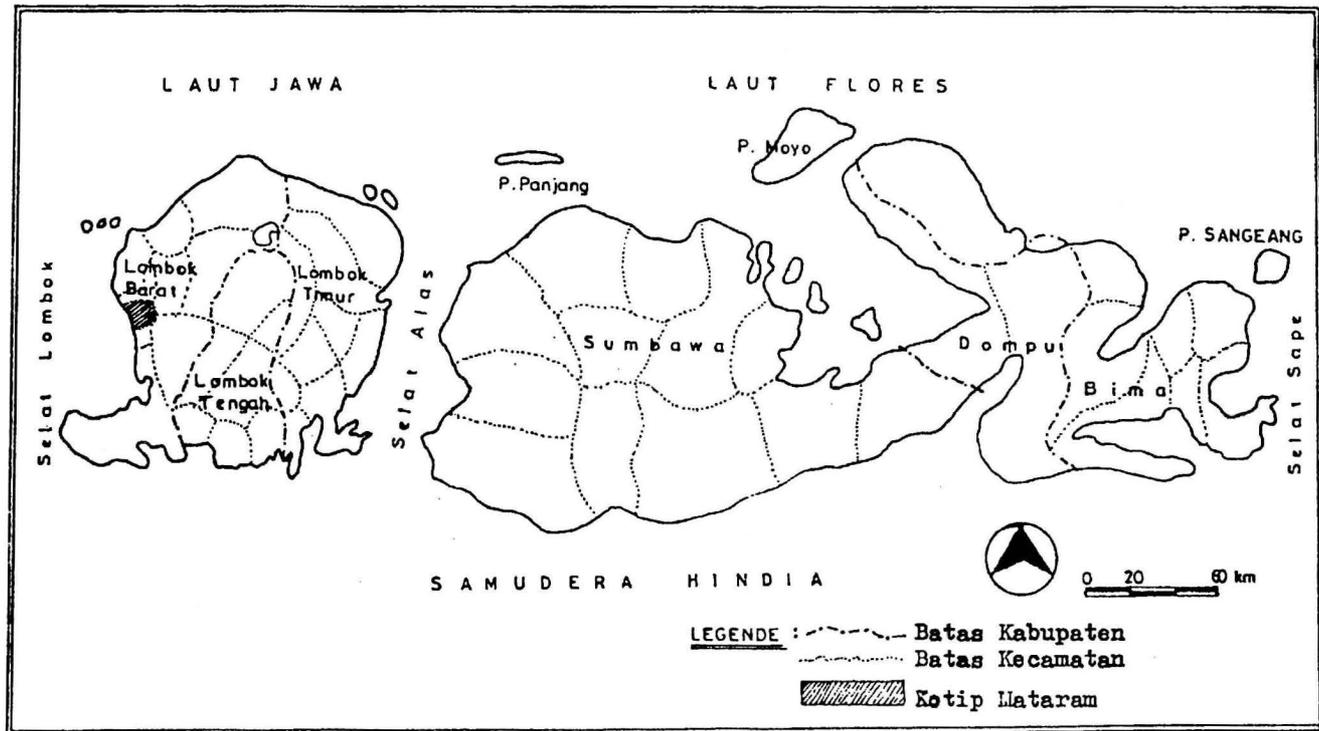
Dari berbagai permasalahan yang dihadapi diatas, yang paling berat yang dihadapi oleh Kotif Mataram adalah masalah kesadaran masyarakat yang masih rendah. Rendahnya kesadaran masyarakat ini sementara dinilai karena rendahnya tingkat pendidikan dan pengetahuan mereka.

Masalah lain yang tidak kalah memusingkan Pemerintah Kotif Mataram adalah masalah Cidomo. Cidomo adalah sejenis kendaraan yang badannya menyerupai bak cikar, atapnya serupa atap dokar dan rodanya terbuat dari velg dan ban mobil. Kendaraan ini ditarik oleh seekor kuda dan memuat penumpang 6 sampai 8 orang termasuk kusir.

Permasalahan yang dihadapi adalah sikap pemerintah yang mendua antara melestarikan dan menyingkirkan cidomo dari pusat kota. Bila disingkirkan akan menyulitkan bagi penduduk kota yang tempat tinggalnya belum dilalui jalur angkutan bemo kota dan juga terkait dengan nasib kusir dan anggota keluarganya. Bila cidomo dibiarkan terus seperti keadaan ini selalu menimbulkan kesemerawutan lalu lintas dan pencemaran lingkungan disebabkan kotoran kuda yang berserakan di sepanjang jalan raya yang dilaluinya. Masalah lain yang juga memberatkan pemerintah adalah penyediaan pangkalan cidomo yang strategis dan tingkat kesadaran serta disiplin kusir cidomo yang sangat rendah. Hal ini terlihat dari 76 pelanggar yang terjaring dalam operasi justisi pada tanggal 23 Januari 1993, yang terbanyak adalah kusir cidomo. Bentuk pelanggaran yang mereka lakukan ada yang tidak memiliki surat sama sekali, tidak memiliki SIM, melanggar jalur cidomo, salah tempat parkir, suratnya sudah mati dua tahun, dan kusir di bawah umur.

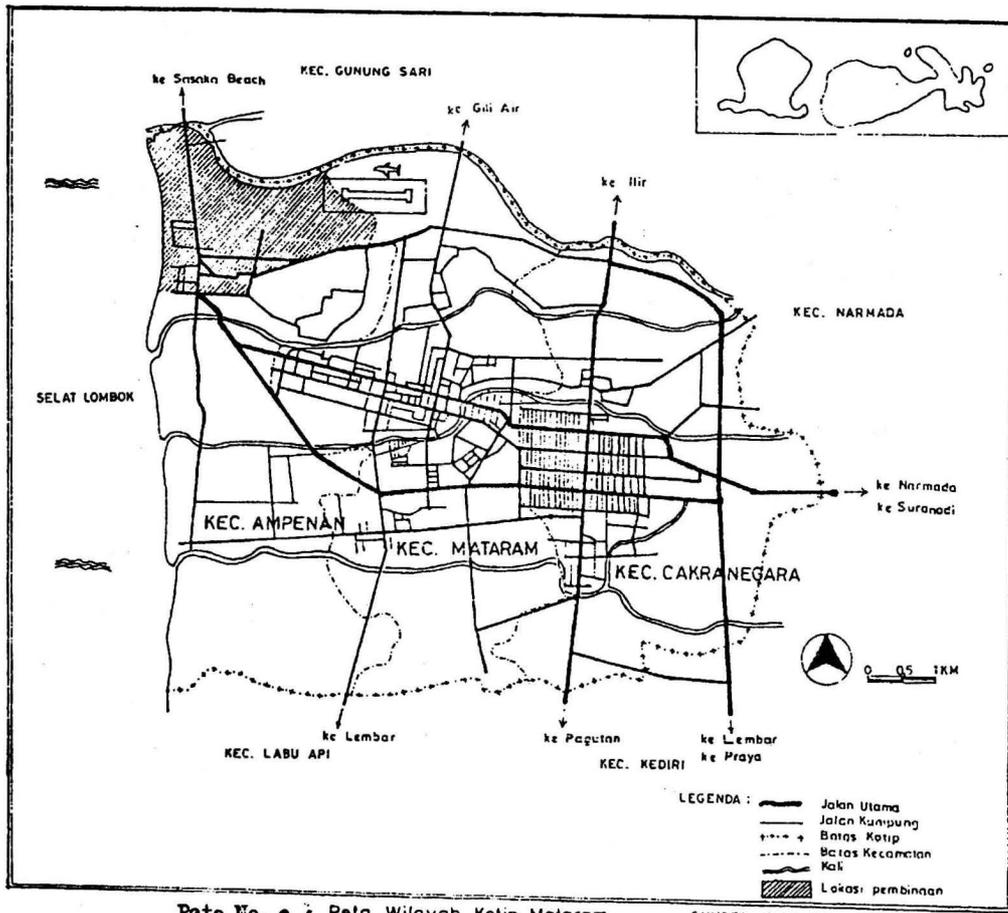
## CATATAN

- 1) Wacana, L. dkk  
1984 Sejarah Kota Ampenan, Jakarta, Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional yang belum diterbitkan, halaman 59
- 2) Wacana, L. dkk, Ibid, halaman 22
- 3) Mantri Statistik Kecamatan Ampenan,  
1991 Publikasi Kecamatan Ampenan Dalam Angka, (yang diterbitkan dalam bentuk stensilan), hal 8.
- 4) Kaur Pemerintahan Kelurahan Ampenan Utara,  
1992 Monografi Kelurahan Ampenan Utara Kecamatan Ampenan Bulan Januari s.d. Juni 1992, halaman 1.
- 5) Ibid, halaman 1
- 6) Harian Suara Nusa, tanggal 17 Desember 1992
- 7) Kaur Pemerintahan Kelurahan Ampenan Utara, op cit  
halaman 18
- 8) Op Cit, halaman 2
- 9) Op Cit, halaman 3



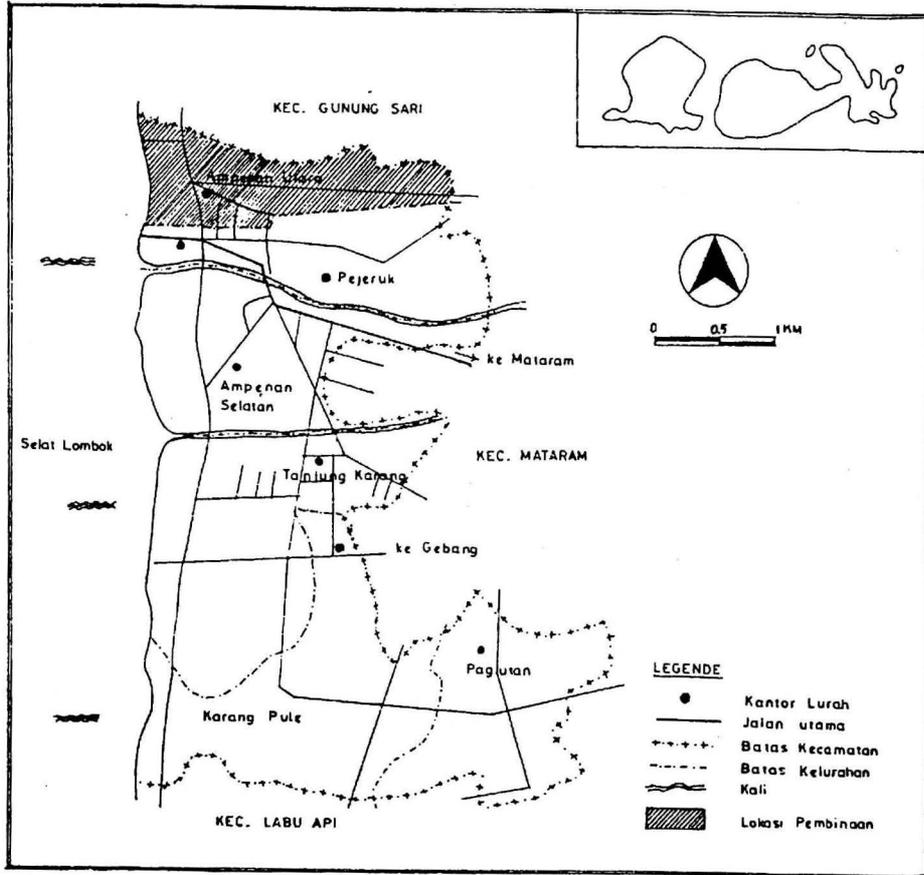
Peta No. 1 : Peta Wilayah Nusa Tenggara Barat

SUMBER : PETA PENGOBATAN TRADISIONAL NTB.



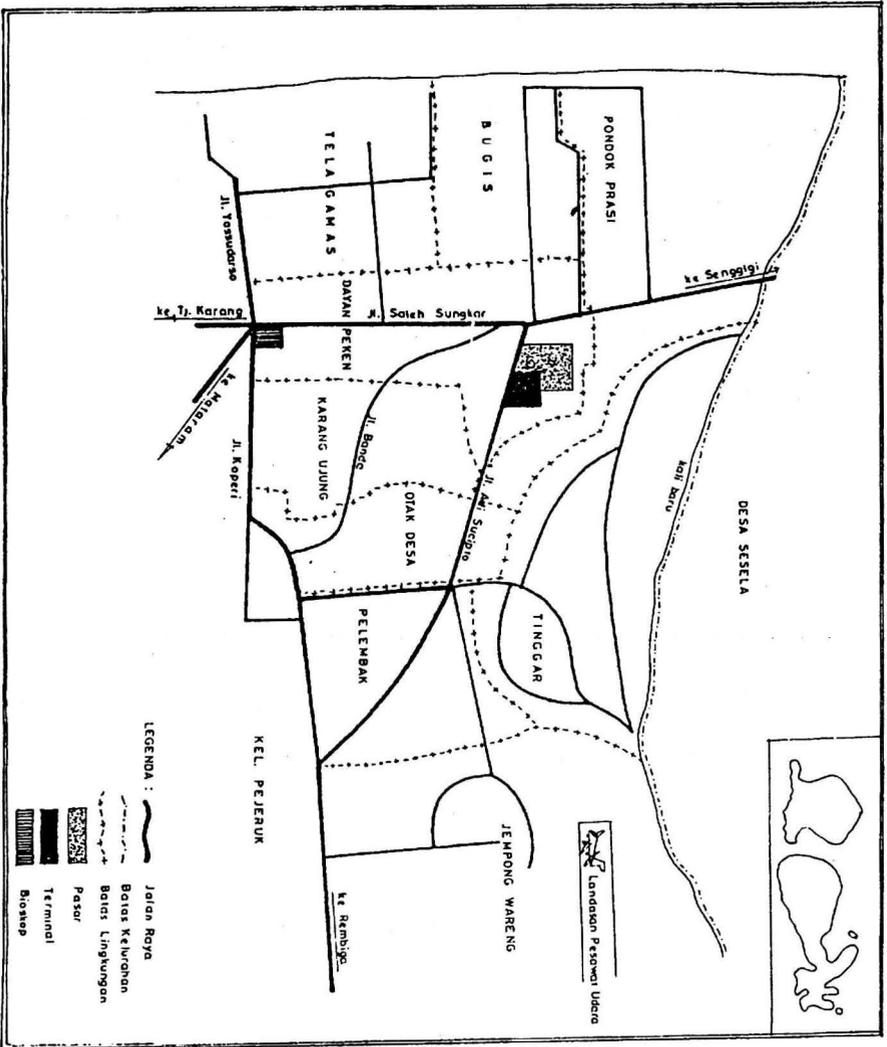
Peta No. 2 : Peta Wilayah Kotip Mataram

SUMBER : PETA KOTIP MATARAM



Peta No. 3 Peta Wilayah Kecamatan Ampenan

SUMBER : STATISTIK KAB. LOBAR



Peta. No. 4 : Peta Kelurahan Ampenan Utama

SUMBER : MONOGRAFI KEL. AMPEANAN UTAMA

**TABEL BAB II**  
**TABEL II.1**  
**JUMLAH PENDUDUK DAN KEPALA KELUARGA**  
**DI KECAMATAN AMPENAN DIRINCI PER**  
**KELURAHAN TAHUN 1990**

Kelurahan	Jumlah Penduduk	Kepala Keluarga
1. Pagutan	13.657	2.821
2. Karang Pule	12.826	2.894
3. Tanjung Karang	16.826	3.632
4. Ampenan Selatan	15.302	3.459
5. Ampenan Tengah	9.508	1.919
6. Ampenan Utara	16.529	3.451
7. Pejeruk	10.623	2.237
<b>Jumlah</b>	<b>95.129</b>	<b>20.413</b>

Sumber : Hasil Registrasi Penduduk  
 Akhir Tahun 1990

**TABEL II.2**  
**KEPADATAN PENDUDUK KECAMATAN AMPENAN**  
**PER Km2 DIRINCI PER KELURAHAN**  
**TAHUN 1990**

Kelurahan	Luas Km2	Jumlah Penduduk	Keterangan
1. Pagutan	2,90	13.657	4.709
2. Karang Pule	4,90	12.826	2.618
3. Tanjung Karang	4,50	16.684	3.708
4. Ampenan Selatan	1,86	15.302	8.227
5. Ampenan Tengah	0,39	9.508	24.379
6. Ampenan Utara	4,05	16.529	4.081
7. Pejeruk	3,08	10.623	3.449
<b>Jumlah</b>	<b>21,68</b>	<b>95.129</b>	<b>4.388</b>

Sumber : Hasil Registrasi Penduduk  
 Akhir Tahun 1990

**TABEL II.3**  
**JUMLAH PENDUDUK KECAMATAN AMPENAN**  
**MENURUT KEWARGA NEGARAAN DIRINCI**  
**PER KELURAHAN TAHUN 1990**

Kelurahan	WNI	WNA	Jumlah
1. Pagutan	13.657	-	13.657
2. Karang Pule	12.826	-	12.826
3. Tanjung Karang	16.675	9	16.684
4. Ampenan Selatan	15.159	143	15.302
5. Ampenan Tengah	9.123	385	9.508
6. Ampenan Utara	16.219	310	16.529
7. Pejeruk	10.621	2	10.623
<b>Jumlah</b>	<b>94.280</b>	<b>849</b>	<b>95.129</b>

Sumber : Hasil Registrasi Penduduk  
 Akhir Tahun 1990

**TABEL II.4**  
**JUMLAH PENDUDUK MENURUT GOLONGAN UMUR**  
**DI KECAMATAN AMPENAN DIRINCI**  
**PER KELURAHAN TAHUN 1990**

Kelurahan	Dewasa		Jumlah
	Laki	Perempuan	
1. Pagutan	2.963	4.025	6.988
2. Karang Pule	3.283	4.229	7.512
3. Tanjung Karang	5.379	4.854	10.223
4. Ampenan Selatan	4.024	3.912	7.936
5. Ampenan Tengah	2.650	2.704	5.354
6. Ampenan Utara	3.957	3.823	7.780
7. Pejeruk	2.713	2.903	5.616
<b>Jumlah</b>	<b>24.969</b>	<b>26.450</b>	<b>51.419</b>

Sumber : Hasil Registrasi Penduduk  
 Akhir Tahun 1990

**TABEL II.5**  
**JUMLAH PENDUDUK MENURUT GOLONGAN UMUR**  
**DI KECAMATAN AMPENAN DIRINCI**  
**PER KELURAHAN TAHUN 1990**

Kelurahan	Anak-anak		Jumlah
	Laki	Perempuan	
1. Pagutan	3.737	2.932	6.669
2. Karang Pule	3.117	2.197	5.314
3. Tanjung Karang	3.374	3.077	6.451
4. Ampenan Selatan	3.720	3.646	7.366
5. Ampenan Tengah	1.978	2.176	4.154
6. Ampenan Utara	4.218	4.531	8.749
7. Pejeruk	2.665	2.342	5.007
Jumlah	22.809	20.901	43.710

Sumber : Hasil Registrasi Penduduk  
 Akhir Tahun 1990

**TABEL II.6**  
**JUMLAH PENDUDUK WNI DI KECAMATAN**  
**AMPENAN DIRINCI PER KELURAHAN, DEWASA,**  
**ANAK DAN JENIS KELAMIN TAHUN 1990**

Kelurahan	Dewasa				Jumlah
	Laki	Perempuan	Laki	Perempuan	
1. Pagutan	2.963	4.025	3.737	2.932	13.657
2. Karang Pule	3.283	4.229	3.117	2.197	12.826
3. Tanjung Karang	5.374	4.852	3.373	3.076	16.675
4. Ampenan Selatan	3.983	3.870	3.694	3.612	15.159
5. Ampenan Tengah	2.502	2.562	1.931	2.128	9.123
6. Ampenan Utara	3.827	3.713	4.188	4.491	16.219
7. Pejeruk	2.711	2.903	2.665	2.342	10.621
<b>Jumlah</b>	<b>24.643</b>	<b>26.154</b>	<b>22.705</b>	<b>20.778</b>	<b>94.280</b>

Sumber : Hasil Registrasi Penduduk  
 Akhir Tahun 1990

**TABEL II.7**  
**JUMLAH KEPALA KELUARGA DAN JUMLAH JIWA**  
**MENURUT KEWARGANEGARAAN DI KELURAHAN**  
**AMPENAN UTARA**

No	Nama Lingkungan	KK	WNRI		KK	WNA		Jumlah		Ket
			L	P		L	P	L	P	
1.	Pondok Perasi	308	614	816	2	4	5	618	821	
2.	Bugis	212	515	642	-	-	-	515	642	
3.	Telagamas	351	698	980	32	50	61	748	1.040	
4.	Dayan Peken	490	1.241	1.555	24	51	54	1.292	1.609	
5.	Karang Ujung	148	428	545	18	47	45	475	590	
6.	Otak Desa	187	479	631	-	-	-	479	631	
7.	Tinggar	431	1.011	1.261	6	20	10	1.031	1.271	
8.	Pelembak	452	842	1.161	1	1	2	843	1.163	
9.	Jempong	141	367	532	-	-	-	367	532	
<b>Jumlah</b>		<b>2.720</b>	<b>6.195</b>	<b>8.123</b>	<b>83</b>	<b>173</b>	<b>177</b>	<b>6.368</b>	<b>8.300</b>	

Sumber : Monografi Kelurahan Ampenan Utara 1989

**TABEL II.8**  
**JUMLAH PENDUDUK MENURUT TINGKAT**  
**PENDIDIKAN DI KELURAHAN**  
**AMPENAN UTARA**

No.	Nama Lingkungan	Tidak tamat SD/ sederajat	Tamat SD/ sederajat	Tamat SLTP/ sederajat	Tamat SLTA/ sederajat	Tamat Perguruan Tinggai	Tamat Akademi	Ket
1.	Pondok Perasi	352	378	327	162	6	-	
2.	Bugis	99	221	26	27	1	-	
3.	Telagamas	532	373	125	156	20	-	
4.	Dayan Peken	811	638	432	347	9	-	
5.	Karang Ujung	371	253	97	51	5	-	
6.	Otak Desa	175	548	145	78	39	-	
7.	Tinggar	153	361	125	113	9	-	
8.	Pelembak	105	593	145	120	23	-	
9.	Jempong	68	91	25	21	1	-	
<b>Jumlah</b>		<b>2.635</b>	<b>3.405</b>	<b>1.230</b>	<b>982</b>	<b>113</b>	<b>-</b>	

Sumber : Monografi Kelurahan Ampenan Utara 1989

**TABEL II.9**  
**JUMLAH SARANA/PRASARANA KOMUNIKASI**  
**DI KELURAHAN AMPENAN UTARA**

No.	Nama Lingkungan	Prasarana Komunikasi					Keterangan
		T.V.	Telepon	Radio/ Tape	Vidio/ Tape	Lain-lain	
1.	Pondok Perasi	36	2	43	-	-	
2.	Bugis	29	-	43	2	-	
3.	Telagamas	114	19	58	20	-	
4.	Dayan Peken	81	22	87	20	-	
5.	Karang Ujung	58	15	56	25	-	
6.	Otak Desa	118	10	87	9	-	
7.	Tinggar	55	-	65	-	-	
8.	Pelembak	83	10	84	5	-	
9.	Jempong	6	-	25	1	-	
Jumlah		580	78	550	83	-	

Sumber : Monografi Kelurahan Ampenan Utara 1989

**TABEL II.10**  
**JUMLAH SARANA/PRASARANA PEMASARAN**  
**DI KELURAHAN AMPENAN UTARA**

No.	Nama Lingkungan	Prasarana Pemasaran						
		Pasar	Pasar	Kios	Toko	Warung	Losmen Penginapan	Koperasi
1.	Pondok Perasi	-	-	-	-	3	-	-
2.	Bugis	-	1	3	-	-	-	1
3.	Telagamas	-	-	4	2	2	1	-
4.	Dayan Peken	1	-	25	9	2	-	-
5.	Karang Ujung	-	-	7	1	-	-	-
6.	Otak Desa	-	-	15	14	-	2	-
7.	Tinggar	-	-	3	-	-	-	-
8.	Pelembak	-	-	7	7	-	-	-
9.	Jempong	-	-	2	-	-	-	1
Jumlah		1	1	71	33	7	3	2

Sumber : Monografi Kelurahan Ampenan Utara 1989

**TABEL II.11**  
**JUMLAH SARANA/PRASARANA PERUMAHAN**  
**PENDUDUK DI KELURAHAN**  
**AMPENAN UTARA**

No.	Nama Lingkungan	Jenis Prasarana Perumahan					Jumlah	Ket
		Permanen	Semi permanen	Kayu	Bambu	Panggung		
1.	Pondok Perasi	154	617	13	33	-	267	
2.	Bugis	61	97	5	21	1	139	
3.	Telagamas	159	94	-	62	-	315	
4.	Dayan Peken	368	104	9	27	-	508	
5.	Karang Ujung	64	68	4	23	-	159	
6.	Otak Desa	257	108	12	29	1	407	
7.	Tinggar	41	67	30	46	-	184	
8.	Pelembak	115	141	45	79	-	430	
9.	Jempong	25	72	5	37	-	139	
<b>Jumlah</b>		<b>1.294</b>	<b>772</b>	<b>123</b>	<b>357</b>	<b>2</b>	<b>2.548</b>	

Sumber : Monografi Kelurahan Ampenan Utara 1989

**TABEL II.12**  
**DATA JUMLAH PENDUDUK MENURUT AGAMA**  
**DI KELURAHAN AMPENAN UTARA**

No.	Nama Lingkungan	Komposisi Penduduk Menurut Agama						Ket
		Islam	Kristen	Protestan	Hindu	Budha	Lain-lain	
1.	Pondok Perasi	1.418	4	-	10	7	-	
2.	Bugis	1.157	-	-	-	-	-	
3.	Telagamas	1.572	26	14	-	167	10	
4.	Dayan Peken	2.692	55	11	24	111	8	
5.	Karang Ujung	31	15	3	931	64	21	
6.	Otak Desa	2.210	35	7	14	28	8	
7.	Tinggar	1.100	2	-	8	-	-	
8.	Pelembak	2.004	2	-	8	-	-	
9.	Jempong	899	-	-	-	-	-	
Jumlah		13.083	139	35	987	377	47	

Sumber : Monografi Kelurahan Ampenan Utara 1989

**TABEL II.13**  
**DATA MONOGRAFI KELURAHAN AMPENAN UTARA**  
**KECAMATAN AMPENAN 1992**

---

Kelurahan	: AMPENAN UTARA
Nomor Kode	: 52.01.71.1007
Tingkat Perkembangan	: SWASEMBADA
Kecamatan	: AMPENAN
Kota Administratif	: MATARAM
Kabupaten Dati II	: LOMBOK BARAT
Propinsi Dati I	: NUSA TENGGARA BARAT
Keadaan bulan	: JANUARI s/d JUNI TH. 1992

---

**BIDANG PEMERINTAHAN**

**I. UMUM**

**1. Luas dan batas wilayah :**

A. Luas Desa/Kelurahan : 400 Ha

B. Batas Wilayah :

1. Sebelah Utara : Kali Meninting dan Desa Sesela
2. Sebelah Timur : Kelurahan Rembiga dan Desa Pejeruk
3. Sebelah Selatan : Kelurahan Ampenan Tengah
4. Sebelah Barat : Selat Lombok (pantai Ampenan)

**2. Kondisi Geografis :**

- a. Ketinggian tanah dari permukaan laut : 0 - 5 m
- b. Banyaknya curah hujan : 718 mm/th
- c. Topografi (dataran rendah, tinggi, pantai) : pantai
- d. Suhu udara rata-rata : 25.C - 32.C

### 3. Orbitasi (jarak dari Pusat Pemerintahan Desa/Kelurahan)

- a. Jarak dari Pusat Pemerintahan Kecamatan : 1,3 Km
- b. Jarak dari Pusat Pemerintahan Kota Administratif : 5 Km
- c. Jarak dari ibukota Kabupaten Dati II : 6 Km
- d. Jarak dari ibukota Negara : 1750 Km

## II PERTANAHAN

### 1. Status :

- a. Sertifikat hak milik : xx buah xx ha
- b. Sertifikat hak guna usaha : xx buah xx ha
- c. Sertifikat hak guna bangunan : xx buah xx ha
- d. Sertifikat hak pakai : xx buah xx ha
- e. Tanah Kas Desa : xx buah xx ha
  - 1. Tanah Pecatu : xx buah xx ha
  - 2. Tanah Kas Desa : xx buah xx ha
  - 3. Tanah Desa lainnya : xx buah xx ha
- f. Tanah bersertifikat : xx buah xx ha
- g. Tanah bersertifikat melalui PRONA : xx buah xx ha
- h. Tanah yang belum bersertifikat : xx buah xx ha

### 2. Peruntukan :

- a. Jalan : 4,261 ha
- b. Sawah dan ladang : 114,890 ha
- c. Bangunan umum : 25,935 ha
- d. Empang : - ha
- e. Perumahan/perumahan : 152,080 ha
- f. Jalur hijau : 6,270 ha
- g. Pekuburan : 13,500 ha
- h. Lain-lain : 83,064 ha

Keterangan : xx = Data belum tersedia

### 3. Penggunaan :

- a. Industri : 2,360 ha
- b. Pertokoan/perdagangan : 0,910 ha
- c. Perkantoran : 2,445 ha
- d. Pasar Desa : 0,890 ha
- e. Tanah wakaf : 15,000 ha
- f. Tanah sawah :
  - 1. Irigasi tehnis : 114,89 ha
  - 2. Irigasi setengah tehnis : - ha
  - 3. Irigasi sederhana : - ha
  - 4. Irigasi tadah hujan : - ha
- g. Tanah kering : 152,08 ha
  - 1. Pekarangan : 152,08 ha
  - 2. Perladangan : 0,025 ha
  - 3. Tegalan : 0,015 ha
  - 4. Perkebunan Negara : - ha
  - 5. Perkebunan swasta : - ha
  - 6. Perkebunan rakyat : 19,166 ha
  - 7. Tempat rekreasi : 0,5 ha
- h. Tanah yang belum dikelola :
  - 1. Hutan : - ha
  - 2. Rawa : - ha
  - 3. Lain-lain : - ha

### III. KEPENDUDUKAN :

#### 1. Jumlah penduduk menurut :

- a. Jenis kelamin :
  - 1. Laki-laki : 8.225 orang
  - 2. Perempuan : 8.381 orang
  - 3. Jumlah : 16.606 orang
- b. Kepala Keluarga

**1. Jumlah penduduk menurut :**

**a. Jenis kelamin :**

1. Laki-laki	:	8.225 orang
2. Perempuan	:	8.381 orang
3. Jumlah	:	16.606 orang

**b. Kepala Keluarga**

**c. Kewarganegaraan :**

1. WNI :- Laki-laki	:	8.072 orang
- Perempuan	:	8.234 orang
Jumlah	:	16.306 orang
2. WNA :- Laki-laki	:	153 orang
- Perempuan	:	147 orang
Jumlah	:	300 orang

**2. Jumlah penduduk menurut agama/penghayatan terhadap Tuhan Yang**

**Maha Esa :**

a. Islam	:	14.098 orang
b. Kristen	:	157 orang
c. Katolik	:	61 orang
d. Hindu	:	1.231 orang
e. Budha	:	1.059 orang

**f. Penganut/Penghayatan**

**Kepercayaan Terhadap**

**Tuhan YME** : - orang

**3. Jumlah Penduduk menurut usia :**

**a. Kelompok pendidikan :**

1. 00 - 03 tahun	:	xx orang
2. 04 - 06 tahun	:	xx orang
3. 07 - 12 tahun	:	1266 orang
4. 13 - 15 tahun	:	xx orang
5. 16 - 18 tahun	:	xx orang
6. 19 ke atas	:	xx orang

**Keterangan : xx = data belum tersedia**

- b. Kelompok tenaga kerja :
1. 10 - 14 tahun : 157 orang
  2. 15 - 19 tahun : 699 orang
  3. 20 - 26 tahun : 1.208 orang
  4. 27 - 40 tahun : 4.109 orang
  5. 41 - 56 tahun : 2.011 orang
  6. 57 ke atas : 523 orang
4. Jumlah penduduk menurut tingkat pendidikan :
- a. Lulusan pendidikan umum :
1. Taman Kanak-Kanak : - orang
  2. Sekolah Dasar : 257 orang
  3. SMTP/Sederajat : 2.189 orang
  4. SMTA/Sederajat : 5.071 orang
  5. AKADEMI/DI-D3 : 103 orang
  6. Sarjana (Si-S3) : 31 orang
- b. Lulusan pendidikan khusus :
1. Pondok Pesantren : xx orang
  2. SLB : xx orang
  3. Pendidikan Keagamaan : xx orang
  4. Kursus/Ketrampilan : xx orang
  5. Lain-lain : xx orang
5. Jumlah penduduk menurut mata pencaharian :
- a. Karyawan :
1. Pegawai Negeri Sipil : 375 orang
  2. ABRI : xx orang
  3. Swasta : 425 orang
- b. Wiraswasta/pedagang : 360 orang
- c. Tani : 212 orang
- d. Pertukangan : 271 orang
- e. Buruh tani : 61 orang
- f. Nelayan : 617 orang

- g. Pendulang : xx orang
- h. Jasa : xx orang
- i. Pensiunan : xx orang

6. Jumlah penduduk menurut mobilisasi/mutasi penduduk :

a. Lahir :

- 1. Laki-laki : 19 orang
- 2. Perempuan : 23 orang
- Jumlah : 42 orang

b. Mati :

- 1. Laki-laki : 16 orang
- 2. Perempuan : 9 orang
- Jumlah : 25 orang

c. Datang :

- 1. Laki-laki : 4 orang
- 2. Perempuan : 5 orang
- Jumlah : 9 orang

d. Pindah :

- 1. Laki-laki : 6 orang
- 2. Perempuan : 3 orang
- Jumlah : 9 orang

Keterangan : xx = data belum tersedia

## **BAB III**

### **DISIPLIN MASYARAKAT DI PEMUKIMAN KELURAHAN AMPENAN UTARA**

#### **A. DISIPLIN DALAM PENANGANAN LIMBAH KELUARGA/SAMPAH**

Kebersihan lingkungan merupakan salah satu indikator untuk mengukur tingkat kedisiplinan masyarakat penghuninya. Lingkungan yang bersih dan terwujud apabila sikap dan perilaku warga masyarakat terhadap limbah/sampah yang dihasilkan oleh setiap aktivitas mereka telah tepat dan benar. Sikap dan perilaku demikian biasanya lahir dan dilatar belakangi oleh tingkat pengetahuan, kesadaran dan disiplin pribadi di tengah-tengah masyarakat. Disamping itu, kebiasaan hidup tertib dan bersih merupakan hasil dari proses panjang transformasi sistem nilai, baik nilai budaya maupun nilai agama. Dalam perkembangan selanjutnya, aspek-aspek tersebut berhadapan dengan sumber varian yang ada dalam masyarakat perkotaan yang heterogen. Hal ini menyebabkan terjadinya perbedaan tingkat kedisiplinan masyarakat di lingkungan pemukiman, khususnya dalam memelihara kebersihan lingkungan pemukiman.

Demikian pula halnya dengan kondisi masyarakat di Kelurahan Ampenan Utara. Heterogenitas masyarakat, baik sistem sosial/budaya maupun sistem kepercayaan/agama merupakan faktor dasar yang memberikan peluang bervariasinya sikap dan perilaku masyarakat terhadap limbah keluarga/sampah.

Pemahaman masyarakat tentang limbah keluarga/sampah dengan segala aspeknya merupakan salah satu kunci untuk membuka tabir kearifan ekologi masyarakat. Kearifan ekologi masyarakat timur pada umumnya menganggap dirinya sebagai bagian dari lingkungan hidupnya. Ia tidak berdiri sendiri, melainkan berkaitan dengan yang lain 1) Hal ini berarti bahwa pengertian seseorang tentang sesuatu berarti mengetahui hubungannya dengan sesuatu yang lain.

Dalam hal sampah masyarakat Ampenan Utara mengerti dan memahaminya sebagai sisa/sesuatu dari suatu proses yang harus dibuang. Pemahaman yang sederhana ini memberi kemungkinan sikap dan perilaku yang sederhana pula.

Sebagian besar warga masyarakat Ampenan Utara mengidentifikasi sampah dapur dan guguran daun sebagai sesuatu yang harus dibuang.

Ini berarti bahwa ada jenis sampah yang tidak dibuang; mungkin disimpan, didaur-ulang atau ditimbun di tempat-tempat tertentu yang tersembunyi dengan harapan suatu saat nanti akan ada gunanya/dapat dimanfaatkan. Pandangan atau sikap seperti ini umumnya kita jumpai di lingkungan masyarakat tradisional dengan penghasilan rendah, yang merupakan mayoritas penduduk Ampenan Utara.

Fenomena lain yang mengungkap pengetahuan warga masyarakat Ampenan Utara tentang limbah keluarga adalah pandangannya terhadap tinja. Umumnya masyarakat Ampenan Utara menyebut limbah keluarga jenis ini dengan *kotoran yang najis*.

Mungkin pandangan ini berangkat dari pemahaman masyarakat yang beragama Islam bahwa tinja tergolong najis berat (najis mugallazah), yang dapat menghalangi mereka melaksanakan ibadah shalat. Oleh karena itu, masyarakat Ampenan Utara warganya mayoritas beragama Islam meyakini bahwa buang air besar tidak boleh dilakukan di sembarangan tempat. Pandangan semacam ini mengandung implikasi bahwa kotoran najis/tinja ini tidak boleh berada di tempat yang tidak diperuntukkan untuknya. Di kalangan masyarakat tradisional berlaku pandangan bahwa orang yang membuang kotoran najis di tempat-tempat seperti halaman rumah, jalan dan tempat-tempat lainnya dinilai sebagai orang jahat yang harus dihukum; biasanya kotoran najisnya/tinjanya dibakar dengan harapan agar terasa sangat panas pada bagian dubur orang yang bersangkutan.

Dari pemahaman masyarakat tentang limbah keluarga/sampah seperti itu menggambarkan adanya kearifan mengenai lingkungan yang harus bersih sebagai citra lingkungan hunian. Permasalahannya adalah bagaimana membuang limbah keluarga, baik sampah dapur maupun tinja yang sopan dan higienis serta bagaimana mendaur ulang limbah keluarga tertentu sehingga dapat dipergunakan kembali.

Pemahaman masyarakat tentang limbah keluarga/sampah seperti yang telah dikemukakan di atas, melatarbelakangi sikap dan perilaku mereka terhadap limbah keluarga/sampah tersebut. Secara umum, masyarakat Ampenan Utara, memandang bahwa sampah harus disingkirkan dari lingkungan tempat tinggal agar lingkungan tetap bersih dan nyaman dipandang. Namun demikian, kenyataan yang dijumpai dalam masyarakat Ampenan Utara seringkali berbeda dengan pemahaman dan pandangan mereka. Variasi sikap dan perilaku ini sifatnya kualitatif yang diukur dengan intensitas pelaksanaan tanggungjawab sosial

untuk menciptakan lingkungan pemukiman yang bersih, sehat dan indah.

Ada beberapa fenomena yang terlihat berkaitan dengan kedisiplinan masyarakat Ampenan Utara dalam menangani masalah limbah keluarga/ sampah ini. Sebagian besar warga masyarakat Ampenan Utara memperlakukan limbah keluarga/ sampah secara tidak tuntas, artinya penanganan limbah keluarga yang mereka lakukan ternyata telah menimbulkan masalah baru. Misalnya, pola yang paling sederhana yang mereka lakukan adalah menimbun limbah keluarga/sampah di pojok halaman, di belakang rumah atau di tempat-tempat yang tidak dapat segera terlihat.

Bahkan ada yang menimbun limbah keluarga/sampah ini di tempat-tempat umum seperti di pinggir jalan, di atas kampung dan di pinggir sungai. Pola penanganan seperti ini oleh mereka dipandang telah mengatasi masalah lingkungan, sehingga perilaku semacam ini berlangsung hingga kini dan dilakukan oleh sebagian besar warga Ampenan Utara. Sebagian kecil warga Ampenan Utara yang berpenghasilan di atas rata-rata membuat bak-bak sampah di depan rumah masing-masing dan selanjutnya diangkut oleh petugas pengangkutan sampah yang setiap bulannya dibayar secara iuran oleh warga yang bersangkutan.

Perilaku minimal terhadap limbah keluarga/sampah ini disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain faktor kondisi ekonomi penduduk yang relatif rendah. Diatas 60 % penduduk Kelurahan Ampenan Utara menggantungkan hidupnya sebagai nelayan, buruh, buruh tani, tukang kayu dan selanjutnya. Potret sosial semacam ini dapat memberikan gambaran tentang sejauh mana kemampuan warga masyarakat untuk menjakau hal-hal yang bersifat sekunder. Akibatnya, beberapa lingkungan yang dihuni oleh kelas-kelas masyarakat seperti itu ditambah dengan

tingkat kepadatan penduduk yang relatif tinggi menyebabkan lingkungan hunian mereka menjadi kurang terurus dan kumuh. Disamping itu, kenyataan sangat kurangnya fasilitas pelayanan umum seperti bak-bak sampah dan MCK umum serta alat-alat/tenaga pengangkut sampah telah ikut membuat kian parahnya kondisi lingkungan mereka.

Upaya lain yang dilakukan oleh warga masyarakat Ampenan Utara untuk mengatasi masalah limbah keluarga/sampah ini adalah dengan cara membakarnya di tempat penimbunan. Pola ini dilakukan oleh warga masyarakat yang tingkat kepadatan penduduk lingkungannya relatif agak rendah dan jarak antar rumah yang satu dengan yang lain relatif renggang. Sikap ini adalah salah satu bentuk toleransi dan tenggang rasa warga dalam bertetangga. Dalam sudut pandangan kesehatan mungkin cara (pembakaran) ini higienis jika dibandingkan dengan cara yang disebut pertama di atas, menimbun. Dengan pembakaran, penyebaran bakteri akibat pembusukan dapat dihindari dan sampah tidak bertumpuk dalam jumlah maupun jenis yang kian banyak.

Barang-barang bekas seperti kaleng, plastik, kertas dan botol umumnya tidak dibuang/dimusnahkan. Benda-benda tersebut diharapkan dapat memenuhi kebutuhan tertentu pada suatu saat atau dapat pula dijual kepada pengumpul barang bekas. Kelihatannya cara ini lebih bijaksana karena disamping mengurangi tumpukan limbah domestik, juga dapat memberikan tambahan untuk belanja dapur. Namun demikian, ketika jumlah/tumpukan barang bekas tersebut menjadi sedemikian banyaknya kesulitan baru muncul pula. Penggunaan teknologi tepat guna untuk mendaur-ulang tidak memiliki, sementara rasa sayang untuk menjualnya seringkali muncul. Akibatnya, jumlah barang bekas itu kian hari bertambah.

Akhirnya dibiarkan saja bertumpuk di belakang rumah, dibalik pintu, dibawah kolong tempat tidur, di pojok dapur dan sebagainya. Kondisi ini sangat tidak menguntungkan bagi kualitas kesehatan lingkungan rumah yang bersangkutan.

Di lingkungan pemukiman baru, terutama daerah bekas persawahan dengan tofografi yang rendah, sampah yang sementara ini memiliki nilai negatif dimanfaatkan oleh penduduk untuk pengurugan dan *sanitary landfill*. Dalam hal ini sampah yang ditimbun menjadi bernilai positif yaitu meningkatkan mutu dan nilai kegunaan tanah. Tanah yang sudah dimatangkan oleh sampah ini bisa memiliki nilai yang lebih besar dibandingkan dengan keadaan sebelumnya. Disamping itu kondisi kedisiplinan warga masyarakat di lingkungan pemukiman baru relatif lebih tinggi; penduduk lebih sadar akan arti pentingnya kebersihan, keteraturan dan keindahan lingkungan. Mungkin hal ini disebabkan oleh tingkat pendidikan warga di sini rata-rata cukup tinggi ditambah dengan kondisi sosial ekonomi yang umumnya lebih baik.

Salah satu limbah domestik (limbah keluarga) yang juga dapat mempengaruhi kualitas lingkungan pemukiman adalah pembuangan air kotor dan pembuangan tinja. Tingginya beban kependudukan di sektor perkotaan (Ampenan Utara) menyebabkan lambat laun volume air buangan bertambah sehingga menjadi masalah tersendiri. Secara teknis, pola penanganan air buangan ini seharusnya dialirkan melalui saluran tertutup atau jaringan pipa. Dibeberapa lingkungan yang padat penduduknya, masalah air buangan ini sudah mencapai taraf *harus diperhatikan*. Gejala yang tampak, seperti air buangan yang mengalir ke halaman pembuangan langsung ke saluran-saluran/got, dan pembuatan septic tank yang tidak memenuhi syarat dari sudut pandang banyak aspek.

Kenyata seperti ini sangat jelas terlihat di lingkungan pemukiman yang banyak menggunakan sumur umum atau fasilitas mandi, cuci, kakus (MCK) umum.

Disamping penanganan air kotor salah satu aspek sanitasi adalah pembuangan tinja. Ada dua hal yang menarik untuk dicatat sehubungan dengan *buang air besar* di dalam masyarakat kelurahan Ampenan Utara, yaitu :

1. Pandangan masyarakat pinggiran yang menyadari tinja sebagai najis tidak diikuti oleh perilaku mempertahankan *kesucian air* yang mengalir seperti sungai atau saluran. Sementara di kalangan mereka aktivitas : mandi, cuci dan sebagainya di tempat itu.
2. Sebagian besar warga masyarakat, terutama yang berpenghasilan di bawah rata-rata (rendah) walaupun telah dapat mengatasi masalah MCK tetapi tampaknya seperti terpisah dengan keseluruhan lingkungan hunian ; tempat tersebut dianggap tempat kotor sehingga jarang sekali diperhatikan kebersihannya.

Fenomena sanitasi seperti yang telah dikemukakan itu tidak disadari oleh warga masyarakat sebagai dapat menyebabkan berbagai macam penyakit. Kelembaban tanah di sekitar pekarangan merembes ke dalam rumah dan mengakibatkan sirkulasi udara yang tidak sehat dan sirkulasi penggunaan air tanah dengan jarak yang sangat pendek menyebabkan mewabahnya penyakit diare dan penyakit lainnya. Sebagai ilustrasi salah satu kasus masalah sanitasi ini adalah lingkungan Jempong. Lingkungan ini dihuni oleh 141 KK, 899 jiwa, 139 sarana perumahan hanya memiliki 25 buah jamban keluarga, tidak memiliki MCK umum dan 25 buah sumur perigi. Dapat dipertanyakan bagaimana kondisi sanitasi lingkungannya ?

Seluruh warga masyarakat Ampenan Utara merasakan kurangnya fasilitas pelayanan umum untuk kebersihan lingkungan. Keluhan tentang hal ini lahir dari lingkungan yang padat penduduk dengan tingkat pendidikan relatif cukup, tetapi kondisi sosial ekonomi rendah. Lingkungan seperti ini terdapat di pusat kota Ampenan Utara. Mereka merasakan sangat kesulitan dalam menghadapi masalah sampah ini. Dengan lahan pekarangan yang sempit, tingkat kepadatan penduduk yang tinggi, produk sampah yang besar dan bervariasi menyebabkan mereka harus mengeluarkan biaya ekstra bahkan waktu dan tenaga. Betapa tidak, Kelurahan Ampenan Utara dengan wilayah demikian luas dan kepadatan penduduk yang termasuk salah satu tertinggi di wilayah Kecamatan Ampenan, hanya memiliki 1 (satu) buah tempat pembuangan sampah, sementara kemampuan swadaya masyarakat dalam hal ini sangat rendah.

Dalam hal sanitasi, terutama fasilitas MCK umum, usaha pemerintah yang telah membangun 5 (lima) buah MCK umum dirasakan masih belum memadai. Lebih-lebih yang kini masih berfungsi hanya tinggal 2 buah. Itupun dalam kondisi yang sangat memprihatinkan, baik dilihat dari segi bangunannya sendiri maupun dari sudut kebersihannya. Tampaknya, menurut beberapa kalangan, kondisi itu disebabkan oleh kurangnya pertimbangan yang menyangkut penentuan tempat/letak bangunan MCK tersebut disamping disiplin dan tanggungjawab para pemakai yang sangat miskin dalam hal kesadaran sosial, kurangnya kepedulian terhadap masalah yang dihadapi bersama menyebabkan kurangnya usaha untuk mencari jalan keluar bersama. Kenyataan ini sekaligus menunjukkan kurang berfungsinya lembaga-lembaga sosial kemasyarakatan dalam menanggulangi masalah-masalah sosial yang ada di Kelurahan Ampenan Utara.

Kendala lain yang dihadapi dalam rangka penggunaan fasilitas MCK umum ini adalah faktor kebiasaan. Untuk masyarakat dengan pola sikap yang masih tradisional, penggunaan fasilitas MCK umum ini agaknya membutuhkan waktu yang panjang, kalau tidak bisa dikatakan sulit dimasyarakatkan karena faktor kebiasaan ini. Mereka merasa canggung mandi bersama dan tidak terbiasa buang air besar di jamban. Kondisi ini mungkin disebabkan oleh faktor pendidikan dan pendekatan yang dipergunakan dalam penyuluhan-penyuluhan sekitar pemasyarakatan fasilitas MCK umum tersebut dari segi materinya.

Dari fenomena-fenomena tentang sikap dan perilaku warga masyarakat Ampenan Utara terhadap limbah keluarga/sampah dan pandangannya tentang keberadaan fasilitas umum, kebersihan lingkungan, pada dasarnya masih memiliki citra yang memadai, walaupun mungkin sikap dan perilaku tersebut berangkat dari kearifan tradisional. Namun demikian, masalah mungkin terletak pada kesulitan beradaptasi dengan tuntutan dan kemajuan masyarakat perkotaan. Hal ini paling tidak disebabkan oleh beberapa faktor , seperti :

1. Tingkat sosial ekonomi yang relatif rendah yang menyebabkan kemampuan untuk mewujudkan citra lingkungan yang bersih dan sehat tersebut sangat terbatas.
2. Tingkat pendidikan sebagian besar warga masyarakat yang relatif rendah sehingga daya antisipasi terhadap kemajuan peradabanpun menjadi rendah.
3. Rendahnya, baik frekuensi maupun intensitas penerapan dan penyuluhan sekitar disiplin masyarakat perkotaan dalam kaitannya dengan kebersihan lingkungan.

Realitas sosial masyarakat Kelurahan Ampenan Utara ditinjau dari segi sistem nilai acuan, dapat dikategorikan kedalam masyarakat marginal dengan karakteristik sebagai berikut :

1. Masyarakat Kelurahan Ampenan Utara adalah masyarakat yang memiliki latar belakang budaya etnik yang sangat heterogin.
2. Wilayah Kelurahan Ampenan Utara yang sampai dengan dekade tahun 1970 merupakan kota pelabuhan telah menjadikan sebagai satu-satunya pintu gerbang masuk ke pulau Lombok Keberadaannya sebagai kota pelabuhan telah berlangsung berabad-abad, dan ini sangat berpengaruh terhadap perkembangan sistem nilai sosial budaya masyarakatnya.
3. Sebagai kota pelabuhan, wilayah Kelurahan Ampenan Utara merupakan wilayah yang sangat terbuka terhadap pengaruh luar, sehingga masyarakatnya secara sosiokultural hampir bisa dipastikan tidak memiliki nilai budaya yang jelas sebagai acuan.

Memperhatikan karakteristik seperti itulah maka lembaga integrasi masyarakat yang berperan dominan adalah lembaga-lembaga formal dan lembaga-lembaga keagamaan.

Dalam kaitannya dengan masalah kebersihan pada umumnya, seluruh sistem nilai budaya etnik yang ada memiliki pandangan timbulnya konflik yang disebabkan oleh stereotipe etnik dalam hal kebersihan ini. Kenyataan ini merupakan potensi penopang yang sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat. Kalaupun ada perbedaan terminologi tentang bersih dan tidak bersih mungkin timbul dari pandangan agama, khususnya kelompok Islam yang mengidentikkan kotor dengan najis atau bersih dengan suci.

Permasalahan lain yang menyebabkan seolah-olah terkesan mengapa warga masyarakat Ampenan Utara kurang memiliki disiplin lingkungan adalah terbatasnya kemampuan mereka untuk menerjemahkan dan mengaktualkan idiom-idiom budaya maupun agama tentang kebersihan ini. Mereka mengenal citra bersih seperti : bersih itu sehat, kebersihan itu setengah dari iman, dan lain-lain sebagainya, tetapi kemampuan mereka baik intelektualitas maupun ekonomis sangat terbatas untuk mengelaborasi dan merealisasikan idiom-idiom tersebut ke dalam sikap dan perilaku keseharian mereka. Untuk mengantisipasi keadaan ini, diperlukan penerapan kebijakan yang lebih strategis dengan mempertimbangkan kondisi masyarakat terutama yang menyangkut mentalitas dan sistem nilai yang menjadi acuannya. Pembinaan bidang non fisik, disamping pembangunan fasilitas fisik, melalui berbagai penerangan dan penyuluhan agar ditingkatkan intensitasnya, sehingga secara bertahap akan dapat mengubah sikap mental warga masyarakat ke-arah sadar lingkungan sesuai dengan tuntutan perabadian, secara swadaya.

Disiplin masyarakat dalam hal lingkungan bukanlah suatu yang berdiri sendiri, tetapi berkait erat dengan masalah-masalah sosial, pendidikan, ekonomi, dan lain-lain sebagainya. Namun demikian, disarankan agar dalam rangka pembinaan disiplin masyarakat tersebut dilakukan pendekatan "*revitalisasi sistem nilai*" dan "*mobilisasi melalui kebijakan yang bersifat yuridis formal*".

## **B. DISIPLIN DALAM PARTISIPASI MASYARAKAT TERHADAP KEGIATAN SOSIAL**

Dimensi lain dari disiplin masyarakat di lingkungan pemukiman adalah kerukunan yang tercipta sebagai akibat dari saling pengertian antara sesama warga akan hak dan kewajiban

masing-masing dalam rangka memelihara ketentraman bersama. Kesadaran akan hak dan kewajiban ini menuntut sikap dan perilaku partisipatif dalam setiap aktivitas masyarakat sebagai upaya mengantisipasi kebijakan maupun keputusan musyawarah warga. Intensitas partisipasi masyarakat dalam kegiatan-kegiatan sosial memiliki permasalahan yang jauh lebih kompleks jika dibandingkan dengan permasalahan disiplin dalam penanganan limbah keluarga/sampah.

Permasalahan-permasalahan yang dimaksud dan menggejala dalam masyarakat Kelurahan Ampenan Utara, antara lain :

1. Kadar pemahaman masyarakat tentang partisipasi yang relatif terbatas. Dalam terminologi administrasi pembangunan, partisipasi, di samping sebagai pendekatan dalam pelaksanaan pembangunan, juga merupakan salah satu tujuan, yaitu terlibatnya seluruh masyarakat dalam suatu proses pembangunan berencana sesuai dengan arah dan strategi yang telah ditetapkan. Berangkat dari terminologi ini dapat dipahami bahwa intensitas partisipasi masyarakat tidak sepenuhnya tergantung pada kesadaran masyarakat saja, tetapi juga usaha pemerintah dalam membina dan mengembangkan partisipasi masyarakat ini sebagai salah satu sasaran pembangunan. Ada kecendrungan saat ini yang meninjau permasalahan partisipasi dari satu sisi saja yaitu 'peran serta masyarakat dalam pembangunan tanpa melihat usaha dan upaya apa yang telah dilakukan untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang peluang dan ruang lingkup yang dapat dijadikan lahan dalam rangka pengembangan partisipasi ini. Sehingga dengan demikian tidak keliru jika wawasan dan pemahaman masyarakat tentang partisipasi ini sangat terbatas. Kecenderungannya adalah penyempitan arti partisipasi di kalangan masyarakat awam, termasuk di Kelurahan Ampenan Utara.

Mereka hanya memahami partisipasi sebagai keikutsertaan masyarakat dalam kegiatan yang sifatnya insidental dan seremonial, termasuk gotong royong. Pemahaman yang terbatas seperti ini tentu saja akan mempersempit ruang lingkup partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Hal lain yang menyebabkan keterbatasan pemahaman mereka adalah kurangnya informasi yang jelas tentang pembangunan itu sendiri, termasuk bagaimana masyarakat dapat memahami dan mengaktualkan partisipasi mereka.

Sebagai tolok ukur untuk menilai disiplin masyarakat dalam hal partisipasi ini, ada baiknya dikemukakan bentuk partisipasi masyarakat seperti yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 1984 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Barat. Bentuk partisipasi yang diatur di dalam Perda tersebut adalah prakarsa dan swadaya. Kedua bentuk inilah yang selanjutnya dikembangkan menjadi berbagai jenis sesuai dengan kemampuan masyarakat yang bersangkutan.

Pemahaman masyarakat Ampenan Utara tentang partisipasi ini, yang identik dengan gotong royong tampaknya sangat berpengaruh pada seluruh lapisan masyarakatnya. Pemahaman yang mengarah kepada pengembangan swakarsa (penyampaian prakarsa oleh rakyat) dan swadaya (pelaksanaan pembangunan oleh rakyat) terbatas pada tingkat pemimpin masyarakat yang tergabung dalam Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD). Sehingga tidak mengherankan seluruh responden memberikan batasan terhadap partisipasi sebagai gotong royong.

Dari uraian singkat diatas jelas bahwa pemahaman tentang partisipasi masyarakat Kelurahan Ampenan Utara masih sangat terbatas. Hal ini tampaknya memerlukan perhatian khusus dalam penyusunan kebijakan pembangunan sektor perkantoran, khususnya dalam rangka mengimplementasikan partisipasi sebagai alat sekaligus sasaran pembangunan.

2. Kelembagaan partisipasi masyarakat yang kurang disosialisasikan. Lembaga utama yang diharapkan sebagai wadah partisipasi masyarakat adalah LKMD, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari pemerintah desa/kelurahan maupun dengan lapisan masyarakat. Lembaga ini telah menunjukkan eksistensinya ditengah-tengah masyarakat, tidak saja secara administratif, tetapi peran sertanya dalam proses pembangunan. Permasalahannya adalah sejauh mana upaya lembaga legislatif tingkat desa/kelurahan ini telah menggerakkan partisipasi warga masyarakat dalam arti yang lebih luas melalui jalur organisasi sosial kemasyarakatan, organisasi pemuda dan organisasi wanita.

Kelembagaan partisipasi masyarakat sebagai penunjang LKMD di Kelurahan Ampenan Utara cukup berkembang. Hal ini dapat dilihat dari keberadaan organisasi sosial kemasyarakatan yang ada dengan berbagai aktivitasnya. Tetapi, kesenjangan pemahaman tentang partisipasi dengan LKMD menjarung aspirasi masyarakat melalui lembaga-lembaga tersebut, menyebabkan peranan partisipatifnya menjadi menyempit dan cenderung partisipatifnya menjadi menyempit dan cenderung bersifat reaktif.

Dari proses pembentukannya lembaga partisipasi masyarakat di kelurahan Ampenan Utara dapat diidentifikasi sebagai berikut :

- a. Lembaga/organisasi yang dibentuk secara formal dengan mobilisasi pemerintah, seperti : Tim Penggerak Pendidikan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Karang Taruna, Remaja Masjid dan sejenisnya.
- b. Lembaga/organisasi yang didirikan atas inisiatif sekelompok warga masyarakat berdasarkan kepentingan tertentu dan mengelola aktivitas kelompoknya sendiri seperti : kelompok pengajian, kelompok arisan,

kelompok-kelompok kesenian dan olah raga.

- c. Lembaga/organisasi yang didirikan atas inisiatif sekelompok warga yang mengkomodasikan kepentingan masyarakat pada bidang tertentu, seperti : Yayasan pendidikan, Kelompok pengasuh anak. Masing-masing jenis kelompok tersebut telah menunjukkan bentuk partisipasinya dengan pola yang disepakati, dengan pola yang disepakati, dengan orientasi yang berbeda. Kesemuanya merupakan potensi yang memiliki arti penting dalam rangka peningkatan partisipasi masyarakat secara lebih luas dengan pendekatan yang lebih efektif menurut "*bahasa*" masing-masing lembaga atau organisasi.

3. Aktualisasi partisipasi masyarakat yang sangat terbatas. Seperti yang telah dikemukakan terdahulu, pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang partisipasi sangat sederhana; identik dengan gotong royong. Namun demikian, kesadaran warga akan kepentingan bersama menyebabkan mereka memilih kelompok-kelompok/lembaga/organisasi kemasyarakatan yang dapat menyalurkan aspirasi mereka. Secara tidak disadari, dengan sikap seperti itu pada dasarnya warga masyarakat telah menunjukkan partisipasinya dalam pembangunan pada umumnya dan kegiatan sosial kemasyarakatan khususnya. Kondisi ini menunjukkan bahwa potensi partisipasi masyarakat cukup baik. Permasalahannya adalah bagaimana mengelola potensi tersebut sehingga dapat diakualisasikan menjadi sumber daya yang efektif.

Disamping kesadaran akan kepentingan bersama, hal lain yang menyebabkan kecenderungan warga masyarakat untuk bergabung dalam kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan adalah kekhawatiran untuk menjadi orang yang tersisih dalam masyarakat. Pola semacam ini masih dijumpai pada masyarakat yang memiliki ciri masyarakat paguyuban, terutama

masyarakat dengan status sosial ekonomi rendah dan masyarakat pinggiran. Hanya saja, keterdesakan oleh beban ekonomi yang kian hari kian berat dirasakan, kesadaran akan keterikatan akan norma-norma paguyuban telah mulai bergeser : pertemuan/komunikasi menjadi semakin kurang intensif, lebih-lebih jika mereka dihadapkan dengan rencana kerja yang kurang menguntungkan bagi ekonomi keluarga.

Ciri partisipasi lain yang dapat ditemukan di Kelurahan Ampenan Utara adalah bentuk partisipasi kelompok pedagang yang umumnya adalah WNI keturunan asing (Arab dan Cina). Dikalangan mereka, partisipasi lebih cenderung dalam bentuk material. Karena jumlah mereka relatif kecil sering kali tampak sebagai kelompok eksklusif, yang kadang menimbulkan kecemburuan sosial yang dapat menurunkan motivasi golongan lain dalam mengoptimalkan partisipasinya.

Dari uraian tentang pola dan ciri partisipasi masyarakat Ampenan Utara di atas, dapat diidentifikasi bentuk, intensitas dan kedisiplinan masyarakat dalam mengaktualkan partisipasi mereka terhadap kegiatan sosial kemasyarakatan sebagai berikut :

- a. Aktualisasi partisipasi masyarakat pada dasarnya lebih luas dari wawasan dan pemahaman yang mereka miliki.
- b. Partisipasi yang ditunjukkan oleh masyarakat tradisional (dengan status sosial ekonomi rendah dan yang tinggal di pinggiran) di Kelurahan Ampenan Utara bersifat lebih murni. Mereka menyadari arti penting kegiatan sosial kemasyarakatan, tetapi tidak menyadarinya sebagai bentuk partisipasi.
- c. Aktualisasi partisipasi masyarakat tradisional terkesan kurang intensif atau kurang optimal disebabkan karena keterbatasan kemampuan/daya dukung dari segi waktu dan material.

Kelompok ini hanya mengandalkan tenaga. Itulah sebabnya mengapa mereka mengidentikkan partisipasi dengan gotong royong. Tetapi, jika pelaksanaan gotong royong terlalu sering, mereka akan merasa dirugikan, karena waktu bagi mereka adalah peluang untuk mencari kebutuhan keluarga.

- d. Dari kalangan WNI keturunan asing dan sebagian WNI asli yang memiliki status sosial ekonomi diatas rata-rata menganggap gotong royong secara fisik bukan porsi mereka. Sehingga dalam hal partisipasi ini, mereka memilih mempergunakan materi dan fasilitas yang mereka miliki.
- e. Motivasi ke-arah partisipasi yang terorganisir melalui lembaga/organisasi yang berkembang di dalam masyarakat dengan pola swakarsa dan swadaya masih kurang mendapat perhatian. itulah sebabnya mengapa partisipasi mereka lebih bersifat reaktif terhadap program pemerintah, atau bahkan terhadap kasus khusus yang mendesak sekalipun.

Dari identifikasi pola partisipasi tersebut dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya masyarakat Kelurahan Ampenan Utara memiliki disiplin partisipatif dalam kegiatan sosial kemasyarakatan sesuai dengan daya dukung yang mereka miliki. Jika ada gejala yang menunjukkan pada ketidak disiplin pada dasarnya disebabkan oleh keterbatasan individual pada waktu tertentu dan oleh sebab tertentu. Permasalahannya adalah bagaimana mengelola potensi yang dimiliki masyarakat Ampenan Utara.

4. Pola pendekatan dan masalah motivasi yang kurang mendapat perhatian. Usaha ke arah pembinaan partisipasi masyarakat Ampenan Utara selama ini telah banyak dilakukan oleh aparat kelurahan maupun instansi/lembaga terkait. Namun demikian, usaha tersebut tampaknya belum dapat menggali secara optimal partisipasi swakarsa dan swadaya.

Usaha dan upaya yang telah dilakukan seperti, penyuluhan-penyuluhan, lomba-lomba, penerapan sanksi bagi yang dianggap tidak partisipatif, dan lain-lain, cenderung bersifat dan berpola insidental reaktif. Ada beberapa catatan yang dapat direkam sehubungan dengan pendekatan dan motivasi dalam pembinaan partisipasi masyarakat Ampenan Utara ini, antara lain :

- a. Penyuluhan-penyuluhan umumnya dilakukan oleh para petugas-petugas dari instansi terkait sesuai dengan target proyek instansi bersangkutan. Pendekatan yang dilakukan sangat bersifat konservatif dengan pola penyampaian informasi kegiatan secara global dari misi atau proyek yang disosialisasikan. Dengan kualitas daya kritis masyarakat yang semakin maju, pendekatan ini seringkali tidak mendatangkan hasil yang diharapkan.
- b. Penyuluhan yang dilakukan seringkali tidak memperhatikan kondisi masyarakat sasaran ; komunikasi dilakukan dengan bahasa peraturan/instansional yang kurang dipahami oleh warga masyarakat. Dengan kata lain, penyuluhan dilaksanakan dengan bahasa yang tidak dimengerti oleh masyarakat sasaran.
- c. Penyuluhan yang dilaksanakan selama ini tidak diikuti oleh pembinaan dan pemantauan secara berkesinambungan.
- d. Penerapan sistem sanksi tampaknya belum efektif karena kurangnya ketegasan dan tidak diimbangi dengan sistem ganjaran bagi warga masyarakat yang secara aktif dan disiplin mengikuti kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan, atau yang berinisiatif secara swadaya melaksanakan suatu kegiatan untuk kemasyarakatan.

Secara singkat dapat dikatakan bahwa pendekatan dan pemberian motivasi yang dilaksanakan dalam rangka pembinaan partisipasi masyarakat di Kelurahan Ampenan Utara ini cenderung bersifat instruktif dan tanpa memperhatikan kondisi obyektif. Pendekatan yang diharapkan oleh masyarakat adalah pendekatan yang lebih humanis dan kultural sehingga dapat menimbulkan motivasi dari dalam.

Sebaliknya dalam kegiatan sosial berlaku norma-norma yang telah disepakati bersama dan telah berlaku beberapa generasi sebelumnya. Terutama terhadap musibah, tanpa diberitahu dan tanpa diundang setiap orang dewasa dalam kampung dan yang dari luar lingkungan terdekat asal mengetahui akan datang melayat. Demikian pula kalau ada tetangga yang mengawinkan anak semua tetangga akan membantu dengan tenaga dan materi sesuai kemampuan masing-masing.

Seperti dalam menghadapi musibah dan perkawinan, dalam kegiatan ketertiban, keamanan dan kebersihan setiap warga masyarakat yang sudah dewasa selalu tidak ada yang absen. Warga masyarakat yang tidak ikut berpartisipasi tanpa alasan selain mendapat peringatan keras dari Kepala Lingkungan, juga secara tidak langsung akan mendapat hukuman moral dari masyarakat. Di Lingkungan Pondok Perasi warga masyarakat yang berhalangan ikut gotong royong kebersihan atau berhalangan ronda diharuskan membayar Rp. 500,00 untuk dana keamanan atau kebersihan lingkungan.

Berbeda dengan keamanan dan kebersihan, warga masyarakat yang tidak hadir dalam suatu musibah atau peristiwa perkawinan, dia akan menjadi pembicaraan orang kampung. Kelak kalau dia menghadapi peristiwa yang sama tidak akan didatangi oleh orang yang pernah tidak didatangnya itu.

Tetapi semuanya itu akan berjalan seperti biasa lagi setelah dia datang meminta ma'af atas kekhilafan yang telah diperbuatnya.

Hubungan yang demikian tidak terhalang dan tidak dibatasi oleh pelapisan sosial dan golongan etnik. Antara berbagai kelompok etnik di Ampenan Utara terdapat hubungan yang serba harmonis dan selalu kompak dalam semua kegiatan sosial kemasyarakatan.

### **C. DISIPLIN TERHADAP ADMINISTRASI PEMERINTAHAN**

Salah satu aspek penting yang menunjang ketertiban masyarakat adalah tertibnya administrasi pemerintahan, khususnya administrasi kependudukan. Hal ini disebabkan karena tanpa adanya administrasi yang tertib, pemerintah - dalam hal ini pemerintahan desa/kelurahan - akan sulit mengelola dan mengembangkan masyarakatnya. Pentingnya disiplin administrasi pemerintahan bagi masyarakat disebabkan oleh karena semakin kompleksnya masalah kependudukan yang harus diantisipasi, seperti : derasnya arus dinamika kependudukan di Kelurahan Ampenan Utara, khususnya penduduk yang masuk; penduduk merupakan salah satu sumber daya pembangunan yang harus dikelola dengan baik berkembangnya berbagai bentuk kejahatan yang harus dipantau melalui arus keluar masuknya penduduk, dan lain-lain sebagainya.

Kedisiplinan masyarakat dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban administratifnya, akan mempermudah aparat-aparat pemerintahan desa/kelurahan dalam memberikan pelayanan kepada warganya. Namun demikian, tampaknya untuk membina kesadaran tertib administrasi di kalangan masyarakat awam, memerlukan waktu yang panjang dengan lebih banyak inisiatif dari pihak aparat.

Kenyataan ini dialami pula oleh aparat Kelurahan Ampenan Utara. Perjalanan panjang Kelurahan Ampenan Utara mencatat bahwa peningkatan kesadaran administratif ini berjalan sangat lambat. Penunjang yang sangat dirasakan memberikan andil dalam peningkatan sadar administratif adalah meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat serta berkembangnya berbagai macam media komunikasi, di samping aparat kelurahan sendiri yang telah mampu menciptakan iklim ke arah yang diharapkan.

Berkembangnya Ampenan Utara menjadi kota yang semakin ramai telah membawa kesadaran masyarakat ke arah arti penting administrasi pemerintahan, khususnya administrasi kependudukan. Gejala ini tampaknya juga dipengaruhi oleh keberadaan lembaga-lembaga formal yang lebih aktif dan berperan dalam mengakomodasikan kebutuhan-kebutuhan warga masyarakat, disamping kebutuhan administratif yang dituntut sehubungan dengan karier atau untuk kepentingan tertentu.

Perkembangan pengetahuan tentang pentingnya sistem administrasi lebih banyak ditentukan oleh pengalaman dalam berbagai kasus. Umpamanya, mereka akan berusaha memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) ketika yang bersangkutan dituntut untuk memenuhi persyaratan bagi suatu keperluan. Demikian pula halnya dengan perangkat-perangkat administratif lainnya seperti, Kartu Keluarga, Surat Pindah, Surat Keterangan berdomisili Sementara, dan lain-lain sebagainya.

Proses seperti itu menyebabkan tingkat pengetahuan warga masyarakat tentang administrasi pemerintahan ini menjadi sangat bervariasi; tergantung pada banyak sedikitnya kebutuhan masing-masing individu terhadap hal-hal yang bersifat administrasi ini, yaitu :

- a. Masyarakat menyadari pentingnya mengikatkan diri secara administratif sebagai warga suatu lingkungan/kelurahan.

Mereka umumnya dari kalangan pegawai/pekerja dengan tingkat pendidikan yang relatif tinggi/cukup.

- b. Mereka/warga masyarakat yang sebenarnya tahu tentang kewajiban-kewajiban administratifnya, tetapi karena sesuatu hal yang menyebabkannya enggan untuk memenuhinya. Pola seperti ini dapat kita jumpai pada warga masyarakat yang tidak mempunyai pekerjaan tetap.
- c. Warga kelurahan Ampenan Utara yang tinggal di pinggiriran atau masyarakat tradisional, baik petani maupun nelayan, memiliki pengetahuan tentang administrasi ini sebatas menyangkut jaminan diri dan harta miliknya. Umpamanya, mereka menganggap penting diketahui keberadaannya di suatu lingkungan sehingga perlu melapor dan merasa penting untuk mengurus administrasi yang menyangkut kepemilikan seperti, bukti pemilikan tanah, surat-surat ternak, tanda pemilikan sampan, dan lain-lainnya.

Menyadari semuanya itu yang ditunjang oleh usaha pembinaan pemerintah yang tiada henti-hentinya, warga masyarakat selalu melaporkan hal-hal yang berkaitan dengan kelahiran, kematian dan mobilitas penduduk. Seseorang Kepala Keluarga yang mendapat anak baru atau kematian salah seorang keluarganya segera melaporkan peristiwa itu secara langsung atau tidak langsung kepada Ketua RT. Selanjutnya Ketua RT melanjutkan kepada Ketua RW. Yang terakhir ini meneruskan laporan tersebut kepada Ketua Lingkungan. Terakhir Kepala Lingkungan menyampaikannya kepada Lurah dalam bentuk laporan bulanan. Demikian pula bagi pendatang dari luar RT yang menginap harus melapor kepada Ketua RT, selanjutnya diteruskan ke atas sesuai mekanisme laporan kelahiran dan kematian.

Bagi mereka yang tidak mematuhi ketentuan tersebut selambat-lambatnya tiga hari setelah peristiwa kelahiran, kematian atau

kedatangan akan mendapat teguran dari Ketua RT. Kepada pendatang baru yang tidak segera melapor setelah mendapat segera dilaporkan kepada RT kepada Ketua RW, yang melanjutkan melaporkannya kepada Kepala Lingkungan. Mendapat laporan yang demikian Kepala Lingkungan secara memanggil atau mendatangi pendatang baru tersebut. Bila yang bersangkutan tidak dapat mempertanggungjawabkan kelalaiannya itu akan segera diperintahkan keluar dari lingkungan.

Bagi warga baru dan tamu baru yang melapor sesuai ketentuan selalu diterima dan mendapat pelayanan yang baik. Dengan warga lama juga mereka segera berbaur dan menyesuaikan diri sesuai norma-norma yang berlaku. Terutama mereka akan selalu ikut dalam semua kegiatan dikampung dan lingkungan tempat mereka berdomisili.

Administrasi bagi kebanyakan warga masyarakat Ampenan Utara adalah surat-surat yang berisi catatan-catatan kenaan dengan keberadaan diri dan harta milik yang berharga. Lebih jauh, administrasi bagi mereka adalah jaminan dan tanda bukti yang diharapkan dapat memberikan perlindungan atau memudahkan mereka dalam melaksanakan kegiatan untuk meningkat tarap hidup. Latar belakang pemahaman seperti ini, walaupun sangat sederhana, tetapi telah sangat membantu memperluas ruang lingkup kepedulian mereka terhadap administrasi pemerintahan, khususnya administrasi kependudukan.

Tindakan administratif yang dilakukan oleh masyarakat Kelurahan Ampenan Utara, antara lain : transaksi-transaksi perdata, pengurusan berbagai Surat Keterangan, Surat Jalan, Laporan kehilangan, dan lain-lainnya. Untuk memudahkan pihak aparat desa/kelurahan menangani kebutuhan pelayanan administrasi seperti itu, pihak kelurahan beserta jajarannya membutuhkan data tentang individu yang bersangkutan.

Sejauh ini, pihak Kelurahan Ampenan Utara tidak pernah mempersulit warga yang membutuhkan pelayanan administrasi, selama pihak yang berkepentingan telah melaksanakan kewajibannya sebagai warga. Upaya ke arah pelaksanaan disiplin administrasi kependudukan yang dilaksanakan selama ini dimaksudkan untuk menjamin ketertiban, ketentraman dan keamanan masyarakat.

Sadar bahwa kepentingan aparat kelurahan dengan kepentingan warga masyarakat demi ketertiban pemerintahan dan ketertiban masyarakat, menyebabkan warga masyarakat berusaha menunjukkan kedisiplinan dalam hal administrasi kependudukan. Di samping itu, aparat kelurahan dengan segenap jajarannya menunjukkan sikap dan perilaku yang sama sehubungan dengan upaya menegakkan tertib administrasi kependudukan ini. Kesadaran masyarakat dan ketegasan aparat pemerintahan Kelurahan Ampenan Utara telah secara bersama-sama menciptakan iklim tertib administrasi. Namun demikian, di beberapa lingkungan masih ditemukan sikap dan perilaku tradisional; keluar masuk wilayah administrasi kelurahan tanpa menyelesaikan kewajiban-kewajiban. Kedatangan mereka semula hanya menginap sementara pada keluarga disertai harapan mendapat pekerjaan, akhirnya menetap. Rasa persaudaraan dan solidaritas keluarga yang ditumpangi telah memberikan peluang kepada warga baru yang belum resmi ini menjadi penduduk gelap. Kasus seperti ini banyak kita jumpai pada kelompok masyarakat yang tergolong pekerja sektor informal.

Komposisi penduduk masyarakat perkotaan umumnya lebih tidak stabil jika dibandingkan dengan kondisi di pedesaan. Hal ini disebabkan oleh dinamika penduduk, terutama yang menyangkut keluar masuknya penduduk yang cukup tinggi intensitasnya. Jika dinamika tidak dipantau secara sungguh-sungguh akan

menimbulkan kesulitan bagi masyarakat Kelurahan Ampenan Utara yang dimasuki atau Kelurahan lain yang menerima pindahan gelap dari Kelurahan Ampenan Utara. Sehubungan dengan hal tersebut, pihak aparat kelurahan telah berupaya untuk setiap saat melakukan pemantauan ketinggian lingkungan sampai dengan tingkat RT, di samping pemantauan melalui laporan oleh masyarakat sendiri.

Penduduk yang masuk atau keluar wilayah Ampenan Utara diwajibkan melaporkan diri pada Ketua RT yang akan meneruskannya kepada Kepala Lingkungan dan selanjutnya ke Kelurahan untuk mendapatkan tanda bukti diri. Peraturan semacam ini secara formal telah diketahui oleh masyarakat, tetapi seringkali diabaikan. Ada beberapa alasan yang menyebabkan pengabaian ini, antara lain :

1. Warga baru tersebut tidak memiliki Surat Pindah dari tempat tinggal sebelumnya sehingga merasa enggan untuk melaporkan diri kepada aparat Kelurahan Ampenan Utara.
2. Warga baru tersebut belum memiliki tempat tinggal yang pasti, bahkan tujuan kedatangannya pun belum jelas.
3. Warga baru tersebut belum memiliki kepastian; apakah akan menetap di Kelurahan Ampenan Utara atau tidak.
4. Sebab-sebab lain yang sifatnya pribadi.

Untuk warga baru yang dicurigai oleh masyarakat dan tidak melaporkan kedatangannya pada aparat kelurahan, biasanya mendapat perhatian khusus dari masyarakat; biasanya masyarakat lalu melaporkannya kepada yang berwajib. Perlakuan warga masyarakat semacam ini, merupakan salah satu bentuk kesadaran administratif, yang pada gilirannya berdampak positif bagi ketertiban, keamanan dan ketentraman bersama.

Dalam hal bertamu, biasanya tenggang-rasa Ketua RT menyebabkan seseorang dapat tinggal dalam jangka waktu yang

relatif lama sejauh yang bersangkutan tidak mengganggu ketertiban dan keamanan wilayah. Dalam hal ini pihak Ketua RT beranggapan bahwa tuan rumah yang kedatangan tamu tersebut sebagai jaminan. Jika tuan rumahnya dikenal sebagai *orang baik* sudah tentu tamunya pun *orang baik*. Sementara itu, jika kedatangan seseorang di suatu lingkungan terasa mengganggu atau dirasakan mengganggu oleh masyarakat, pihak aparat kelurahan melakukan beberapa tindakan, seperti : teguran lisan, teguran tertulis atau sanksi-sanksi administratif lainnya. Tindakan aparat seperti itu, oleh masyarakat dirasakan sebagai perlindungan dan pengayoman yang sama, baik terhadap warga lama maupun warga baru bahkan para tamu. Sikap dan perilaku ini merangsang lahirnya kemajuan dalam pelaksanaan administrasi kependudukan, khususnya yang menyangkut keluar masuknya warga. Namun demikian, seperti yang telah dikemukakan terdahulu bahwa ada permasalahan-permasalahan yang menyebabkan sebagian kecil arus keluar masuk penduduk secara gelap.

Kebiasaan melapor untuk peristiwa kelahiran dan kematian tampaknya merupakan hal baru bagi warga masyarakat Ampenan Utara yang masih tradisional. Kelompok masyarakat dengan pola tradisional ini masih agak sulit untuk diajak melaksanakan tertib administrasi dalam hal kelahiran dan kematian. Ada sementara anggapan mereka bahwa kelahiran dan kematian bukan porsi pemerintah, tetapi porsi agama dan adat. Sehingga, pemuka agama (penghulu) dan pemuka adatlah yang mendapatkan pemberitahuan terlebih dahulu sementara aparat pemerintah hanya mendapatkan laporan tidak langsung melalui loudspeaker masjid (untuk kematian), undangan pemakanan, undangan selamatan, dan lain-lain.

Kondisi semacam itu masih tetap kita jumpai di lingkungan kelompok masyarakat petani dan nelayan.

Kelompok masyarakat lainnya adalah pegawai negeri/swasta dan kelompok sektor informal yang memiliki ketergantungan pada aparat kelurahan selaku pelindung dan pengayomnya, merupakan kelompok-kelompok masyarakat Ampenan Utara yang relatif lebih mengerti. Kelompok masyarakat ini biasanya lebih rajin menyampaikan laporan perihal kelahiran dan kematian ini dengan harapan akan mendapat bantuan untuk penyelesaian upacara, terutama dalam kaitannya dengan kematian. Khusus untuk kelahiran, laporan kepada aparat pemerintahan desa/kelurahan dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan pembuatan akta kelahiran dan lain-lainnya.

Kondisi-kondisi seperti yang telah diuraikan di atas menunjukkan bahwa masyarakat Ampenan Utara secara keseluruhan belum menyadari arti penting administrasi kependudukan, baik dalam kaitannya dengan kepentingan administrasi pemerintahan kelurahan maupun dengan kepentingan masyarakat sendiri.

#### **D. DISIPLIN DALAM HUBUNGAN KETETANGGAAN**

Ciri umum masyarakat kota tampak pada sebagian wilayah/ lingkungan yang ada di kelurahan Ampenan Utara; gejala individualitas, hubungan sosial yang cenderung renggang, kelompok-kelompok yang berkembang lebih berciri formal, dan lain-lain. Namun pada sebagian besar lingkungan di kelurahan ini, masih dapat ditemukan bentuk hubungan sosial yang bersifat informal tradisional. Ciri-ciri kedua bentuk hubungan sosial tersebut dapat dilihat dari pola pemukiman dan penataan lingkungan sebagai berikut :

1. Lingkungan yang dihuni oleh sebagian besar WNI keturunan Asing lebih teratur dengan pagar/tembok pekarangan yang

umumnya lebih tinggi dari ukuran normal. Pola seperti ini dijumpai di Lingkungan Telagamas dan sebagian Lingkungan Pelembak.

2. Lingkungan yang relatif homogen, yang dihuni oleh penduduk yang beragama Hindu Bali di Lingkungan Karang Ujung, menunjukkan pola dan ciri lingkungan perkampungan Bali pada umumnya.
3. Lingkungan yang dihuni oleh berbagai kelompok etnik seperti, Otak Desa, Pelembak dan Dayan Peken menunjukkan ciri lingkungan yang padat, tetapi teratur.
4. Lingkungan yang dihuni oleh sebagian besar penduduk asli seperti, Lingkungan Kampung Bugis dan Lingkungan Pondok Perasi, bercirikan pemukiman yang padat tanpa batas halaman/pekarangan.
5. Ciri lingkungan pemukiman pedesaan Sasak seperti yang terlihat di lingkungan Jempong.

Pola-pola pemukiman itu sekaligus menunjukkan pola hubungan sosial penduduknya. Heterogenitas masyarakat secara umum telah dapat diatasi sendiri oleh masyarakat dengan pemilihan pola pemukiman yang sesuai dengan karakter masing-masing. Dengan memperhatikan pola pemukiman masyarakat dapat juga diperkirakan pola hubungan ketetanggaan di lingkungan yang bersangkutan.

Umumnya masyarakat pantai adalah masyarakat yang keras; Ampenan Utara pernah menjadi satu-satunya pelabuhan laut yang terbuka dalam waktu yang cukup lama. Kenyataan ini sangat berpengaruh terhadap karakter maupun mentalitas penduduknya. Namun demikian, asumsi ini tidak berarti generalisasi, sehingga kesimpulan yang harus ditarik adalah Ampenan Utara sebagai masyarakat yang keras karakternya dan tercermin dalam kehidupan ketetanggaannya.

Untuk ini masih diperlukan pemahaman terhadap fenomena yang terjadi di dalam masyarakat saat ini. Pemahaman tersebut antara lain menyangkut pengertian sosialnya, hubungan sosial kemasyarakatannya, keberadaan sistem nilai yang menjadi perekat sosialnya, dan lain-lain sebagainya.

Dalam rangka memahami disiplin dalam hubungan ketetangaan di Kelurahan Ampenan Utara, perlu diperhatikan potret sosial masyarakatnya sebagai berikut :

1. Pola kehidupan kota yang sudah mulai merasuk menyebabkan warga yang satu dengan yang lain kurang dalam hal saling memperhatikan. Ada prinsip : sejauh tidak mengganggu orang lain, melangkahlah terus. Pola sikap ini merupakan sikap kebanyakan warga masyarakat.
2. Kemampuan masyarakat untuk memelihara tenggangrasa tampak sejak lama, sehingga seluruh lingkungan yang dihuni oleh campuran etnik (heterogin) tetap dapat menjaga ketertiban dan ketentraman bertetangga. Adanya kerja sama yang saling menguntungkan antara warga masyarakat yang memiliki kehidupan ekonomi yang relatif baik dengan warga masyarakat kelompok kurang mampu. Kondisi ini ternyata telah dapat mengurang kemungkinan munculnya kecemburuan sosial. Demikian pula halnya dengan warga masyarakat keturunan asing. Berdasarkan kenyataan ini berarti masyarakat, baik dari segi sistem sosial maupun struktur sosial, telah mampu memanfaatkan potensi yang ada dalam rangka mengembangkan diri.
3. Dalam kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakat tidak dikenal adanya pembedaan warga atas dasar apapun, walaupun mungkin dari kelompok yang beragama Islam sebagai mayoritas memiliki kegiatan-kegiatan sosial yang sifatnya khusus. Namun demikian, dengan tingkat kesadaran untuk

saling menghormati antar umat beragama, hal ini tidak pernah melahirkan konflik sosial.

Dari fenomena-fenomena sosial yang telah dikemukakan diatas, dapat disimpulkan bahwa pemahaman dan kesadaran masyarakat Kelurahan Ampenan Utara tentang heterogenitas (kemajemukan) masyarakat telah mampu meredam berbagai potensi konflik yang berbagai pandangan stereotipe yang mungkin masih ada pada berbagai etnik.

Dalam kondisi kekinian masyarakat Ampenan Utara tidak dikenal adanya kelompok-kelompok yang eksklusif. Jika ada, pada dasarnya merupakan kelompok-kelompok yang merupakan wadah-wadah dalam rangka mewujudkan partisipasi masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang aman dan tertib. Kelompok-kelompok itu antara lain : kelompok pengajian, kelompok arisan etnik yang hanya berbentuk paguyuban, kelompok propesi dan lain-lain sejenisnya.

Untuk mengantisipasi kemungkinan berkembangnya pengaruh-pengaruh negatif dan kelompok-kelompok tersebut, baik aparat kelurahan maupun swadaya masyarakat telah mengupayakan adanya perekat-perekat sosial seperti : Forum Musyawarah Keserasian Sosial, Penataran P4 untuk para Pemuka Masyarakat, pembentukan kelompok pembauran serta kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan yang diperuntukkan bagi warga, mulai dari tingkat RT, Lingkungan sampai dengan tingkat Kelurahan.

Dengan tingkat kesadaran sosial seperti yang dimiliki oleh masyarakat Kelurahan Ampenan Utara ini, bukan berarti tidak mungkin terjadinya konflik, tetapi pada umumnya konflik yang bersumber dari kasus-kasus kecil seperti perkelahian anak-anak, masalah antara ibu rumah tangga dan kesalah pahaman di antara kaum muda, selalu dapat segera diatasi dengan musyawarah,

sehingga potensi konflik tersebut jarang bahkan tidak pernah berkembang menjadi pengganggu kerukunan dan keharmonisan bertetangga.

Kemampuan saling menghormati, menghargai dan mengendalikan diri dari warga masyarakat yang berlatar belakang sosial budaya dan agama yang berbeda telah melahirkan kondisi sosial yang jauh dari konflik yang berbau SARA. Masing-masing warga berusaha untuk tidak saling menyinggung dan mengaktualkan pandangan-pandangan stereotipe kelompok secara konfrontatif.

Dengan demikian, secara umum dapat disimpulkan bahwa masyarakat Kelurahan ketetangaan yang cukup potensial untuk pengembangan selanjutnya.

## CATATAN

- 1) Otto Sumarwoto, 1989 Ekologi Lingkungan Hidup dan Pembangunan, Jakarta, Jambatan.
- 2) Pemda Tingkat I NTB, Perda No. 1 Tahun 1984 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Barat.

## **BAB IV**

### **DISIPLIN MASYARAKAT DI LINGKUNGAN TEMPAT-TEMPAT UMUM DI KELURAHAN AMPENAN UTARA**

#### **A. DISIPLIN DI LINGKUNGAN PASAR/PERKOTAAN**

Pengertian pasar di bawah ini adalah pasar tradisional sebagai organisasi tempat para penjual dan pembeli dapat saling berhubungan dengan mudah. Yang dimaksud dengan pasar adalah suatu tempat untuk berdagang atau berjualan, di mana produsen dan konsumen bertemu. Harga terbentuk langsung karena kesepakatan antara penjual dan pembelinya. Jadi harga barang yang diperdagangkan ditetapkan dengan persetujuan. Yang menjadi obyek pertukaran dalam pasar bukan saja barang tetapi juga jasa. 1)

Pada lokasi penelitian di Kelurahan Ampenan Utara terdapat sebuah pasar tradisional yaitu pasar Kebonroek. Sebenarnya pasar Kebonroek ini sifatnya sementara (darurat), karena pasar yang lama yang letaknya di Kampung Melayu Kelurahan Ampenan Tengah sedang di renovasi oleh Pemerintah Daerah Tingkat II Lombok Barat. Karena sifatnya sementara,

los-los yang dibangun untuk menampung para pedagang tidak terlalu luas. Akibatnya disana sini dibuat bangunan darurat oleh para pedagang sendiri berupa bangunan yang atapnya dari seng atau gedek, dengan tiang-tiang dari bambu atau kayu, karena mereka tidak bisa menempati los-los yang sudah penuh sesak.

Di pinggir los dibangun pula toko-toko kecil setengah permanen. Yang berdagang di toko-toko tersebut pada umumnya bukan pribumi, melainkan pedagang keturunan Cina dan Arab. Jenis barang yang dijual beraneka ragam dari barang pecah belah, alat-alat rumah tangga, tekstil, bahan-bahan makanan seperti gula, kopi, beras, rokok dan sebagainya. Sedangkan yang menempati los-los ditengah pasar adalah para pedagang dengan jenis dagangan berupa daging, sayur-sayuran, buah-buahan, kue basah sampai ke pakaian jadi dan lain-lain.

Para pedagang di pasar ini tentu saja tidak berasal dari kota, namun mereka berdatangan dari desa lain. Dari kenyataan tersebut kita dapat melihat bahwa antara kota dan desa mempunyai hubungan yang erat. Dalam hubungan dengan kota, maka desa yang merupakan daerah dukung berfungsi sebagai suatu daerah pemberi bahan makanan pokok seperti padi, jagung, buah-buahan, sayur-sayuran, bahan makanan yang lain dari hewan dan lain-lainnya. 2) Mereka dari desa membawa dagangannya pagi-pagi dengan menumpang cidomo atau bemo, bahkan ada juga yang berjalan kaki dengan memikul atau menjunjung bakul. Sedangkan pembeli (konsumen) berasal dari warga masyarakat yang tinggal di sekitar Kecamatan Ampenan dan Kecamatan Mataram, yang terdiri dari berbagai kalangan mulai dari buruh, pembantu rumah tangga, mahasiswa/pelajar, pegawai negeri, isteri para pejabat, pegawai hotel dan sebagainya.

Pada hari-hari libur pasar ini bertambah ramai. Para isteri pejabat yang pada umumnya berduit lebih senang berbelanja di pasar tradisional karena harganya relatif murah bila dibandingkan dengan harga di supermarket. Selain itu juga di pasar tradisional konsumen bebas memilih barang yang disukainya dan harganya bisa ditawar. Pasar Kebonroek mulai dikunjungi pembeli dari pukul 06.00 pagi sampai dengan pukul 18.00 sore. Lewat dari pukul 18.00 pasar sudah mulai sepi. Sore hari para pedagang menjajakan dagangannya didepan pasar, sehingga pembeli tidak perlu masuk ke dalam pasar untuk berbelanja. Bagaimana para pedagang di pasar Kebonroek ini menjaga kebersihan lingkungan, hubungan antara para sesama pedagang dan pembeli (pelayanan), cara pedagang memanfaatkan ruang/tempat penjualan, hubungan antara sesama pedagang dengan petugas pasar, dan sangsi-sangsi yang diberikan kepada pelanggaran tata tertib di pasar.

#### 1. Disiplin Kebersihan Lingkungan

Lingkungan yang sehat merupakan kebutuhan bagi semua warga masyarakat yang tinggal di suatu lingkungan. Mengupayakan lingkungan yang bersih, tertib dan teratur merupakan tugas setiap anggota masyarakat. Itu akan terwujud bila seluruh warga berkemauan keras untuk mempersiapkan dan memelihara lingkungannya. Kenyataan yang ada menurut pengamatan penulis, lingkungan pasar Kebonroek termasuk lingkungan pasar yang jorok. Bila hujan turun, didalam pasar sangat becek dan berlumpur karena tergenang air. Lumpur bercampur sisa-sisa bekas sayuran, ikan dan lain-lain yang mengeluarkan bau busuk, sangat mengganggu pengunjung.

Kondisi demikian terjadi karena atap-atap terbuat dari gedek atau seng, sehingga pada waktu hujan menjadi bocor. Jenis sampah yang banyak dibuang di lingkungan pasar adalah daun pisang, plastik, sisa buah-buahan yang busuk, dan lain sebagainya. Para penghasil sampah yang terdiri dari pedagang dan pembeli serta warga yang kebetulan lewat di lingkungan pasar belum mempunyai kesadaran yang tinggi akan arti kebersihan terutama mereka yang berasal dari kampung pinggiran dan desa-desa.

Misalkan saja seorang buruh sehabis melaksanakan tugasnya mengangkut barang membeli sebungkus nasi untuk sarapan pagi. Selesai makan, dengan bebas tanpa risih membuang sisa-sisa nasi dan pembungkus daun diselokan. Tidak dibuang ditempat sampah yang telah disediakan. Contoh lain : seorang remaja yang lewat di depan pasar membuang begitu saja bungkus rokok di jalan. Kebiasaan-kebiasaan semacam ini agak sulit dihilangkan terutama pada mereka yang berpendidikan rendah. Untuk menanggulangi masalah sampah di lingkungan pasar Kebonroek pengelolaannya diserahkan kepada LKMD. Seperti di ketahui tugas LKMD adalah membantu Kepala Desa/Kelurahan di bidang perencanaan pembangunan, menggerakkan partisipasi masyarakat secara aktif dan positif untuk melaksanakan pembangunan secara terpadu, baik yang berasal dari berbagai kegiatan pemerintah maupun swadaya gotong royong masyarakat. Di dalam organisasi LKMD mempunyai beberapa seksi antara lain Seksi Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban.

Oleh karena itu sebagai wadah partisipasi masyarakat dalam melaksanakan pembangunan, LKMD Kelurahan Ampenan Utara menugaskan personil-personilnya untuk mengkoordinasi penanggulangan kebersihan lingkungan pasar.

Pembuangan sampah di pasar Kebonroek ini dilakukan sebagai berikut :

Petugas kebersihan yang sudah ditunjuk oleh Kepala Seksi Keamanan dan Ketertiban Kelurahan Ampenan Utara setiap sore sekitar pukul 15.00 membersihkan sampah-sampah yang ada di dalam pasar. Sampah-sampah yang berasal dari kios dan toko-toko, sudah disediakan tempat sampah tersendiri berupa kantong-kantong. Sampah-sampah pasar dikumpulkan dalam kantong-kantong oleh petugas tersebut dan pada sekitar jam 18.00 sore diangkut ke TPS.

Truck-truck pengangkut sampah dari Suku Dinas Kebersihan mengangkut sampah-sampah yang ada di TPS untuk selanjutnya dibawa ke TPA yang berlokasi di Kelurahan Ampenan Selatan.

Untuk biaya kebersihan dan keamanan (jaga malam) pedagang dipungut iuran setiap bulan. Jumlah pungutan tergantung dari jenis dan jumlah dagangan masing-masing. Melalui pungutan iuran tersebut berarti pemerintah telah memberikan kesempatan pada masyarakat untuk turut aktif berperan dalam menanggulangi kebersihan. Selain itu dengan mewajibkan warga membayar iuran, merupakan upaya pemerintah untuk memasyarakatkan dan membudayakan kebersihan bagi masyarakat khususnya masyarakat kota kelurahan Ampenan Utara.

Jumlah iuran bagi pedagang pasar Kebonroek sebagai berikut :

- Toko besar Rp. 3.500,00
- Toko sedang Rp. 3.000,00
- Toko kecil Rp. 2.500,00
- Pedagang bakulan Rp. 500,00
- Pedagang pakai meja Rp. 1.000,00

Sebagian dari iuran diserahkan kepada Pemerintah Daerah sebagai pajak retribusi sesuai jumlah tarif yang dikenakan, dan selebihnya digunakan untuk membayar upah pengangkut sampah, upah penjaga malam, dan upah petugas pemungut iuran. Bila terdapat sisa dari jumlah yang dibayarkan maka uang tersebut masuk ke kas LKMD Kelurahan Ampenan Utara. Upah petugas kebersihan dan jaga malam masing masing Rp 30.000,00 per bulan, dengan jumlah petugas sebanyak 12 orang.

Sarana-sarana pembuangan sampah di Kelurahan Ampenan Utara termasuk di lingkungan pasar menggunakan metode kantong dan kereta dorong. Dari 75 % responden di lingkungan pasar tersebut, mengatakan sarana yang disediakan oleh pemerintah memadai.

Dikelurahan-kelurahan lain di lingkungan Kotif Mataram dalam penanganan sampah menggunakan metode pola musnah sendiri terutama bagi masyarakat yang mempunyai lahan seperti di kelurahan-kelurahan/desa pinggiran.

## 2. Pemanfaatan dan Pengaturan Ruang Penjualan

Dipasar Kebonroek penataan ruangan tempat penjualan masih sangat sederhana dan tradisional. Untuk pedagang sayur-sayuran biasanya sayur diletakkan di dalam wadah atau bakul dan ada juga yang diletakkan diatas meja.

Pedagang yang meletakkan jualannya di dalam bakul atau sebuah keranjang, biasanya jenis sayuran yang dijual hanya satu jenis sayuran misalnya kangkung atau bayam saja. Sedangkan pedagang yang menggunakan meja menjual berbagai jenis sayuran seperti kol, wortel, kentang, buncis, kembang kol, bawang bombay dan lain sebagainya di atas meja. Pedagang daging (daging sapi, kambing) selalu menggunakan meja sebagai tempat barang dagangannya. Kemudian ruang tempat penjualan buah-buahan, khusus mengambil tempat di depan pintu masuk pasar. Tempat buah-buahan sama seperti sayur-sayuran yakni di bakul atau keranjang. Jenis-jenis buah yang dipasarkan tergantung musim. Bila musim rambutan atau mangga maka buah-buahan itu saja yang banyak diperjual belikan. Namun ada juga buah-buahan lain yang di datangkan dari luar daerah seperti salak dari Bali, apel dari Malang, anggur dan sebagainya.

Para pedagang sayur atau buah-buahan lokal yang berasal dari desa dalam mencari barang dagangannya kadangkala langsung menemui para petani di kampung-kampung. Disini kadangkala pedagang dapat membanting harga. Pergaulan antara pedagang dengan pembeli lambat laun akan menimbulkan garis relasi yang kian menebal sehingga menciptakan pelanggan. Seseorang yang telah menjadi langganan pedagang akan selalu membeli dan menjual barang dagangannya pada koleganya tersebut. Selain dengan cara seperti diuraikan di atas para pedagang sayur-sayuran dan buah-buahan serta pedagang lainnya seperti pedagang bumbu-bumbu dapur, memperoleh barang dagangan dengan membelinya ke pasar induk Sweta, (Bhs. Sasak : *nendak*).

Dengan demikian praktis harga-harga di pasar Kebonroek lebih tinggi dibandingkan dengan harga-harga di pasar induk Sweta. Jarak tempuh antara pasar Kebonroek dengan pasar induk Sweta sekitar 8 Km.

Mengenai penempatan barang dagangan di pasar Kebonroek berdasarkan pengamatan dapat penulis uraikan sebagai berikut : penempatan untuk ikan basah, udang, kepiting dan lain-lain lokasinya di los bagian belakang, dengan pertimbangan agar tidak mengganggu kenyamanan konsumen. Sedangkan penataan barang dagangan lainnya belum teratur. Satu kelompok jenis dagangan yang sama misalnya sayur mayur, sebagian dapat kita jumpai di depan pintu masuk pasar. Para dagangan sayur ini duduk berderet di bawah berhadap-hadapan dengan deretan kelompok penjual rempah dan bumbu dapur (bahasa Sasak : *merangken*) yang menggunakan meja dengan membentuk satu lorong kecil. Sementara di los bagian tengah terdapat pula kelompok sayur-mayur. Juga penjual daging berkelompok di sana sini. Pedagang buah-buahan sebagian terdapat di depan pintu masuk pasar berdekatan dengan pedagang sayur, sebagian lainnya berada di sayap sebelah kiri pasar. Karena belum teraturnya pembagian ruang penjualan dipasar Kebonroek ini maka bagi pengunjung yang baru, akan sulit menemukan dengan cepat bila mereka hendak membeli satu butir kelapa misalnya.

Padahal pasar ini cukup luas dibandingkan dengan pasar yang lain. Dipasar-pasar yang sudah teratur seperti pasar Cakranegara kita dengan mudah memperoleh barang yang kita inginkan karena tempatnya sudah tertentu.

Cara penataan tempat seperti sekarang ini mungkin karena pada awalnya pasar Kebonroek ini bersifat sementara sambil menunggu pasar Ampenan selesai di renovasi.

Namun kenyataannya setelah pasar tersebut selesai para pedagang yang merasa betah di pasar Kebonroek tidak mau pindah ke tempat yang lama. Sementara ketidakteraturan seperti diuraikan diatas tetap dipertahankan.

### 3. Hubungan Antara Pedagang dan Pembeli

Hubungan antara pedagang dan pembeli yang berkaitan dengan pelayanan tidak bisa lepas dari masalah komunikasi. Dalam berkomunikasi kita tentu mempertimbangkan pihak lain. Tenggangrasa sampai kadar tertentu selalu diperhatikan. Komunikasi dengan masyarakat pembeli perlu dilakukan baik secara langsung atau tidak langsung. Kita harus memaklumi bahwa masyarakat pembeli ini merupakan sumber potensial untuk di tarik menjadi langganan. Di samping itu pembeli (konsumen) sebagai individu dan makhluk sosial perlu mendapat perhatian, apakah perhatian yang berbentuk moral, spiritual maupun material. Seorang pedagang harus memaklumi bahwa ia hidup di dan dari masyarakat pembeli. Komunikasi dengan langganan perlu dibina terus menerus, sehingga mereka akan lekat atau selalu ingat terhadap penjual atau barang tertentu. Sesungguhnya, pelayanan yang diharapkan oleh calon pembeli atau langganan adalah penerimaan baik dari penjual untuk

memberikan kesempatan kepada mereka mendapatkan informasi yang cukup mengenai barang atau jasa yang dibutuhkan. Dalam hal ini tentunya pihak penjual harus berusaha memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya agar calon pembeli dapat secara bebas memilih, mempertimbangkan dalam suasana dan kesan yang menyenangkan. 3)

Teori ini rupanya secara tidak sadar diterapkan pula oleh para pedagang di pasar Kebonroek. Ketika calon pembeli menghampiri dagangannya dengan spontan mereka menawarkan dan mempromosikan barang dagangannya.

Dalam menawarkan barang dagangan bahasa yang digunakan ada 2 (dua) macam bahasa yakni bahasa Indonesia dan bahasa daerah Sasak. Di daerah Lombok pada umumnya orang-orang desa sudah bisa berbahasa Indonesia. Kalau calon pembeli diduga orang kota maka si penjual akan menggunakan bahasa Indonesia. Mereka dapat membedakan mana pengunjung yang berasal dari kota dan mana yang dari kampung-kampung, tetapi cara pelayanannya sama saja. Bedanya hanya dari segi pemakaian bahasa.

Beberapa contoh sapaan si penjual kepada calon pembeli dengan bahasa Indonesia dengan logat sasaknya yang kental. *Mari bu, ini kangkungnya muda-muda, berapa ikat saya siapkan untuk ibu* atau *Bu dagingnya segar-segar, berapa kilo saya timbangan.*

Kata-kata tersebut diucapkan dengan nada yang sopan dan muka manis.

Dengan sapaan dan pelayanan yang demikian para calon pembeli tentu akan merasa tergoda untuk menghampiri dagangan dan menawar. Tetapi ada juga beberapa calon pembeli acuh tak acuh saja sambil lalu, melihat-lihat yang lain.

Kemudian kalau calon pembeli diketahui dari kampung, si pedagang akan menyapa dan menawarkan dagangannya dengan berbahasa Sasak, walaupun si penjual (pedagang) berasal dari suku Bali, keturunan Cina atau keturunan Arab. Contoh dialog pedagang dengan pembeli dalam bahasa Sasak; *Ane semeton, kasolah-solah empak sampi ne, seberembe katimbangande, kebeng de muraan* artinya : Silahkan adik kakak, daging ini segar dan bagus, berapa kilogram saya timbangkan untuk anda, akan saya beri lebih murah. Bila calon pembeli berminat untuk membeli maka dia akan mengatakan : *Ao' kakak anu' angke sperempat doang, laguq rombokke sekediq* artinya ia sudahlah kak, berikan saya seperempat kilo saja akan tetapi tambahkan sedikit. Bahasa Sasak yang digunakan mereka pada dialog di atas adalah bahasa Sasak biasa, yang biasa digunakan oleh masyarakat umum. Namun ada juga pedagang yang berbahasa Sasak setengah halus terutama pedagang yang agak tua dengan calon pembeli yang sudah cukup dikenalnya. Misalnya dia akan menawarkan satu keranjang buah rambutan maka dia akan berkata : *Silaq ibu siq tiang entengan buluan kesolah-solahne, jarang sak marakniki* artinya Silahkan bu ini saya tinggalkan/sediakan buah rambutan yang bagus bagus khususnya untuk ibu, jarang ada yang seperti ini. Disini nampak si penjual menggunakan tehnik pendekatan melalui kata-kata *Siq tiang entengan*, untuk menciptakan kontak bathin.

Kepada calon pembeli dari keturunan Cina dan Arab, India dan sebagainya pedagang menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa Sasak biasa. Untuk pembeli yang berasal dari suku Bali (yang sudah lama tinggal di Lombok) para pedagang

asal Lombok akan berbahasa Sasak halus dalam menawarkan dagangannya karena bahasa Sasak halus mirip dengan bahasa Bali. Perlu di maklumi bahwa tidak semua orang Sasak bisa berbahasa halus. Hanya di tempat tempat tertentu saja masyarakat Lombok menggunakan bahasa halus dalam berkomunikasi. Lebih-lebih anak-anak remaja jarang bisa berbahasa halus. Mengerti artinya tapi tidak lancar menggunakan. Dengan demikian tata krama berbahasa di pasar Kebonroek berupa penghalusan dalam berbahasa daerah relatif kurang di terapkan. Hal ini mungkin karena di Nusa Tenggara Barat, khususnya di pulau Lombok murid murid di Sekolah Dasar tidak diajarkan berbahasa daerah. Tetapi hal ini bukan merupakan hambatan bagi masyarakat pasar di pasar Kebonroek khususnya, dan pasar-pasar lain di Lombok pada umumnya untuk berkomunikasi dengan pembeli. Tata krama bahasa yang sifatnya universal tergantung dari tata nilai yang berlaku dalam masyarakat bahasa yang bersangkutan. Kita ketahui pula bahwa tata nilai yang berlaku dalam masyarakat berbeda dengan tata nilai yang berlaku dalam masyarakat lain. Jika setiap masyarakat pasar Kebonroek mengadakan komunikasi lintas budaya, maka masing-masing telah menyadari kerelatifan nilai budaya, dan masing masing mempunyai toleransi yang tinggi hingga kesalah fahaman tidak pernah/jarang terjadi.

Setelah terjadi kontak dengan mengadakan komunikasi langsung, tawar menawar akan segera terjadi antara penjual dan pembeli. Di pasar tradisional penjual tidak memasang tarip mati seperti di toko-toko.

Ada standar harga yang sudah di sepakati bersama oleh para pedagang untuk masing-masing jenis barang dagangan.

Pedagang lainnya tidak akan menurunkan harga yang telah disepakati bersama, akan tetapi menaikkan harga kemungkinan bisa terjadi.

Misalnya seorang pedagang ikan bandeng menawarkan dengan harga Rp. 4.500,00 (empat ribu lima ratus rupiah) per kg. Pembeli bisa menawarkan sampai harga Rp. 4.000,00 (empat ribu rupiah). Kalau seharga itu dia melepas kepada pembeli berarti pada penjual yang lainpun pasti harganya sama. Demikian juga untuk barang-barang dengan yang lain seperti beras, sayur, telur, kacang-kacangan dan sebagainya.

Sebagaimana sifat pedagang pada umumnya, pedagang pedagang di pasar Kebonroek juga selalu mengatakan barang dagangannya paling baik. Untuk itu dituntut kejelian para pembeli sendiri untuk memilih. Namun secara umum mereka masih jujur dan bertanggungjawab terhadap cacat tersembunyi. Demikian pula barang belanjaan yang ketinggalan akan dikembalikan kepada pemiliknya.

Fasilitas berupa pembungkus barang belanjaan ada yang menggunakan kantong plastik dan ada pula yang menggunakan daun pisang.

Sedangkan fasilitas pelayanan seperti membawakan barang belanjaan ke kendaraan di sini tidak terdapat. Bila barang belanjaan kita cukup banyak kita dapat menggunakan jasa anak-anak wanita yang memang menyediakan diri untuk membawa barang belanjaan. Selama berbelanja anak tersebut menjunjung atau menjinjing belanjaan mengikuti kemana kita berjalan mencari barang yang kita inginkan. Bahkan tidak jarang mereka sebagai penunjuk jalan, menunjukkan dimana tempat dagangan yang barangnya lebih baik dan harganya sedikit miring. Anak wanita penjual jasa tersebut akan

akan mengantar barang sampai ke mobil atau angkutan lain yang digunakan. Upah mereka tergantung dari berat ringannya barang belanjaan (bahasa sasak : *bandaran*) yang mereka angkut yakni antara Rp. 100,00 sampai Rp. 250,00. Bagi ibu-ibu atau bapak-bapak yang tidak pelit sering memberi lebih. Perolehan yang mereka dapat dalam 1 (satu) hari bisa mencapai Rp. 2.500,00. Uang itu ditabung dan digunakan untuk membeli pakaian lebaran dan membantu ekonomi orang tua.

Pada umumnya penjual jasa ini adalah anak-anak wanita yang putus sekolah yang berasal dari keluarga yang ekonominya pas-pasan dan tinggal di pemukiman di sekitar pasar. Bisa juga anak wanita tersebut mengikuti ibunya yang berjualan di pasar atau ayahnya yang bekerja sebagai buruh pasar. Anak-anak wanita tersebut berumur antara 12 s.d. 15 tahun dan mereka tidak pernah rewel serta tidak memaksa untuk membawakan barang para pembeli. Mereka anak-anak yang masih lugu dan polos yang menyediakan jasa mereka untuk membawa barang belanjaan dengan sekedar mendapat imbalan upah yang relatif rendah.

#### 4. Hubungan Antara Pedagang dan Petugas Pasar

Yang dimaksud dengan petugas pasar di sini adalah petugas pemungutan retribusi pasar, petugas kebersihan dan petugas keamanan pasar.

Petugas pemungutan retribusi dikoordinasikan oleh seorang Kepala Pasar (Mandor Pasar) yang merupakan aparat Pemda setempat. Sedangkan petugas kebersihan dan keamanan di pasar Kebonroek adalah petugas yang dikoordinasi oleh LKMD Kelurahan Ampenan Utara dengan tugas menjaga

kebersihan, dan keamanan pasar.

Dalam melaksanakan kewajibannya sehari-hari para petugas tersebut tidak pernah mendapat kesulitan dari para pedagang. Para pedagang cukup patuh membayar retribusi maupun iuran yang dibebankan kepada mereka. Seperti diketahui para pedagang dipasar Kebonroek adalah orang-orang desa yang berdagang kekota. Pada umumnya orang desa selalu taat dan patuh pada pimpinan. Orang-orang desa mudah diajak berpartisipasi dan mudah digerakkan.

Bilamana diantara mereka yang tidak taat dan tidak patuh, hal itu bukan disebabkan karena mereka menentang kehendak pimpinan tetapi hal itu disebabkan karena ketidaktahuan dan tidak ada kejelasan mengenai terhadap suatu peraturan yang ada. Sedangkan petugas sendiri sikapnya tidak memaksa dan tidak galak, sehingga interaksi yang terjadi antara mereka (petugas dan pedagang) wajar tanpa pernah terjadi hambatan maupun konflik dan kesalah fahaman. Bila ada pedagang baru mereka akan cepat menyesuaikan diri dan cukup disiplin melaksanakan kewajibannya untuk membayar retribusi dan iuran. Sebagai kesimpulan, hubungan antara pedagang dengan petugas cukup baik.

#### 5. Sangsi-Sangsi Bagi Pelanggaran Tata Tertib.

Sangsi adalah hukuman bagi para siapa yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang telah ditetapkan. Bagi pedagang yang melanggar tata tertib seperti tidak menjaga kebersihan lingkungan, mereka akan ditegur oleh mandor pasar dan petugas kebersihan. Selain itu juga mereka akan ditegur oleh sesama pedagang. Khusus untuk kebersihan mereka diwajibkan membayar iuran. Iuran sampah ditetapkan bagi pedagang bakulan per bulan

masing-masing Rp. 100,00 (seratus rupiah), pakai meja Rp. 250,00 (dua ratus lima puluh rupiah), pedagang kaki lima Rp. 500,00 (lima ratus rupiah), toko kelontong Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah), kios kecil Rp. 500,00 (lima ratus rupiah), warung kecil Rp. 500,00 (lima ratus rupiah). Sesuai ketentuan bahwa barang siapa yang tidak mentaati ketentuan tersebut diatas di kenakan hukum denda sebanyak Rp. 25.000,00 (dupuluh lima ribu rupiah), atau hukum kurungan setinggi-tingginya 7 hari.

Mengenai pelanggaran terhadap tata tertib pengaturan barang dagangan, apabila ada diantara pedagang yang sudah menggelar dagangan di tempat-tempat yang terlarang seperti didepan dekat pintu masuk pasar mereka akan di suruh pindah kedalam pasar. Demikian pula bila ada pedagang yang menyerobot tempat sesama pedagang maka ia akan ditegur oleh pedagang-pedagang yang lain.

Toleransi antar pedagang dengan pedagang lainnya dipasar Kebonroek ini cukup tinggi.

## **B. DISIPLIN DI LINGKUNGAN TERMINAL**

Terminal adalah prasarana transportasi jalan untuk keperluan umum dan menurunkan orang atau barang serta mengatur kedatangan dan perangkatan kendaraan umum yang merupakan salah satu wujud simpul jaringan transportasi.

Dengan demikian pada hakekatnya terminal merupakan simpul dalam sistem jaringan transportasi jalan yang berfungsi pokok sebagai pelayanan umum antara lain berupa tempat untuk naik turun penumpang dan/atau bongkar muat barang untuk pengendalian lalu lintas dan pengangkutan kendaraan umum, serta sebagai tempat perpindahan intra dan antar moda transportasi.

Sesuai dengan fungsi tersebut maka dalam pembangunan terminal perlu mempertimbangkan antara lain lokasi, tata ruang, kapasitas kepadatan lalu lintas akan keterpaduan dengan moda transportasi. 4)

Terminal yang berlokasi di lingkungan Kebonroek di Kelurahan Ampenan Utara di bangun sekitar tahun 1990, bersebelahan letaknya dengan pasar umum Kebonroek. Terminal ini pindahan dari terminal lama yang letaknya di persimpangan Jalan Yos Sudarso, Ampenan Tengah, mengikuti perpindahan pasar dari Kampung Melayu ke Kebonroek.

Tepatnya di pojok antara jalan Yos Sudarso dengan Jalan Pabean. Kapasitas terminal ini nampak kurang seimbang dengan volume kendaraan yang masuk dan di samping itu juga keberadaannya dapat mengganggu keindahan kota. Dengan adanya program penataan kota dari pemerintah lokasi terminal di pindahkan ke tempat yang sekarang.

Terminal Kebonroek, diselenggarakan oleh Dinas LLAJR Kabupaten Lombok Barat dengan jumlah petugas 12 (dua belas) personil yang secara bergiliran bertugas mengatur kendaraan setiap hari. Terminal tersebut cukup memadai bila dibandingkan dengan jumlah kendaraan yang mangkal di tempat itu. Menurut data dari Dinas LLAJR jumlah angkutan penumpang yang beroperasi sebanyak 600 buah.

Satu hal yang pasti bahwa untuk bepergian dari satu tempat ke tempat lainnya alat transportasi sangat penting artinya bagi seseorang. Sebab dengan alat tersebut, tujuan yang hendak dicapai dapat dilakukan dengan waktu yang relatif singkat. Dalam hal ini masyarakat Ampenan Utara mengenal berbagai alat transportasi. Alat-alat transportasi tersebut antara lain bemo dan cidomo. Yang disebut bemo oleh masyarakat Ampenan Utara adalah jenis kendaraan minibus, mikrolet.

Sedangkan cidomo adalah sejenis alat transportasi yang terbuat dari gerobak yang mempergunakan velg dan roda mobil dengan kuda sebagai penariknya.

Cidomo singkatan dari cिकar, dokar, motor. Fungsinya adalah sebagai alat pengangkut orang. Perannya sebagai pengganti dokar yang telah punah. Kendaraan-kendaraan yang masuk terminal adalah kendaraan-kendaraan umum antar kota dan dalam kota. Sedangkan cidomo tidak diperbolehkan masuk ke terminal karenanya cidomo mempunyai tempat khusus.

Tempat-tempat cidomo boleh mangkal ditentukan di suatu lokasi yang terletak kurang lebih 25 meter di sebelah timur dari terminal Kebonroek. Kemudian di sebelah timur Bioskop Ramayana Ampenan dan di Jalan Banda.

Kendaraan yang keluar masuk terminal adalah kendaraan yang mengangkut penumpang yang berdagang dan berbelanja ke pasar Kebonroek. Ada juga beberapa penumpang, dengan tujuan lain. Mereka datang dari desa Senggigi, Gunungsari, Pagesangan, Sweta, Sindu dan sebagainya. Biasanya agar memudahkan penumpang maupun petugas mengenali suatu kendaraan dibedakan dengan warna cat kendaraan. Untuk kendaraan luar maupun dalam kota warna catnya belum seragam.

Tahun 1993 akan diberlakukan ketentuan mengenai warna cat kendaraan menurut jalurnya masing-masing. Pada saat ini beberapa pemilik bemo telah mengecat kendaraannya dengan warna kuning. Yang menjadi masalah dan perlu pengaturan adalah bemo kota yang jarang masuk ke terminal. Pangkalan bemo kota terletak di Sweta Kecamatan Cakranegara, sebuah terminal propinsi, tempat kendaraan penumpang umum antar pulau, antar kabupaten, antar kota, antar kota dan desa berkumpul. Bemo-bemo kota ini berangkat dari Sweta dengan membawa penumpang dengan tujuan Mataram dan Ampenan.

Di sepanjang jalan mereka menaikkan dan menurunkan penumpang melalui jalur-jalur yang telah ditentukan. Terakhir sampai di pasar Kebonroek dan menurunkan penumpangnya di depan pasar. Selanjutnya kembali lagi ke terminal Sweta. Berikutnya di bawah ini akan diuraikan bagaimana para *pengemudi* menjalankan tata tertib terminal, bagaimana *penumpang* mentaati tata tertib di terminal serta *sangsi-sangsi* yang dikenakan bagi pengemudi maupun penumpang yang melanggar tata tertib.

1. Tata Tertib Pengemudi di Terminal

Pengemudi adalah orang yang langsung mengemudikan kendaraan dan mengawasi orang lain mengemudikan. Sebagai pengemudi kendaraan angkutan umum mereka tentu mengetahui tata tertib terminal yang harus dipatuhi. Tata tertib itu antara lain kendaraan yang berangkat mengangkut orang maupun barang harus parkir dan antre di terminal, kendaraan tidak boleh mengisi muatan di luar terminal, pengemudi tidak boleh menaikkan tarif, pengemudi harus memenuhi persyaratan administrasi seperti mempunyai izin trayek dan mengikuti asuransi Jasa Raharja dan sebagainya. Untuk mengetahui motivasi, sikap tingkah laku, serta hambatan-hambatan pelaksanaan tata tertib terminal oleh pengemudi dapat di kemukakan dalam uraian dibawah ini.

Motivasi sikap mental untuk parkir dan antre bagi kendaraan-kendaraan yang akan berangkat yang dalam bahasa lokal disebut *ngelas* sangat erat hubungannya dengan pencegahan terhadap sesuatu sehingga hal-hal yang tidak diinginkan tidak terjadi misalnya, perkelahian antar pengemudi karena berebut penumpang, arus lalu lintas di terminal menjadi tidak lancar dan lain sebagainya. Bagaimana motivasi sikap mental dan tingkah laku pengemudi di terminal Kebonroek terhadap ketentuan parkir dan antre di terminal, dapat kita gambarkan melalui jawaban

responden yakni 64 % mengatakan patuh dan 36 % mengatakan tidak selalu patuh. Mereka yang patuh, selain taat kepada aturan yang telah ditentukan juga terdapat unsur kesetiakawanan antar individu maupun kelompok pengemudi. Aturan-aturan mengenai kesetiakawanan tersebut tidak tertulis tetapi berlandaskan norma-norma kemanusiaan dan tolong-menolong.

Bentuk kesetiakawanan antara lain ditunjukkan dengan cara mengarahkan para penumpang yang datang ke kendaraan yang paling depan dalam antrean sesuai dengan tujuannya masing-masing.

Penumpang-penumpang dipandu oleh kernet atau calo. Sebelum kendaraan yang di depan belum penuh maka kendaraan lain tidak boleh menaikkan penumpang. Bila kendaraan di depan telah penuh atau telah tiba waktunya maka langsung berangkat, kemudian kendaraan yang dibelakangnya maju kedepan.

Hambatan pribadi para pengemudi yang tidak patuh untuk melaksanakan parkir dan antre di dalam terminal adalah lambatnya memperoleh penumpang. Mereka seperti dikejar waktu untuk mendapatkan uang sebanyak-banyaknya untuk memenuhi setoran. Dengan cara menyerobot mereka akan lebih cepat mendapat penumpang, karena pada umumnya penumpang sendiri juga tentu memilih kendaraan yang segera berangkat dan yang dekat dengan mereka. Pengemudi yang kurang patuh terhadap tata tertib ini umumnya yang masih muda. Kendaraan-kendaraan mereka diparkir di luar terminal pada waktu yang tidak dilihat oleh petugas, baik petugas terminal maupun aparat keamanan (polisi lalu lintas). Kepatuhan terhadap tata tertib untuk tidak menaikkan ongkos sesuai dengan tarif yang resmi nampaknya ditaati oleh semua pengemudi. Mereka tidak berani menaikkan ongkos kecuali dengan perjanjian terlebih

dahulu dengan penumpang yang bersangkutan. Kenaikan ongkos ini terjadi bila penumpang membawa barang yang cukup banyak sehingga memakan tempat yang seharusnya untuk ditempati penumpang lain. Juga bisa terjadi bila penumpang minta diantar ke tempat di luar jalur yang sudah ditentukan karena membawa barang yang cukup banyak.

Mengenai kepatuhan pengemudi terhadap tata tertib tidak boleh menaikkan penumpang di luar terminal menurut jawaban responden 36 % mengatakan pengemudi tidak patuh terhadap ketentuan parkir di dalam terminal serta tidak antri dan sebanyak 64 % mengatakan patuh. Oleh karena itu maka dapat disimpulkan bahwa kepatuhan pengemudi terhadap ketentuan tersebut kurang. Mereka kurang menyadari bahwa maksud ketentuan tersebut adalah untuk menghindari terjadinya kemacetan lalu lintas. Tempat-tempat kemacetan lalu lintas yang sering terjadi adalah di depan pasar Kebonroek. Selain bemo kota yang menurunkan dan menaikkan penumpang juga cidomo-cidomo. Kendaraan angkutan umum luar kota yang semestinya masuk terminal nampaknya ada juga parkir menunggu penumpang di luar terminal. Dari kenyataan tersebut dapat kita simpulkan pula bahwa tata tertib terminal belum begitu baik.

Kepatuhan para pengemudi dalam hal tata tertib administrasi berupa, pemilihan izin trayek dan keikutsertaan dalam asuransi Jasa Raharja telah dilaksanakan dengan baik. Mengenai cidomo yang beroperasi di Kecamatan Ampenan yang berasal dari Ampenan Utara berjumlah 154 buah.

Para kusir cidomo baik pemilik langsung maupun yang bukan pemilik banyak yang buta huruf dan berada di bawah umur. Pengetahuan dan pemahaman mereka tentang aturan berlalu lintas pada umumnya kurang sehingga sering terjadi kemacetan lalu

lintas akibat salah parkir terutama di tempat-tempat umum yang ramai seperti depan pasar Kebonroek. Adapun ketidak patuhan kusir-kusir itu bukan saja karena latar belakang pengetahuan yang kurang semata-mata, tetapi juga disebabkan karena ingin mengejar pendapatan yang lebih tinggi sehingga terpaksa mereka melakukan pelanggaran dengan menaikkan penumpang dan parkir menunggu penumpang di tempat-tempat strategis yang dekat dengan penumpang. Tempat-tempat parkir yang telah disediakan pemerintah kurang dimanfaatkan. Sebagaimana hasil wawancara penulis dengan Mahsun kusir cidomo yang mengatakan bahwa sebagian besar kusir cidomo menganggap bahwa kebijakan pemerintah tentang pengaturan tempat parkir untuk cidomo dan pengaturan jalur-jalur untuk cidomo merugikan kusir maupun pemilik cidomo karena dianggap kurang strategis. Padahal sesungguhnya pemerintah mengatur demikian demi tertib dan lancarnya arus lalu lintas serta menghindari bertambahnya angka kecelakaan.

Untuk menghapuskan cidomo sebagai alat angkutan bagi pemerintah tidaklah mungkin karena cidomo merupakan sumber kehidupan para kusir.

Beberapa kusir cidomo ada pula yang kurang menerapkan budaya antri. Mereka berkompetisi mengejar penumpang dengan menunggu didekat pasar. Namun sebagian besar mereka taat terhadap ketentuan antri (bahasa Sasak : ngelas).

Kepatuhan kusir cidomo mengenai kelengkapan surat-surat berupa STNK, SIM, Surat Keur dan lain-lain ternyata kurang. Banyak kusir yang belum memilikinya.

## 2. Tata Tertib Penumpang di Terminal

Penumpang kendaraan angkutan antar kota yang naik dan turun di terminal Kebonroek adalah mereka para pedagang dan masyarakat yang datang dari dan keluar kota. Untuk menggunakan jasa transportasi mereka tidak membeli karcis tetapi langsung naik di kendaraan yang ditunjukkan oleh pemandu (krenet, calo). Mengenai ketaatan penumpang terhadap tata tertib di terminal seperti antre, sopan santun dalam kendaraan, 70 % responden mengatakan baik dan 30 % mengatakan kadang-kadang taat dan sopan atau tidak selalu taat dan sopan.

Mengenai alat Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K) di kendaraan umum yang beroperasi di wilayah penelitian, 33 % reponden mengatakan ada, 63 % yang lainnya mengatakan tidak ada. Sedangkan penempatan keranjang sampah, 60 % responden mengatakan tidak ada, 40 % mengatakan ada. Angka-angka tersebut menunjukkan bahwa pemilik kendaraan maupun pengemudi kurang memperhatikan kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi selama kendaraan beroperasi, serta kurang memperhatikan kebersihan. Penumpang selama di atas kendaraan jarang membuat sampah, karena jarak antara terminal dengan tempat tujuan relatif dekat, sehingga dalam perjalanan penumpang tidak memerlukan makanan/minuman yang wadahnya adalah sumber sampah. Pula jarang ada penumpang yang merokok di dalam kendaraan..

Tentang perilaku penumpang di terminal dalam menjaga kebersihan kurang. Masih ada penumpang yang sering membuang sampah tidak di tempat yang disediakan. Seorang bapak, membuang begitu saja bungkus atau puntung rokoknya di sembarang tempat kemudian langsung naik kekendaraan yang akan ditumpangi. Tetapi untuk sampah-sampah pasar penumpang akan membuang di tempat yang telah disediakan. Di terminal Kebonroek

penanganan masalah kebersihan dikoordinasikan oleh Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya (DLLAJR).

Setiap sore petugas kebersihan membersihkan terminal dari sampah dan dengan kereta dorong berwarna kuning membawa sampah-sampah ke TPS.

Pada jam 18.00 sore truck-truck pengangkut sampah mengangkut sampah-sampah pasar, sampah terminal dan sampah-sampah di tempat lain ke TPA.

Penumpang kendaraan tidak bermotor yang dikenal masyarakat dengan nama cidomo tersebut terdiri dari masyarakat umum, pedagang, mahasiswa, pelajar sampai ke pegawai negeri/swasta dan lain-lain. Kendaraan ini beroperasi pada jalur-jalur yang tidak boleh dilalui kendaraan umum sehingga sangat dibutuhkan kehadirannya bagi para pengguna jasa transportasi yang berada agak jauh jalur bemo. Para pengguna jasa angkutan ini sering mencarter untuk antar jemput anak-anak siswa sekolah dasar, Taman Kanak-Kanak. Tarif ongkos cidomo untuk jarak jauh dan dekat rata-rata Rp. 100,00 per orang, namun bisa lebih, sesuai dengan perjanjian bila penumpangnya mencarter. Tata tertib penumpang cidomo untuk antre masih kurang. Biasanya penumpang kendaraan ini selalu ingin cepat. Bila cidomo yang dinaiki tidak segera berangkat penumpang akan turun mencari cidomo yang lain. Ini biasanya dilakukan oleh para pelajar/pegawai yang dikejar waktu. Jumlah cidomo yang beroperasi di Kelurahan Ampenan Utara cukup banyak sehingga penumpang tidak perlu berebutan naik kendaraan ini.

Mengenai kebersihan penumpang di atas cidomo cukup baik. Penumpang tidak pernah membuang sampah secara sembarangan di atas cidomo. Yang membuat kotor tempat parkir cidomo maupun jalan justru berasal dari cidomo sendiri yakni kotoran kuda.

Untuk menanggulangi masalah kotoran kuda dari Suku Dinas kebersihan telah mendistribusikan kantong-kantong penadah kotoran kuda agar tidak tercecer di jalan dan lingkungan parkir. Sebagian besar kusir mentaati aturan itu. Bila kotoran kuda tercecer maka mereka mengumpulkan dan memasukkannya ke dalam karung. Karung diletakkan sedemikian rupa di bawah pantat kuda agar kotoran tidak tercecer. Tetapi sebagian kecil kusir tidak mentaati ketentuan itu dan tidak memanfaatkan kantong-kantong sebagai tempat kotoran kuda. Mereka beranggapan bahwa dengan membayar Rp 3.000,00 kepada petugas sebagai pengganti harga kantong termasuk ongkos petugas membersihkan kotoran kuda. Yang mereka ketahui harga karung/kantong di pasar sekitar Rp 500,00 per lembar sedangkan mereka membayar Rp 3.000,00. Selebihnya dianggap untuk ongkos petugas membersihkan. Demikian pendapat dari sebagian kusir (wawancara dengan Sdr. Jaisa, 23 Oktober 1992). Pengeluaran sebanyak itu dianggap cukup memberatkan kusir karena pendapatan mereka per hari relatif kecil. Rata-rata pendapatan bersih per hari Rp 5.000,00. Pada hari-hari besar Islam seperti Maulid Nabi Muhammad SAW, Hari Raya Idul Fitri, Lebaran Ketupat atau Tahun Baru cidomo sangat laris. Penumpang-penumpang terutama dari kampung-kampung sekitar Kelurahan Ampenan Utara yang hendak berekreasi ke pantai Senggigi, Kerandangan, Batu Layar dan obyek-obyek wisata lainnya lebih suka menggunakan cidomo walaupun tarifnya dinaikkan. Mereka dengan membawa makanan dan minuman dengan santai menikmati pemandangan disepanjang jalan. Sampah-sampah bekas teh kotak, botol aqua dilemparkan saja disepanjang jalan, menandakan kurangnya kesadaran mereka akan arti kebersihan lingkungan.

### 3. Sangsi-Sangsi Terhadap Pelanggaran Tata Tertib

Bagi pengemudi yang tidak patuh pada aturan-aturan seperti tidak antri di terminal, menaikkan penumpang di luar terminal, 75 % responden mengatakan diberi sangsi dan 25 % mengatakan tidak ada sangsi apapun. Sangsi-sangsi yang diberikan berupa teguran dan peringatan. Sangsi yang lebih berat berupa tilang putih dan tilang merah. Tilang putih maksudnya langsung denda di tempat. Tilang merah perkaranya dilanjutkan ke pengadilan. Petugas yang memberikan sangsi adalah senat keamanan (Polantas). Untuk pelanggaran menaikkan tarif kemudian tidak mengindahkan persyaratan administrasi, dan lain-lain sangsinya adalah izin trayek akan ditahan selama waktu tertentu. Petugas yang menjatuhkan sangsi adalah dari DLLAJR. Tetapi pelanggaran yang terakhir tersebut jarang terjadi. Bila terjadi pelanggaran rambu-rambu lalu lintas serta pelanggaran lain yang mengakibatkan kecelakaan baik di luar maupun di dalam terminal akan diselesaikan oleh aparat keamanan sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

Bagi kusir cidomo yang tidak mematuhi aturan antri pada waktu menaikkan penumpang di terminal, nampaknya tidak ada sangsi dari petugas. Tetapi antar kusir cidomo sendiri telah membuat kesepakatan bersama untuk melaksanakan antri (ngelas). Barang siapa yang melanggar kesepakatan bersama akan ditegur oleh temannya sendiri dan pasti terjadi konflik. Untuk menghindari konflik tersebut rupanya para kusir terpaksa harus taat pada aturan, selain karena adanya rasa kesetiakawanan yang tinggi, dan merasa senasib. Budaya ngelas ini bukan saja di terminal tetapi juga di luar terminal. Sedangkan bagi kusir cidomo yang menaikkan penumpang diluar terminal tidak ada sangsi; hanya akan diperingati oleh petugas.

### C. DISIPLIN DI LINGKUNGAN TEMPAT HIBURAN

Hiburan dan kesenian diperlukan untuk melepaskan ketegangan dialami seseorang karena berbagai beban dalam kehidupan. Selain itu hiburan mempunyai peranan penting dalam proses sosialisasi kehidupan masyarakat. Hal ini dapat difahami karena pada dasarnya manusia adalah makhluk sosial yang secara naluriah ingin hidup bergaul dengan orang lain. Kedua fungsi tersebut merupakan kebutuhan manusia baik yang primitif maupun yang modern, dalam mencari pemantapan dan keseimbangan hidup.

Di Kelurahan Ampenan Utara terdapat beberapa tempat hiburan yang dikenal masyarakat setempat. Tempat-tempat tersebut antara lain Pantai Pura Segara, Pantai Ampenan dan Bioskop. Hiburan yang dilaksanakan di pantai sifatnya insidental saja. Hiburan di kedua tempat (pantai) hanya digelar pada acara-acara tertentu seperti tahun baru, Hari Raya Idul Fitri dan Lebaran Ketupat. Pada saat itu pengunjung berbondong-bondong ke pantai sambil menikmati keindahan pantai di malam hari dan menyaksikan atraksi yang disuguhkan panitia. Jenis hiburan yang biasa dipertunjukkan adalah film (layar tancap), band dan musik dangdut.

Dalam bab ini penulis akan menguraikan mengenai hiburan di bioskop. Bioskop Ramayana yang terletak di pojok perempatan Jalan Saleh Sungkar dan Jalan Koperasi didirikan sekitar tahun lima puluhan. Pemiliknya group Tionghoa yang dikontrak oleh seorang pengusaha pribumi atas nama H. Ahmad. Pengunjung bioskop, selain warga Kelurahan Ampenan Utara juga datang dari luar Kecamatan, seperti desa Rembiga, Gunungsari, Senggigi dan sebagainya. Pengunjungnya kebanyakan dari kalangan menengah ke bawah, dan sedikit sekali pelajar dan mahasiswa.

Warga masyarakat yang ekonominya agak tinggi biasanya menonton film di tempat lain yang lebih baik seperti di Mataram Plaza, Bioskop Rinjani atau Bioskop Irama yang terletak di luar Kecamatan Ampenan yang jaraknya tidak jauh dari kelurahan ini.

Jumlah penonton di bioskop Ramayana ini dapat dilihat dari jumlah karcis yang habis terjual yakni rata-rata 100 lembar per malam. Harga karcis beragam menurut waktu putar. Jam pertama dimulai pukul 18.00 sampai dengan pukul 20.00 harga karcis Rp. 500,00 (lima ratus rupiah) per lembar. Jam kedua dimulai pukul 20,00 sampai dengan pukul 22.00 harga karcis Rp 600,00 (enam ratus rupuah) dan jam ketiga pukul 22.00 sampai dengan pukul 24 harga karcis Rp 600,00 (enam ratus rupiah) per lembar. Film-film yang diputar biasanya film barat, film India, film Indonesia dan film Hangkong. Yang paling banyak penggemarnya adalah film Hongkong dan film India. Sebelum pertunjukkan dimulai pengunjung harus membeli karcis terlebih dahulu di loket.

Mengenai ketaatan penonton untuk membeli karcis ini semua responden mengatakan tertib dan patuh. Yang kurang dipatuhi adalah membeli karcis dengan cara antre. 68,4 % responden mengatakan antre dan 31,6 % mengatakan tidak taat antre. Yang tidak antre berdesakan maju kedepan ingin didahulukan oleh petugas penjual karcis. Dalam hal pembelian karcis ini pengunjung jarang menggunakan calo karena jumlah pembeli karcis tidak terlalu banyak. Namun dalam film-film tertentu yang banyak penggemarnya calo sering terlibat dalam penjualan karcis. Dari seluruh responden, hanya satu orang yang mengatakan calo ikut terlibat.

Di dalam gedung pada waktu menyaksikan pertunjukan para penonton tidak selalu mematuhi peraturan tentang larangan merokok, berteriak, dan membuang sampah dalam ruangan.

Sementara film dimulai para penonton yang pada umumnya laki-laki yang gemar merokok dengan santai menyulut rokoknya. Mereka kurang peduli terhadap penonton yang lain. Ini dapat dimengerti karena umumnya pengunjung adalah orang-orang desa dan orang-orang kampung perkotaan yang kurang berpendidikan. Selesai merokok puntung rokok dibuang di bawah kursi. Selain itu kebiasaan berteriak tidak bisa dihindari. Penonton berteriak dan bersuit-suit tatkala lampu mati, film terputus dan bisa juga karena terlalu senang dengan adegan yang berlangsung atau juga karena jengkel.

Mengenai kebersihan lingkungan di dalam gedung bioskop, kurang mendapat perhatian dari pengunjung. Di tempat-tempat tertentu petugas menyediakan tempat sampah tetapi kurang dimanfaatkan oleh mereka. Kebersihan gedung tidak bisa terjamin bila mengharapkan partisipasi penonton. Oleh karena itu maka pengurus gedung mengangkat petugas khusus untuk membersihkan gedung dari sampah-sampah.

Sampah-sampah yang berasal dari dalam gedung maupun luar gedung diangkut oleh petugas kebersihan ke TPS dan selanjutnya truck-truck pengangkut sampah dari Suku Dinas Kebersihan Kota membuang ke TPA. Dalam hal ketidakpatuhan penonton seperti diuraikan di atas dapat dilihat dari jawaban responden, 94 % mengatakan penonton tidak selalu patuh dan 6 % mengatakan patuh.

Adapun batas mengenai usia penonton sekitar 75 % s.d. 90 % dari responden mengatakan dipatuhi oleh pengunjung maupun oleh petugas pintu. Sisanya mengatakan kurang dipatuhi oleh pengunjung. Pelanggaran tersebut dapat terjadi karena kelihaiian penonton menyerobot serta tidak ada ketegasan dari petugas sendiri. Bagi mereka (para petugas) yang penting karcisnya laku terjual. Para petugas memang kadang-kadang memberi peluang.

Tindakan atau sanksi yang diberikan bila terjadi pelanggaran batas usia, 58 % responden mengatakan tidak diberi masuk oleh petugas, sedangkan 42 % mengatakan tidak ada sanksi apapun.

#### **D. DISIPLIN DI JALAN RAYA**

Sistem lalu lintas selama ini memang masih jauh dari kondisi ideal. Pihak pemakai jalan lebih cenderung mementingkan diri sendiri dan tidak mau memikirkan orang lain, sehingga lalu lintas di jalan raya seringkali semrawut. Para pemakai jalan sebagian besar masih egois, akibatnya sopan santun berlalu lintas di jalan raya kurang mendapat perhatian. Salah satu bukti yaitu sikap seseorang yang langsung marah besar karena sedang saat berjalan di pinggir jalan tiba-tiba hampir di serempet bus yang melaju begitu cepat. Anehnya jika orang tersebut mengendarai sendiri dan ingin cepat sampai ke tujuan maka ia akan menjalankan kendaraan dengan kencang tanpa mempedulikan orang lain. Yang penting cepat sampai ke tujuan. Bukankah sikap yang demikian ini amat kontradiktif dan merupakan salah satu fenomena bahwa masing-masing orang cenderung bersikap egoistis. 5)

Sesuai dengan topik pada sub bab tentang disiplin di jalan raya, berikut ini penulis akan memberikan sedikit gambaran tentang hal-hal yang berkaitan dengan jalan di lokasi penelitian.

Yang dimaksud dengan jalan adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum. Kelurahan Ampenan Utara sebagai bagian dari kota Kecamatan Ampenan yang bekas kota pelabuhan tidak pernah sepi dari lalu lintas baik pejalan kaki, maupun kendaraan. Jalan-jalan penting yang terdapat di wilayah ini adalah Jalan Saleh Sungkar sebuah jalan yang menghubungkan ibukota Propinsi Mataram dengan obyek wisata Senggigi.

Jika berangkat dari Bandar Udara Selaparang menuju obyek wisata tersebut kita akan melalui jalan Adisucipto yang juga terletak di Kelurahan Ampenan Utara. Selain itu terdapat Jalan Koperasi dan Jalan Pabean. Jalan Koperasi merupakan sebuah jalur yang dilalui bemo kota dari pasar Kebonroek, ke arah timur. Sedangkan Jalan Pabean, jalan yang memisahkan Kelurahan Ampenan Tengah dengan Kelurahan Ampenan utara, juga termasuk ramai karena jalan ini menuju pantai Ampenan. Di sekitar jalan ini terdapat sebuah kelenteng, bengkel, penginapan, toko-toko, rumah makan dan sebagainya.

Kondisi jalan-jalan tersebut di atas cukup baik, karena sejak dikembangkannya pantai Senggigi dan sekitarnya sebagai kawasan wisata alam, pemerintah secara terus menerus mengadakan perbaikan-perbaikan prasarana transportasi yang menunjang berhasilnya program pembangunan dibidang kepariwisataan. Dengan adanya gerakan operasi kebersihan dari Pemerintah Daerah Tingkat II Lombok Barat khususnya Kotif Mataram jalan-jalan sudah mulai bersih dari sampah dan limbah walaupun belum dapat dikatakan sangat bersih.

Di sepanjang kota Ampenan telah disediakan bak-bak tempat pembuangan sampah dari plastik yang diletakkan dipinggir jalan di sekitar kota kecamatan. Tempat-tempat sampah plastik tersebut diperuntukkan bagi penghasil sampah rumah tangga disediakan kantong, yang selanjutnya dibuang ke bak-bak sampah di tepi jalan. Air limbah keluarga dialirkan melalui parit/got di tepi jalan.

Dalam hal memelihara kebersihan lingkungan, pemerintah mengharapkan partisipasi seluruh warga masyarakat. Tingkat partisipasi masyarakat dapat diukur dengan ketaatan warga membayar iuran sampah serta kegiatan gotong royong yang selalu

dilaksanakan secara periodik di tiap lingkungan. Toko-toko, bengkel, rumah makan, rumah tinggal, rumah sakit dan lain-lain sebagai penghasil sampah yang terdapat disepanjang jalan wilayah Kelurahan Ampenan Utara khususnya diwajibkan membayar retribusi sampah dengan tarif yang berbeda.

Adapun pemakai jalan di wilayah Kelurahan Ampenan Utara ini mulai dari pejalan kaki, pengendara sepeda, pengendara kendaraan bermotor, kusir cidomo, sampai pedagang yang menggunakan gerobak dorong serta pedagang bakso. Dari pagi hingga malam setiap hari para pemakai jalan ini bersimpang siur dengan tujuan masing-masing. Para pemakai jalan di Kelurahan ini tidak hanya berasal dari Kelurahan Ampenan Utara saja tetapi juga dari berbagai tempat.

Pasar Kebonroek sebagai tempat pusat kegiatan ekonomi yang terletak di Jalan Adisucipto juga mengundang para pengunjung untuk melakukan transaksi jual beli barang keperluan sehari-hari berdatangan dari semua penjuru baik dari Kelurahan Ampenan Utara sendiri maupun kelurahan lain bahkan dari luar kecamatan. Belum lagi orang-orang yang pergi ke tempat-tempat rekreasi di pantai Pura Segara, pantai Senggigi, dan obyek-obyek wisata lainnya yang menggunakan berbagai jenis kendaraan pada hari-hari libur membuat para petugas keamanan cukup sibuk mengatur jalan.

Selain hal-hal yang diuraikan di atas sebagai penyebab semakin banyaknya pemakai jalan juga karena faktor kepadatan penduduk dan semakin meningkatnya kepemilikan kendaraan menambah permintaan akan ruang jalan untuk keperluan lalu lintas. Padahal jalan-jalan yang ada di Kelurahan Ampenan Utara pada umumnya sempit. Nampaknya kurang seimbang dengan volume kendaraan yang lalu lalang. Usaha pelebaran jalan mungkin saja tidak bisa dilakukan dalam waktu dekat mengingat

di kiri kanan jalan terletak pertokoan maupun perumahan yang rata-rata tidak mempunyai halaman seperti yang terlihat di Jalan Koperasi, Jalan Pabean dan di ujung jalan Saleh Sungkar. Dengan kondisi jalan yang sempit sementara arus lalu lintas kendaraan cukup padat terutama pada pagi hari memerlukan pengaturan yang lebih ketat dari petugas keamanan lalu lintas jalan raya. Bagaimana sikap pengemudi di tempat parkir, sikap terhadap rambu-rambu, apa sanksinya bagi pelanggar, bagaimana kepatuhan pejalan kaki dan pedagang kaki lima menggunakan trotoar dan apa sanksi bagi pedagang kaki lima dan pejalan kaki bila melakukan pelanggaran akan diuraikan berikut ini.

1. Sikap Pengemudi Terhadap Ketentuan Parkir dan Rambu Rambu Lalu Lintas Serta Sanksi Terhadap Pelanggaran

- a. Sikap pengemudi terhadap ketentuan parkir

Parkir adalah pemberhentian kendaraan selain untuk menurunkan atau menaikkan penumpang juga untuk memuat dan membongkar barang dengan segera. Tempat pemberhentian adalah tempat memberhentikan dan tempat pemberhentian kendaraan umum untuk menurunkan dan menaikkan penumpang dengan segera. Fasilitas parkir diadakan untuk umum adalah untuk menunjang keselamatan, keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas angkutan jalan. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut maka pada kawasan-kawasan tertentu dapat disediakan fasilitas parkir untuk umum. 6)

Di Kelurahan Ampenan Utara, fasilitas parkir untuk kendaraan bermotor bukan angkutan umum telah dibangun oleh pemerintah di depan pasar Kebonroek yang terletak di Jalan Adisucipto. Fasilitas parkir tersebut diperuntukkan bagi kendaraan-kendaraan pribadi para pengunjung pasar dan tempat perbelanjaan di sekitarnya.

Sedangkan untuk kendaraan angkutan umum masuk ke terminal Kebonroek.

Berkaitan dengan sikap dan sopan santun pengemudi tentang parkir menurut pengamatan penulis, pengemudi pengemudi baik roda dua maupun roda empat yang tujuannya hanya ke pasar/toko-toko di Jalan Adisucipto cukup patuh dan tertib memarkir kendaraan di tempat parkir yang telah disediakan bagi mereka. Pengemudi-pengemudi tersebut pada umumnya pemilik kendaraan pribadi. Mereka tidak memarkir kendaraan diluar tempat parkir karena areal parkir cukup memadai. Yang dapat dinilai kurang patuh dan tidak tertib terhadap ketentuan parkir di tempat yang disediakan adalah pengemudi kendaraan angkutan umum (bemo kota), kusir cidomo dan sebagian kecil pengemudi angkutan luar kota. Hal ini diperkuat oleh jawaban responden, 60 % mengatakan tidak tertib dan 40 % mengatakan tertib.

Bemo kota yang berangkat dari terminal Sweta yang melewati jalur tengah yakni jalan-jalan utama di ibukota Propinsi Mataram menuju Ampenan yang membawa penumpang dan barang tidak menurunkan penumpang di terminal. Pengemudi-pengemudi tersebut parkir di depan pasar, padahal di depan pasar terpasang rambu-rambu tidak boleh menghentikan kendaraan untuk menaikkan maupun menurunkan penumpang. Di tempat itu terpasang tanda larangan. Setelah menurunkan penumpang, bemo bemo tersebut langsung berangkat dan mencari penumpang di sepanjang jalan dan selanjutnya kembali ke terminal Sweta. Karena para pengemudi bemo saling berkompetisi mencari penumpang, mereka tidak segan-segan memasuki jalan-jalan lingkungan untuk mengejar satu, dua orang penumpang.

Prilaku pengemudi yang juga sering mengakibatkan kecelakaan lalu lintas adalah menyalip kendaraan yang berada di depannya dan secara mendadak dalam jarak yang dekat menghentikan kendaraannya. Ulah pengemudi tersebut tentu membuat gugup dan terkejut pengemudi yang dibelakangnya sehingga sering terjadi kecelakaan karena menabrak. Sering juga bemo-bemo kota menghentikan kendaraan di tempat-tempat rawan kecelakaan seperti di persimpangan-persimpangan jalan yang membuat pengemudi kendaraan lainnya marah. Mereka seolah-olah kurang memperhatikan orang lain. Karena bagi mereka yang penting adalah mendapat penumpang. Pengemudi bemo yang kurang memperhatikan sopan santun di jalan raya ini kebanyakan berusia muda. Pengemudi yang sudah agak dewasa dan berpengalaman sikapnya cukup sopan dan menghargai pejalan kaki.

Kendaraan angkutan umum untuk luar kota mengantar dan menunggu penumpang di terminal. Mereka para pengemudi memarkir kendaraan dengan tertib sesuai dengan penempatan yang ditentukan untuk mereka oleh petugas terminal. Namun ada kalanya beberapa pengemudi kurang patuh dengan ketentuan. Mereka parkir di luar terminal di tempat-tempat yang dekat dengan penumpang dan jauh dari pengawasan petugas. Tujuannya tentu tidak lain untuk mengejar penumpang dan menghindari antre.

Saat padatnya lalu lintas di Jalan Adisucipto adalah pada pagi hari mulai pukul 06.00 hingga pukul 12.00 siang. Lebih padat lagi jika hari-hari libur. Pada hari-hari libur ibu-ibu yang bekerja dikantor baik sebagai pegawai negeri

maupun swasta turun kepasar membeli kebutuhan sehari-hari untuk keperluan satu minggu. Fasilitas parkir yang biasanya tidak terlalu penuh menjadi sesak,

Mengenai ulah kusir cidomo terhadap ketentuan parkir di kelurahan ini sering membuat petugas keamanan lalu lintas menjadi repot karena tidak tertib. Tempat parkir bagi kendaraan cidomo telah ditentukan di beberapa lokasi namun kurang dimanfaatkan. Menurut pengamatan penulis barisan cidomo berwarna biru tersebut selalu parkir di depan terminal Kebonroek. Berulang kali ditertibkan oleh petugas tetapi bila petugas tidak ada mereka akan kembali lagi parkir di tempat tersebut. Untuk penertiban cidomo-cidomo di tiga kecamatan Kotip Mataram dilakukan oleh aparat pemerintah daerah bekerjasama dengan aparat keamanan. Daerah operasi cidomo adalah pada jalur jalan desa dan lingkungan dan jalur-jalur luar kota. Karena jumlah cidomo yang beroperasi cukup banyak membuat jalan sering macet.

Masalah lain yang timbul akibat banyaknya cidomo adalah yang menyangkut kebersihan jalan. Di sana sini terdapat kotoran kuda tercecet. Para kusir cidomo kurang patuh terhadap ketentuan yang telah ditentukan. Menurut ketentuan sebuah cidomo harus mempunyai kantong tempat kotoran kuda dan satu buah sekop. Jadi setiap kuda membuang kotoran langsung ditampung dalam kantong agar tidak mengotori jalan raya.

## **b. Sikap terhadap rambu-rambu lalu lintas**

Rambu-rambu lalu lintas adalah salah satu alat perlengkapan jalan dalam bentuk tertentu yang memuat lambang-lambang, huruf, angka, kalimat dan atau memberikan peringatan, larangan, perintah, dan petunjuk bagi pemakai jalan. Maksud pemasangan rambu-rambu lalu lintas tidak lain untuk mengatur ketertiban lalu lintas dan angkutan jalan demi keselamatan dan keamanan pemakai jalan. 7)

Rambu-rambu yang terpasang di Kelurahan Ampenan Utara disesuaikan dengan keadaan jalan yang ada yakni di Jalan Saleh Sungkar terpasang tanda larangan bagi kendaraan cidomo. Cidomo tidak boleh melewati jalan tersebut. Kurang lebih tiga meter dari rambu tersebut terdapat tanda larangan parkir bagi semua kendaraan. Berdekatan dengan rambu terpasang tanda Palang Merah karena di sana terdapat Puskesmas. Selanjutnya di pertigaan Jalan Saleh Sungkar menuju Jalan Adisucipto terdapat rambu-rambu tanda larangan lagi bagi angkutan umum tidak boleh ke arah timur melewati Jalan Saleh Sungkar dan seterusnya. Demikian pula di depan pasar Kebonroek Jalan Adisucipto terdapat rambu tidak boleh berhenti bagi semua kendaraan. Mengenai kepatuhan terhadap rambu-rambu lalu lintas yang terpasang, para pengemudi kendaraan umum sebagian besar cukup patuh tetapi sebagian kecil lainnya kurang patuh. Di Jalan Saleh Sungkar yang terdapat tanda larangan tidak boleh parkir, masih ada kelihatan kendaraan yang parkir. Yang sering melakukan pelanggaran adalah pengendara sepeda motor remaja yang terdiri dari pelajar SLTP, SLTA dan Mahasiswa. Pelanggar rambu lainnya adalah sebagian

pengemudi bemo angkutan kota.

Seperti diuraikan di atas di depan pasar terdapat tanda dilarang berhenti. Kenyataannya pengemudi-pengemudi bemo menurunkan dan menaikkan muatan selalu ditempat terlarang tersebut. Padahal di jalan tersebut merupakan jalur dua arah sementara kondisi jalan sempit. Mereka taat bila ada petugas . Penumpang juga biasanya tidak mau menunggu bemo di terminal. Kemudian mengenai kepatuhan kusir cidomo terhadap rambu-rambu lalu lintas juga kurang. Masih terdapat cidomo melewati jalan yang terlarang di kelurahan ini. Hal ini disebabkan karena kurangnya pemahaman mereka tentang rambu-rambu lalu lintas.

Adapun mengenai sopan santun pengemudi bemo kota di jalan raya menurut kesan masyarakat agak kurang baik. Para pengemudi bemo kota dalam menjalankan kendaraannya di jalan kurang memperhatikan kepentingan pemakai jalan lain. Misalnya pada waktu berhenti atau menikung di persimpangan jalan sering memberikan isyarat secara mendadak. Selain itu jarak antara kendaraan yang dikemudikannya dengan kendaraan lain di depannya terlalu dekat. Perilaku lain sering dilakukan pengemudi bemo kota adalah masuk ke gang-gang mencari penumpang sehingga penumpang yang ada di dalam kendaraan merasa tertunda perjalanannya.

Mengenai sopan santun cidomo di jalan raya pada saat menjalankan kendaraannya cukup baik dan tertib, namun tidak bisa dihindarkan bila sesekali cidomo membuat kemacetan lalu lintas karena kuda yang bertingkah.

### **c. Sangsi-Sangsi Terhadap Pelanggaran Ketentuan Parkir dan Rambu-Rambu Lalu Lintas**

Sangsi adalah hukuman yang diberikan kepada barang siapa yang tidak mematuhi ketentuan yang telah ditetapkan. Bentuk hukuman dapat berupa hukuman badan atau penggantian kerugian yang disebut denda. Hukuman hanya dapat dijatuhkan oleh penguasa. Dalam hal ini bagi pengendara atau pengemudi kendaraan bermotor roda dua maupun roda empat yang melakukan pelanggaran ketentuan parkir maupun tanda-tanda rambu-rambu lalu lintas, pada tahap pertama diberikan peringatan-peringatan oleh petugas/aparat keamanan yang setiap hari melakukan operasi rutin. Bila pelanggaran dilakukan berulang kali oleh pengendara/pengemudi maka akan dilakukan tilang dengan penahanan SIM atau STNK. Dan kalau si pelanggar tidak membawa surat-surat, kendaraannya ditahan. Selanjutnya pada waktu yang telah ditentukan pengemudi yang mendapat surat bukti pelanggaran disidang di Pengadilan Negeri Mataram dan dihukum membayar denda. Sedangkan pelanggaran yang dilakukan oleh kusir cidomo baik dalam hal parkir maupun pelanggaran rambu-rambu lalu lintas untuk tahap awal akan diberikan peringatan dan teguran keras dari aparat keamanan. Bila pelanggaran berulang kali dilakukan maka sebagai sangsinya adalah jok cidomo akan diamankan oleh petugas, baik dari Pemerintah Daerah maupun dari aparat keamanan (Polantas), selama 7 hari. Dengan mengamankan jok kendaraan selama beberapa hari dengan sendirinya cidomo tak bisa beroperasi. Diharapkan dengan cara itu para kusir akan jera melakukan pelanggaran-pelanggaran di jalan raya.

Aktivitas penertiban berkaitan dengan penertiban lingkungan khususnya di jalan raya aparat keamanan melakukan operasi rutin. Pada waktu-waktu yang ditentukan Polantas melakukan razia terhadap semua kendaraan bermotor. Pada saat penulisan ini, dalam rangka penertiban dan meningkatkan pembinaan penyelenggaraan lalu lintas di jalan raya sedang digelar Operasi Zebra yang dilaksanakan secara terpadu. Operasi Zebra yang dilakukan secara serentak diseluruh Indonesia memiliki misi mulia yaitu untuk membina ketertiban warga masyarakat pengguna jalan. Sasarannya agar masyarakat patuh terhadap hukum lalu lintas, tidak seenaknya melanggar peraturan lalu lintas dan seakan-akan tanpa merasa bersalah. Operasi Zebra ini yang pada prinsipnya untuk mendidik masyarakat, pada hari pertama operasi, masyarakat yang terkena razia atau melakukan pelanggaran tidak langsung ditilang tetapi diberi pengarahannya lebih dahulu agar mentaati peraturan yang ada. Setelah itu diadakan penahanan surat-surat atau kendaraan.

Tingkah laku warga masyarakat pemakai jalan selama ini merupakan salah satu penyebab utama kecelakaan di jalan raya. Karena sikap pemakai jalan yang cenderung terburu-buru ingin sampai tujuan, mereka sering memacu kendaraan sangat kencang dan tidak memperhatikan rambu-rambu. Kendaraan bermotor yang berhasil terjaring dalam operasi zebra pada saat penelitian sebanyak 1430 buah dengan berbagai jenis pelanggaran. 8).

2. Pemanfaatan Trotoar Oleh Pejalan Kaki dan Pedagang Kaki Lima Serta Sangsi bagi Pelanggaran Pedagang Kaki Lima

### **a. Pejalan Kaki**

Pejalan kaki adalah pengguna jasa jalan yang tidak memakai/mengendarai kendaraan.

Pejalan kaki menurut ketentuan harus berjalan di jalan yang diperuntukkan baginya yaitu trotoar. Di Kelurahan Ampenan Utara tidak terdapat jalan khusus (trotoar) yang diperuntukkan bagi pejalan kaki. Para pejalan kaki berjalan di sisi sebelah kiri di luar badan jalan. Mereka tidak berjalan kaki secara bergerombol yang dapat menghalangi kelancaran lalu lintas. Para pejalan kaki akan berjalan secara bergerombol atau berbaris bila sedang pawai, gerak jalan, atau mengiring pengantin. Dalam hal ini mereka akan berjalan di tengah jalan dan bilamana ada kendaraan yang lewat maka barisan ini akan miring kesisi sebelah kiri memberikan kesempatan kendaraan yang akan lewat.

Di Kelurahan ini selain tidak terdapat bagian jalan yang diperuntukkan bagi pejalan kaki (trotoar) juga tidak terdapat jembatan penyeberangan. Tetapi di beberapa jalan terdapat tanda garis-garis putih, suatu tanda tempat penyeberangan pejalan kaki. Rambu-rambu tempat penyeberangan ini belum dimanfaatkan secara optimal karena kurangnya pemahaman pejalan kaki dan beberapa pengemudi mengenai rambu-rambu lalu lintas yang ada di jalan raya. Bila pejalan kaki akan menyeberangi jalan, mereka akan dibantu oleh petugas keamanan dengan cara memberhentikan kendaraan yang lewat sementara pejalan kaki menyeberang jalan.

Setiap pagi, petugas keamanan di tiap perempatan atau pertigaan jalan di seluruh kota turun mengatur

kelancaran arus lalu lintas di jalan. Bila sedang tidak ada petugas, pejalan kaki menyeberang dengan mengambil jalan yang sependek-pendeknya dan setelah ia mendapat kepastian bahwa tidak akan membahayakan diri dan orang lain maka ia akan segera menyeberang.

#### **b. Pedagang Kaki Lima**

Pedagang kaki lima adalah pedagang eceran yang melakukan kegiatannya di emperan toko, trotoar, dan sarana parkir. Sekarang sudah ada juga yang menggunakan mobil box atau pick up yang diparkir di dekat atau di depan toko. 9) Pedagang kaki lima terutama di jalan-jalan penting seperti di Jalan Saleh Sungkar dan jalan Pabean telah di tertibkan dan telah dipusatkan tempat berdagangnya yakni di halaman parkir pasar Ampenan. Lokasinya terletak di Kampung Melayu Kelurahan Ampenan Tengah. Biasanya pedagang kaki lima yang berjualan di emper toko atau di pinggir jalan adalah pedagang buah-buahan, pedagang makanan, pedagang rokok, pedagang pakaian, bakso, es dan lain sebagainya. Setelah ada penertiban mereka tidak lagi berjualan di pinggir jalan maupun emper toko.

Tempat-tempat pedagang kaki lima yang agak sulit ditertibkan adalah di sekitar pasar Kebonroek. Di tempat ini masih terdapat beberapa pedagang yang tidak masuk ke dalam los pasar. Mereka menggelar dagangan mereka persis di depan pintu pasar sehingga agak menghalangi lalu lintas pengunjung pasar. Berkali-kali petugas pasar melarang tetapi tidak dihiraukan. Pedagang tersebut antara lain pedagang buah, pedanganges, pedagang bakso, tukang tambal ban dan lain-lain.

### **c. Sangsi-Sangsi Terhadap Pelanggaran Pedagang Kaki Lima**

Bagi pedagang kaki lima yang kembali berdagang di pinggir jalan maupun di emper toko akan diberikan peringatan. Jika mereka telah berkali-kali melakukan pelanggaran tata tertib maka alat berjualan seperti timbangan diambil oleh petugas ketertiban selama waktu tertentu. Pada saat penulisan ini penertiban pedagang kaki lima, sampah, limbah, cidomo, anjing liar dan pedagang yang tidak mau masuk los pasar sudah mulai dilaksanakan. Pemerintah Daerah telah membentuk satu Tim yakni Tim Justisi yang bertugas untuk mengusut dan menghukum pelanggar ketentuan yang telah ditetapkan. Bagi mereka yang terbukti bersalah didenda Rp 2.000,00 sampai Rp 3.000,00 bagi setiap kasus. Tim Justisi terdiri dari unsur Kepolisian, Kejaksaan, DLLAJR, Pengadilan dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) yang akan mendampingi para pelanggar.

## C A T A T A N

- 1) Atep Adya Barata, Pengantar Bisnis, Jakarta, Armico  
1991 halaman 123
- 2) Hartomo H, Drs dkk, Ilmu Sosial Dasar, Jakarta, Bumi  
1990 Aksara halaman 243
- 3) Atep Adya Barata, Op. cit halaman 201
- 4) - Undang-Undang Nomor 14 Tahun  
1992 tentang Lalu Lintas dan  
Angkutan Jalan, Jakarta, Reneka  
Cipta halaman 44
- 5) Harian Suara Karya tanggal 16 Januari 1993
- 6) op. cit, halaman 46
- 7) Ibid halaman 150
- 8) Harian Suara Karya tanggal 16 Januari 1993
- 9) Atep Adya Barata, op. cit halaman 150

## **BAB V**

### **UPAYA PEMBINAAN DISIPLIN PADA MASYARAKAT KOTA**

#### **A. PEMBINAAN OLEH PEMERINTAH**

Uraian yang tertera dalam bab-bab terdahulu, adalah potret Kelurahan Ampenan Utara menurut apa adanya sekarang. Ampenan Utara yang merupakan sebagian dari Kota Administratif Mataram tentu tidak akan dibiarkan selamanya seperti keadaannya yang sekarang.

Sejak Kota Administratif Mataram terbentuk pada tahun 1978, mottonya adalah "Mataram Kota IBADAH". Maksudnya Mataram adalah Kota yang indah, bersih, aman, damai dan harmonis. Sesuai mottonya itu Walikota beserta segenap stafnya dan aparatnya sampai RW dan RT selalu berusaha mewujudkan mottonya itu.

Usahnya itu didukung oleh Bupati dan Gubernur Kepala Daerah Tk. I Propinsi Nusa Tenggara Barat. Dukungan yang demikian itu diperolehnya karena kota Mataram adalah menjadi ibukota Kabupaten Lombok Barat dan ibukota Propinsi Nusa Tenggara Barat sekaligus.

Pemerintah selalu berusaha menampilkan wajah kota Mataram sebagai ibukota dan pintu gerbang dalam hubungannya

dengan dunia luar. Penduduk dan lingkungan dibina dan di tingkatkan terus setahap demi setahap sesuai kemampuan. Tidak satupun bagian kota yang terlewatkan, termasuk Kota Ampenan Utara yang merupakan suatu wilayah Kelurahan Ampenan Utara.

Lurah beserta aparatnya Ketua Lingkungan, Ketua RW dan Ketua RT dilengkapi dengan Perda dan berbagai instruksi serta berbagai kebijaksanaan Bupati Lombok Barat sebagai acuan dalam melaksanakan tugas mewujudkan kota Mataram menjadi kota IBADAH. Lurah, Ketua Lingkungan, Ketua RW, dan Ketua RT sebagai petugas terdepan yang melaksanakan tugas pemerintahan di kelurahan, dan mereka ini dapat digolongkan sebagai tokoh pendorong perubahan kebudayaan, karena tugas mereka tidak hanya mengayomi dan melayani warga kelurahan, tetapi merubah sikap mental dan persepsi masyarakat tentang keindahan, kebersihan, keamanan, kedamaian dan keharmonisan menurut standar modern, setarap dengan negara maju dan beradab.

Selain Bupati membekali lurah dengan Perda dan peraturan lainnya, pemerintah kabupaten juga mengadakan kegiatan safari Patut, Patuh, Pacu pada tahun 1991 ke seluruh wilayah kabupaten Lombok Barat, termasuk kelurahan Ampenan Utara. Pelaksanaan safari dipecah-pecah dalam tim-tim kecil yang berkeliling ke setiap RT dan RW. Pada intinya membangkitkan disiplin masyarakat dalam partisipasinya membangun lingkungan yang indah, bersih, aman, damai dan harmonis.

*Patut, patuh, pacu* yang dimaksudkan sebagai nilai budaya dan diterapkan sebagai pemacu pembangunan, pada mulanya adalah sebuah motto yang tertera pada Lambang Daerah Kabupaten Lombok Barat. Patut, Patuh, Pacu adalah bahasa sasak. *Patut*, baik, terpuji, hal yang tidak berlebih-lebihan; *patuh*, rukun, damai, toleransi, saling harga menghargai; *pacu*, rajin, giat, tak mengenal putus asa.

Sebagai totalitas sistem nilai, ia mengandung pesan agar setiap orang dan pemimpin di Lombok Barat bertindak menurut hukum, bijaksana, berbudi pekerti luhur dan tidak berlebih-lebihan, rukun, saling menghargai kerjasama dalam hal-hal yang baik serta giat tak mengenal putus asa dalam menjalankan tugas kewajiban demi pembangunan daerah dan negara (Penjelasan Perda Lombok Barat No. 3/1970 tentang Lambang Daerah Kabupaten Lombok Barat)

Penyebar-luasan patut, patuh, pacu ini ke dalam masyarakat dimaksudkan untuk mendorong dan merangsang tumbuhnya motivasi, partisipasi dan kreativitas masyarakat dalam pembangunan. Demikian jika semua usaha pemerintah berhasil, maka pembangunan kelurahan Ampenan Utara akan berhasil, terutama dalam pembinaan disiplin masyarakat. Namun seberapa hasilnya akan ditentukan oleh langkah-langkah Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Barat selanjutnya. Usaha sebelumnya berupa himbauan, ceramah dan gotong royong membersihkan lingkungan pemukiman, tempat umum dan pasar. Himbauan dan ceramah-ceramah selain diadakan secara langsung juga melalui radio, pers dan pamflet-pamflet.

Bantuan pemerintah juga terus mengalir setiap tahun untuk pengadaan MCK umum, rabat lorong-lorong kampung, pembuatan saluran sanitasi dan gerobak sampah. Bantuan tersebut memang kecil, jauh dari kebutuhan, tetapi maksudnya untuk memancing partisipasi masyarakat. Namun demikian harapan tetap harapan. Maksud yang ingin dicapai tetap tak kunjung tercapai. Sebagian masyarakat seolah-olah acuh tak acuh saja terhadap masalah kebersihan dan keindahan lingkungan. Bahkan apa yang telah dibangun pemerintah dan dana swadaya dari masyarakat yang sadar rusak sebelum waktunya.

Saluran limbah pada beberapa bagian berbau dan ada pula yang tersumbat sampah. Sebahagian lagi ada pula yang dipergunakan warga yang tidak bertanggungjawab tempat membuang air pada malam hari dan pada waktu keadaan sepi. Mereka yang berbuat demikian adalah orang yang miskin dan orang yang kadar kesadarannya akan kebersihan sangat rendah. Golongan yang terakhir ini memang termasuk orang yang miskin tetapi sebenarnya untuk sekadar biaya membuang WC mereka masih mampu. Diantara mereka ada yang memiliki radio bahkan TV walaupun hitam putih.

Tersumbatnya saluran air limbah ada pula karena topografi dan kesalahan konstruksi. Keadaan yang demikian sangat memprihatinkan pemerintah. Gerakan kebersihan yang digerakkan pemerintah pun semakin menggebu-gebu. Seruan dan himbauan semakin ditingkatkan. Gotong-royong dan perlombaan kebersihan diadakan setiap Hari Raya Nasional.

Ketegaran Pemerintah Kabupaten, Kotif Mataram dan Kecamatan Ampenan mengimbas kepada pemerintah tingkat kelurahan Ampenan Utara. Lurah bersama Ketua Lingkungan, Ketua RT tidak berdiam diri. Mereka menggerakkan warga masyarakat dengan terjun langsung dalam usaha membersihkan, mesjid dan mushalla setiap hari Jum'at, atau hari Minggu. Bagi warga Lingkungan Pondok Perasi hari Jum'at adalah hari libur. Mereka tidak pergi memburuh dan tidak melaut menangkap ikan.

Lurah Ampenan Utara juga terus meningkatkan gerakan kebersihan di kelurahannya. Setiap dua minggu diselenggarakannya gotong-royong membersihkan lingkungan pemukiman warganya, seperti jalan, parit dan gang-gang kampung. Selain itu gotong-royong kebersihan diselenggarakan pula pada hari-hari menjelang Hari Raya Nasional maupun Hari Raya Agama.

Bahkan untuk memotivasi warga masyarakat diselenggarakan dalam bentuk perlombaan tingkat kelurahan. Dalam skala tingkat Kecamatan, Kotif, Kabupaten, Propinsi dan Nasional sering juga diselenggarakan. Ada pula lingkungan seperti Telagas dan Dayan Peken dibina dalam bentuk pilot project. Maksud tidak lain untuk lebih menggairahkan warga masyarakat dalam usaha memelihara lingkungan mereka yang indah, bersih, aman, damai dan harmonis. Kegiatan-kegiatan kebersihan seperti di atas dapat dikatakan rutin setiap bulan dan setiap tahun. Terutama perlombaan kebersihan dalam rangka Hari Ulang Tahun Kemerdekaan R.I., Kotif Mataram dan Kabupaten Lombok Barat selalu diselenggarakan setiap tahun. Sekurang-kurangnya perlombaan antar lingkungan di tingkat kelurahan.

Di bidang ketertiban, keamanan dan sopan santun di jalan raya juga Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Barat bersama Kotif dan instansi terkait mengusahakan sebaik-baiknya. Untuk mengatasi kesembrawutan di jalan raya Bupati menetapkan 16 jalur supaya diisi angkutan kota. Tetapi yang terisi baru 3 jalur saja. Jalur yang lain diisi oleh cidomo.

Sebagai alat angkutan penumpang, cidomo banyak digemari masyarakat. Terutama oleh masyarakat yang tempat tinggalnya tidak dilalui trayek bemo kota. Perkembangannya pun sangat pesat yang menimbulkan masalah. Selain memadati jalan raya yang sudah sesak, kotoran dan kencing kuda dinilai salah satu penyebab jalan-jalan raya dan jalan lingkungan menjadi kotor dan tercemar. Kotoran dan kencing kuda berhamburan sepanjang jalan yang dilaluinya dan tempat-tempat yang dipergunakannya mangkal. Memang cidomo tidak mempunyai pangkalan khusus yang strategis. Beberapa tempat yang telah ditetapkan oleh pemerintah sebagai tempatnya berpangkalan, kurang strategis. Jauh dari keramaian. Karena itu para kusir membandel mendekati tempat-tempat

yang banyak calon penumpang. Umumnya dekat perempatan dan pasar.

Penetapan warna cidomo bagi setiap wilayah untuk memudahkan pemantauan dan pengawasannya, seperti Mataram warna kuning, Ampenan warna biru dan Cakranegara warna merah juga kurang membawa hasil. Cidomo tetap berkeliaran mencari penumpang yang menambah sesaknya jalan raya.

Perkembangan angkutan di Kotif Mataram sejalan dengan mobilitas barang dan penumpang. Antara tahun 1990-1991 jumlah kendaraan di Kotif Mataram tercatat bemo 455 buah, kendaraan pribadi 503 buah, truk 607 buah, sepeda motor 6.816 buah, sepeda 5.049 buah dan cidomo 800 buah. Di antara cidomo yang sejumlah 800 buah itu 154 buah terdapat di Kelurahan Ampenan Utara.

Melihat perkembangan ini timbul gagasan pemerintah Kotif Mataram untuk mengganti cidomo dengan kendaraan lain. Tetapi mengingat antara kepentingan umum disatu pihak dan kepentingan segolongan masyarakat dan keluarga kusir cidomo di pihak yang lain, sikap pemerintah Kotif Mataram menjadi mendua antara melestarikan dengan menyingkirkan cidomo dari tempat-tempat tertentu di lingkungan Kotif Mataram. Sementara itu cidomo dari luar Kotif Mataram masuk beroperasi sehingga sampai akhir tahun 1992 tercatat jumlah cidomo yang beroperasi di sekitar wilayah Kotif Mataram meningkat menjadi 2.000 buah. Terakhir Pemerintah daerah menawarkan sepeda sebagai pengganti cidomo, tetapi ditolak oleh kusir cidomo.

Usaha pemerintah meningkatkan kebersihan dan disiplin masyarakat sesungguhnya sudah banyak sekali. Pelaksanaannya-pun sudah sejak lama. Mulai dengan dikeluarkannya Perda Lombok Barat Nomor 5 tahun 1974, tentang kebersihan kota. Dalam Perda tersebut telah ditentukan bagaimana seharusnya masyarakat memelihara kebersihan.

Masyarakat harus membuang sampah ke dalam bak umum atau ke dalam bak sendiri. Dapat juga warga masyarakat memusnahkan sampah dengan cara membakar atau menanamnya dalam tanah pekarangan sendiri. Setiap penghasil sampah diwajibkan memelihara kebersihan yang terdapat dalam bangunan, halaman dan selokan di lingkungan rumahnya. Bagi mereka yang sampahnya diambil oleh petugas dikenakan iuran kebersihan. Besarnya iuran kebersihan diatur dan ditentukan oleh bupati, seperti yang diatur dalam Perda No. 5 tahun 1985. Perda ini merupakan penyempurnaan dari Perda No. 5/1974.

Setiap orang dilarang membuang sampahnya di jalan umum atau selokan-selokan. Demikian juga dilarang memasukkan sampah dalam jumlah besar ke dalam bak umum supaya tidak melimpah dan sampah berhamburan sebelum diangkut petugas ke TPA.

Barang-barang bekas yang tidak termasuk klasifikasi sampah seperti bangkai, kotoran, bekas pangkasan pagar hidup atau ranting dan daun hasil pangkasan dilarang membuangnya di bak umum. Barang-barang sejenis itu supaya dimusnahkan sendiri oleh penghasilnya. Bagi mereka yang melanggar ketentuan di atas menurut Perda No 5 tahun 1974 diancam dengan hukuman kurungan setinggi-tingginya tujuh hari atau denda sebanyak-banyaknya Rp 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah).

Pelaksanaan Perda Nomor 5 tahun 1974 diatur dengan Surat Keputusan Wali Kota Mataram Nomor 18/300/1978. Dalam SK tersebut dijelaskan secara rinci dan lebih teknis bagaimana seharusnya memelihara kebersihan. Sampah supaya ditempatkan dalam karung dengan memanfaatkan TPS yang telah disediakan serta mengeluarkan sampah pada jam-jam yang telah ditentukan, yakni antara pk. 18.30 sore sampai dengan pk. 07.00 pagi lewat dari pk. 07.00 dilarang mengeluarkan sampah di TPS maupun tempat-tempat yang lain.

Barang-barang yang bukan sampah seperti bekas bongkaran bangunan, pecahan kaca, kotoran, bangkai dan ranting serta batang dan daun pohon asal tebanan sendiri supaya dimusnahkan sendiri. Sedangkan bagi pedagang pinggir jalan atau kaki lima diharuskan memiliki kantong sampah untuk menampung sampahnya sendiri.

Perda dan SK di atas disebarakan ke seluruh camat dan lurah di lingkungan Kotif Mataram, yang diikuti dengan berbagai kegiatan penyuluhan yang dilambiri Patut Patuh Pacu. Tanpa bosan-bosan pemerintah terus menerus membangkitkan kesadaran masyarakat mengenai manfaat kebersihan, hubungan antara kebersihan dengan kesehatan. Hubungan kebersihan dan kesehatan dengan produktivitas yang dapat meningkatkan kualitas hidup manusia. Hubungan antara Produktivitas dengan disiplin. Disiplin yang dilakukan dalam segala ruang dan waktu. Disiplin di rumah, di jalan dan di tempat kerja.

Penerangan dan penyuluhan yang demikian itu dilaksanakan secara terintegrasi dengan berbagai masalah yang disampaikan pemerintah kepada masyarakat. Ada pula penerangan dan penyuluhan yang dilakukan secara khusus seperti pelaksanaan Safari Patut Patuh Pacu selama bulan April 1991. Seperti telah diuraikan di atas, patut patuh pacu adalah bahasa Sasak. Patut artinya baik, terpuji, hal yang tidak berlebih-lebihan. Patuh artinya rukun, damai, toleransi, saling harga menghargai. Pacu artinya rajin, giat, tak mengenal putus asa. Sebagai totalitas sistem nilai ia mengandung pesan agar setiap penduduk dan pemimpin di Kabupaten Lombok Barat haruslah bertindak menurut hukum, bijaksana, berbudi pekerti luhur dan tidak berlebih-lebihan, rukun saling harga-menghargai, kerjasama dalam hal-hal yang baik serta giat tak mengenal putus asa dalam menjalankan tugas kewajiban demi pembangunan daerah dan negara.

Safari patut patuh pacu dilaksanakan dalam rangka menanamkan disiplin dan meningkat kesadaran masyarakat dalam memelihara kebersihan dan keindahan lingkungan.

Memperoleh penerangan dan penyuluhan yang demikian itu, terlihat gerak masyarakat mewujudkan hal-hal yang telah diberikan oleh pemerintah atau Tim Safari. Kegiatannya hanya beberapa minggu saja. Usaha ronda dan kegiatan kebersihan hilang lagi. Sampah dan rumput liar mulai kelihatan menumpuk dan tumbuh menyemak di pinggir jalan di sudut-sudut kampung dan tanah-tanah kosong yang sangat mengganggu pemandangan. Bemo-bemo berkeliaran keluar dari jalur mencari penumpang. Pedagang-pedagang banyak yang tidak masuk los pasar. Mereka berjualan di luar pasar memenuhi pinggir jalan yang mengganggu lalu lintas. Terutama di lokasi penelitian pada saat Tim turun pada awal bulan Oktober 1992, keadaan pasar, jalan lingkungan dan selokan sepanjang jalan Koperasi dan sepanjang Jalan Saleh Sungkar dan selokan-selokan lain di lingkungan Telagamas dan Pondok Perasi keadaannya sangat kotor. Terutama pasar Kebonroek keadaan sangat kotor dan menjijikkan seperti yang diberitakan Suara Nusa tanggal 4 Desember 1992.

Kecuali jalan protokol, keadaan jalan dan selokan hampir merata di seluruh wilayah Kotif Mataram. Hal ini disadari oleh Pemerintah, yang selalu bertekad untuk mengatasinya. Memerangi sampah mendapat prioritas untuk periode tahun 1992. Pelaksanaannya segera dan dikerjakan bersama-sama dengan seluruh lapisan masyarakat. Mewujudkan gerakan kebersihan, keindahan dan ketertiban merupakan program jangka pendek dari pemerintah.

Gerakan serentak kebersihan ini dicanangkan oleh Gubernur Nusa Tenggara Barat pada tanggal 1 Desember 1992 di halaman Kantor Bupati Lombok Barat, yang dilanjutkan

oleh Bupati Lombok Barat dan Walikota Mataram. Untuk mewujudkan gerakan itu, Bupati melibatkan semua pihak, termasuk di dalamnya warga KORPRI yang bertempat tinggal di dusun-dusun. Setiap anggota KORPRI Kabupaten Lombok Barat di haruskan oleh Bupati supaya ikut meningkatkan motivasi kebersihan di lingkungan tempat tinggalnya. Khusus kepada anggota KORPRI diberikan lembaran formulir untuk ditanda tangani oleh Kepala Lingkungan/Kadus di tempat tinggal anggota KORPRI tersebut, sehingga dengan metode itu pihak atasan (Bupati) dapat memantau kegiatan anggota KORPRI tersebut, yang mestinya menjadi penutan dalam pergaulan masyarakat terutama dalam mewujudkan Kotif Mataram yang indah dan bersih.

Gerakan kebersihan yang berlangsung selama bulan Desember 1992 bergerak dengan sub motto tiada hari tanpa kebersihan dan tiada ruang kosong tanpa membicarakan soal kebersihan. Sub motto tersebut adalah sebagai landasan awal dalam menjalankan program. Untuk mengefektifkan semua potensi yang ada, di tiga wilayah se Kotif Mataram, masing-masing Mataram, Ampenan dan Cakranegara. Pada ketiga wilayah tersebut telah dibentuk satuan-satuan khusus dan lengkap, mulai dari tenaga survai sampai dengan pengadaan tenaga tehnis yang secara khusus yang menangani pertamanan dan kebersihan.

Mulai awal Desember 1992 Pemerintah Lombok Barat menggalakkan dan memotivasi masyarakat, mulai dari gerakan subuh sampai dengan gerakan fisik untuk menunjang program kebersihan, termasuk pula di dalamnya tatap muka dengan warga masyarakat. Penerangan dan penyuluhan dilaksanakan dengan berbagai metode, mulai dari pemasangan pamflet, penerangan langsung melalui jajaran Deppen dan publikasi langsung melalui mass media bahkan sampai menurunkan anggota KORPRI

setiap Sub Unit Pemda Lombok Barat untuk membersihkan beberapa lokasi yang dianggap perlu untuk dibina bersama masyarakat setempat.

Seluruh staf Pemda Lombok Barat dibagi habis ke dalam tiga kelompok turun mengadakan pembersihan langsung bersama anggota masyarakat. Tiap-tiap kelompok I, II dan III masing-masing diketuai oleh Bupati, Sekwilda dan Walikota. Setiap hari Jumat selama bulan Desember 1992 tiap-tiap kelompok turun mengadakan kegiatan gotong-royong kebersihan, diawali dengan solat subuh berjamaah, senam pagi, gotong royong dan diakhiri dengan solat Jumat. Tempat-tempat umum seperti pasar Kebonroek dan terminal Sweta disidak oleh Bupati beserta jajarannya.

Di samping itu diadakan pula pendekatan melalui jalur agama. Setiap malam di Kotif Mataram diturunkan sejumlah 20 orang da'i yang memberikan penyuluhan mengenai kebersihan, ketertiban dan disiplin yang diintegrasikan ke dalam ajaran agama. Semua gerakannya sudah dilembari dengan semangat patut patuh pacu.

Pola ini dinilai Bupati sebagai salah satu cara yang mampu menggerakkan semangat dari bawah, karena semuanya didahului dengan semangat kebersamaan dan nilai-nilai gotong royong yang tinggi tanpa melupakan pada landasan gerak warga Lombok Barat yang patut patuh pacu.

Dalam mencapai tujuan, Bupati juga selalu sadar akan berbagai kendala. Maka untuk mengantisipasinya Pemerintah Daerah Lombok Barat telah menetapkan beberapa kebijakan sebagai berikut :

- a. Meningkatkan peranan aparatur dengan menanamkan kepedulian yang mendalam dari unsur pimpinan (Political will) terhadap kebersihan.

- b. Mengadakan koordinasi agar adanya kesamaan prinsip dan dukungan dalam usaha penanganan sampah.
- c. Mengikut sertakan lembaga/institusi kemasyarakatan yang ada secara optimal, ikut menangani dan bertanggungjawab terhadap lingkungannya.
- d. Membentuk Tim Tehnis supervisi dan operasional yang membantu pimpinan daerah melaksanakan tugas pengelolaan program dengan aksi nyata.
- e. Membuat peraturan dan petunjuk bagi warga masyarakat.

Hasilnyapun segera tampak. Tempat-tempat yang tadinya kotor dan jorok yang terdapat pada beberapa tempat di Kotif Mataram kelihatan menjadi rapi dan bersih. Taman-taman kota mulai dibangun. Termasuk di lokasi penelitian jalan-jalan menjadi bersih. Selokan-selokan yang mampat dikuras dan dibersihkan. Pinggir jalan sepanjang Jalan Koperasi di Lingkungan Dayen Peken dan Karang Ujung dirabat oleh pemilik rumah di kiri kanan jalan tersebut. Kelihatannya menjadi rapi dan bersih. Sampah-sampah tidak lagi berserakan sepanjang jalan. Penduduk sepanjang pantai yang terdapat di Lingkungan Kampung Bugis dan Lingkungan Pondok Perasi yang biasa membuang air dan sampah dipinggir pantai sekarang tidak lagi. Pasar Kebonroek yang sebelum gerakan kebersihan diaktifkan kembali terkenal kotor mulai menjadi bersih dan semua pedagang masuk ke dalam los pasar, kecuali beberapa orang yang masih bandel. Setiap KK dan pedagang dikenakan retrebusi sampah sesuai kemampuan. Mulai dari Rp 100,00 sampai Rp 1.500 setiap Kepala Keluarga.

Pelaksanaan pemeliharaan kebersihan dan ketertiban terus dipantau oleh Tim Khusus yang telah dibentuk pada tiap-tiap Kecamatan se Kotif Mataram. Sejak Januari 1993 Perda mulai diberlakukan. Operasi justisi mulai digelar sebagai alat kontrol dan koreksi terhadap tindakan warga masyarakat yang menyimpang

dari peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Operasi Justisi pada tanggal 23 Januari 1993 di Pasar Kebonroek, Ampenan Utara berhasil menjaring sejumlah 76 orang pelanggar. Mereka langsung disidangkan di tempat oleh Hakim. Mereka rata-rata dijatuhi hukuman denda yang besarnya bervariasi antara Rp 600,00 sampai Rp 3.000,00. Mereka itu adalah pelanggar peraturan kebersihan kota, jalur lalu lintas jalan raya, berjualan di luar pasar, membuka usaha tambal ban tidak pada tempatnya, membuang sampah di sembarangan tempat dan salah tempat parkir.)

Mulai awal Januari 1993 anjing-anjing liar juga dimusnahkan untuk menjaga kebersihan dan mencegah timbulnya penyakit rabies. Anjing-anjing liar itu dikhawatirkan akan mengotori taman-taman kota. Anjing-anjing semacam itu biasanya membuang air di rumput-rumput dan rumpun bunga yang justru banyak dipelihara sepanjang jalan protokol dan di sudut-sudut kota yang strategis.

## **B. PEMBINAAN OLEH TOKOH MASYARAKAT**

Mendapat penyuluhan, contoh dan tauladan dari Pemerintah, mulai dari Bupati, wali Kota, Camat, Lurah, Ketua Lingkungan, RW sampai Ketua RT tokoh-tokoh masyarakatpun mulai bangkit kesadaran mereka. Mereka berusaha meneruskan, mengulas dan menjabarkan segala petunjuk dan pengarahan pemerintah tersebut kepada anggota masyarakatnya. Metode penyampaianya bermacam-macam sesuai dengan tingkat pendidikan dan sosial ekonomi warga yang dihadapinya.

Mereka meyerukan agar masyarakat mematuhi dan melaksanakan peraturan dan kebijaksanaan pemerintah bagi kesejahteraan dan kebahagiaan masyarakat juga.

Seruan dan himbauan serupa itu biasanya disampaikan pada berbagai kesempatan seperti di waktu ada pengajian, upacara adat dan upacara agama. Sering juga disampaikan melalui hotbah Jum'at dan acara pengajian di mushalla dan di mesjid antara waktu mahgrib dan waktu isya.

Disamping itu juga tokoh adat dan agama terjun langsung memimpin gotong royong membersihkan mesjid, mushalla, selokan dan jalan lingkungan. Dalam pembinaan disiplin warga masyarakat adalah tidak kurang jasa dari ibu-ibu PKK, pemimpin organisasi, Karang Taruna, dan remaja mesjid. Sehingga keamanan dan kerukunan antar warga masyarakat di wilayah Kelurahan Ampenan Utara termasuk baik. Pencurian dan perkelahian antar warga masyarakat hampir tidak pernah terjadi.

Percecokan antara ibu rumah tangga yang disebabkan perkelahian antar anak-anak mereka sebelum berkembang menjadi perkelahian, awal-awal sudah didamaikan oleh tokoh masyarakat setempat dengan bijaksana. Anak-anak muda yang suka meminum minuman keras dibina dan diarahkan sampai mereka menghentikan kebiasaan itu atas kesadaran mereka sendiri. Angka pengangguran juga sangat kecil. Dari sejumlah 7.104 orang angkatan kerja hanya 32 orang (0,45 %) yang menganggur. Mereka terdiri dari laki-laki 21 orang dan perempuan 11 orang. Karena bimbingan dan binaan tokoh-tokoh masyarakat, tingkat kepatuhan warga masyarakat juga tinggi. Hal itu ditandai dengan kepatuhan mereka dalam memelihara kebersihan dan ketertiban lingkungan segera setelah pemerintah menyampaikan himbauannya. Himbauan pemerintah langsung mereka laksanakan sehingga dalam waktu beberapa hari saja sejak himbauan lingkungan mereka beberapa hari saja himbauan lingkungan mereka sudah mulai tampak bersih.

Adapun mereka yang terjaring Operasi Justisi kebanyakan berasal dari luar Kelurahan Ampenan Utara. Mereka itu adalah pedagang-pedagang sayur, buah-buahan dan kusir cidomo. Dilingkungan Dayan Peken pembinaan disiplin bahkan dilakukan lebih dini secara klasikal yang diintegrasikan ke dalam pengajaran agama Islam. Anak-anak yang belajar membaca Al Qur'an diklasifikasi berdasarkan umur dan dilatih terbiasa dalam suasana bersih dan disiplin. Mereka diajarkan Akhlak yang baik dan terpuji melalui ceritera dan riwayat para Nabi dan Rasul pilihan serta para imam terkenal

## **BAB VI**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. KESIMPULAN**

Usaha pembinaan disiplin masyarakat kota, khususnya masyarakat kota Ampenan Utara oleh Pemerintah Daerah Lombok Barat sudah dimulai sejak tahun 1974, dengan mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1974 yang disempurnakan dengan Perda Nomor 6 Tahun 1985 tentang kebersihan sebagai dasar hukumnya. Pelaksanaan diawali dengan penyuluhan melalui jalur formal dan non formal. Para pemimpin agama dan para da'i dimintai bantuan mereka memasukkan masalah kebersihan pada setiap kesempatan memberikan pengajian dan khotbah di mesjid-mesjid.

Kegiatan penyuluhan diikuti dengan himbauan, instruksi dan perbuatan nyata. Masyarakat dikerahkan bergotong royong membersihkan tempat-tempat ibadah, jalan dan selokan kampung. Perlombaan kebersihan pada tingkat kelurahan dan kecamatan diselenggarakan hampir setiap tahun. Beberapa kampung dibuatkan MCK dan lorong-lorong kampung dirabat dengan bantuan biaya dari Pemerintah.

Semua penghasil sampah dihibau memusnahkan sampah-sampahnya masing-masing atau menimbunnya di TPS

sebelum diangkut petugas kebersihan ketempat penimbunan akhir (TPA). Bagi mereka yang mempergunakan jasa TPS dikenal retrebusi yang besarnya ditentukan oleh Bupati.

D tempat-tempat umum seperti di pasar, di pinggir-pinggir jalan tertentu, di bioskop pemerintah menyediakan tempat sampah. Jalur-jalur kendaraan umum ditetapkan lengkap dengan rambu-rambunya. Pada tempat-tempat yang strategis dipasangkan slogan-slogan yang memotivasi masyarakat agar mencintai kebersihan dan keindahan, tertib dan sopan santun di jalan raya.

Ketika semangat warga masyarakat kelihatan mulai mengendor Pemerintah Daerah Lombok Barat segera memasyarakatkan Nilai Budaya Patut Patuh Pacu sebagai pemacu pembangunan di Daerah Tingkat II Lombok Barat. Setiap warga masyarakat dihimbau supaya selalu disiplin, tunduk dan patuh terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Setiap warga kota harus memelihara kebersihan, keamanan dan ketertiban serta kekeluargaan diantara sesama warga. Dijelaskan bagi siapa yang membuang sampah tidak pada tempatnya dan kusir cidomo yang tidak melengkapi diri dengan peralatan untuk membersihkan kudanya akan dikenakan denda atau hukuman sesuai peraturan daerah yang berlaku.

Jalur angkutan kota ditata kembali menjadi 16 jalur, tetapi yang terisi hanya 3 jalur. Selebihnya diisi oleh cidomo yang kemudian menimbulkan masalah karena sering menimbulkan kesemrawutan lalu lintas. Kotoran kuda yang berserakan mengotori sepanjang jalan yang dilaluinya. Menghadapi penghapusan cidomo sikap pemerintah masih mendua karena menyangkut nasib kusir dan warga yang masih membutuhkannya. Jalur yang ramai dijadikan satu jalur untuk mengurangi kecelakaan. Anjing liar yang sering membahayakan lalu lintas dan mengotori jalan dimusnahkan.

Disiplin masyarakat di tempat umum seperti di pasar, bioskop, terminal dan jalan raya serta disiplin terhadap administrasi pemerintah terus ditingkatkan. Disiplin di pasar dengan menata ruang dan tempat bagi para pedagang berjualan untuk mencegah perselisihan antara mereka dan untuk kenyamanan para pengunjung yang berbelanja.

Peningkatan disiplin di bioskop dilakukan dengan operasi mendadak pada waktu pemutaran film tertentu untuk mencegah penyerobotan karcis, dan pelanggaran batas umur. Disiplin di terminal dibina dan dipelihara dengan ditempatkannya petugas DLLAJR yang selalu mengawasi kendaraan angkutan kota dan penumpang yang keluar masuk terminal Kebonroek. Polisi Lalu Lintas mengawasi dan meningkatkan disiplin di jalan raya dengan mengadakan operasi setiap bulan dan berjaga-jaga di tiap-tiap perempatan jalan yang ramai setiap pagi. Sopir-sopir yang kepadatan tidak disiplin langsung ditilang. Cidomo yang melanggar jalur ditertibkan dan diperingati. Warga masyarakat yang keluarganya meninggal dunia, kawin dan melahirkan diwajibkan melapor kepada Ketua RT. Dilanjutkan RT melaporkannya RW dan seterusnya secara berjenjang. Demikian pula pendatang baru diharuskan melapor kepada RT setempat. Bagi yang melanggar ketentuan tersebut ditegur oleh RT.

Kecuali kedisiplinan terhadap administrasi pemerintahan, hasilnya kurang memuaskan. Sebagai warga masyarakat hanya taat sementara pada awalnya. Beberapa hari kemudian kembali seperti semula. Terutama yang mengenai kebersihan, ketertiban di pasar, di bioskop dan jalan raya, tingkat kesadaran masyarakat masih rendah. Kebanyakan diantara mereka adalah orang yang miskin dan kurang mengetahuinya. Tingkat pendidikan mereka kebanyakan masih rendah.

Melihat keadaan ini kembali pemerintah menggalakkan kegiatan kebersihan yang dicanangkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat pada tanggal 1 Desember 1992. Pencanangan Gerakan Kebersihan ini dilanjutkan dan dilaksanakan oleh Bupati Lombok Barat dan Walikota Administratif Mataram. Seluruh staf dan anggota KORPRI Pemda Lombok Barat dikerahkan untuk memberikan penyuluhan dan melaksanakan operasi kebersihan di seluruh Kotif Mataram bersama masyarakat. Hasilnya segera terlihat, jalan dan lorong kampung yang sebelumnya kotor mulai bersih. Warga masyarakat Ampenan Utara tidak lagi membuang sampah di tempat terlarang. Begitu juga penduduk tidak lagi membuang air di pantai setelah mendapat pengarahannya langsung dari Camat Ampenan. Pedagang di pasar Kebonroek tidak lagi melimpah sampai ke luar pasar, yang sebelumnya sering berjulan di luar di tepi jalan sepanjang pasar.

Untuk terus meningkatkan ketertiban dilaksanakan pula operasi justisi adalah kusir cidomo, selebihnya adalah pedagang K5, tukang tambal ban dan pedagang yang tidak masuk los pasar.

Operasi Zebra selama satu minggu dapat menjaring 211 pelanggar. Operasi Zebra dilaksanakan dalam empat tahap, masing-masing tahap peneguran selama satu minggu, tahap penindakan 4 hari tahap selanjutnya adalah tahap pendidikan masyarakat tentang tata tertib lalu lintas. Sasaran lain dari operasi Zebra adalah pengguna jalan, pengemudi yang kurang tertib, pengemudi yang menurunkan dan menaikkan penumpang tidak pada tempatnya dan kendaraan yang tidak memenuhi surat kendaraan.

Peningkatan usaha Pemerintah Daerah dalam membina disiplin di lingkungan masyarakat kota seperti di atas adalah wajar, karena kedudukan kota Administratif Mataram sebagai ibukota Kabupaten Lombok Barat dan Propinsi Nusa Tenggara Barat,

sekaligus sebagai pintu gerbang dalam hubungannya dengan dunia luar. Keberhasilan Kota Administratif Mataram menjadi tolak ukur bagi keberhasilan Propinsi Nusa Tenggara Barat. Maka Program pembangunan Kota Administratif Mataram adalah jangka pendek untuk mencapai kebersihan, keindahan dan ketetapan, jangka menengah untuk memperoleh adipura dan jangka panjang untuk mewujudkan kota yang indah, bersih, berbunga, aman dan damai (kota IBADAH).

## **B. SARAN**

Pada umumnya warga masyarakat Ampenan Utara ingin hidup disiplin tunduk dan patuh terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Setiap mereka yang ingin hidup dilingkungan yang bersih, indah, aman dan damai. Tetapi karena keadaan yang serba miskin, kurang pengetahuan dan kemampuannya sebagian dari mereka tidak dapat keluar dari keadaan yang kumuh dan jorok seperti sekarang ini.

Usaha pemerintah yang dilaksanakan terakhir ini adalah suatu langkah yang sangat tepat. Mereka yang pada umumnya penurut yang perlu ditingkat adalah kesadaran dan contoh tauladan yang baik dari para pemuka masyarakat dan agama serta pimpinan pemerintah setempat. Metode dan pendekatan yang dipergunakan pemerintah untuk membangkitkan kesadaran partisipasi masyarakat melalui jalur agama, juga sangat tepat.

Kemudian kalau masyarakat sudah meningkat kesadaran dan partisipasi dalam memelihara kebersihan lingkungannya masing-masing, pemerintah perlu menambah Lokasi Penimbunan Sementara (LPS). Lokasi penimbunan sementara ini perlu diperbanyak oleh karena sesuai kenyataan sebagian besar warga masyarakat Kelurahan Ampenan Utara tidak memiliki

pekarangan yang cukup untuk tempat membuat lubang sampah.

Kantongisasi perlu dikembangkan dan membebaskan warga masyarakat yang miskin dari membayar retribusi sampah. Bahkan kalau perlu mereka diberi kesempatan untuk menjadi pasukan kuning dan dengan upah yang memadai. Bersamaan dengan itu pertumbuhan penduduk perlu dikendalikan baik karena alamiah maupun urbanisasi. Pengawasan terhadap pemeliharaan kebersihan lingkungan perlu ditingkatkan.

Tugas pengawasan harus dilaksanakan oleh tenaga yang adil dan yang berwibawa. Tenaga yang demikian sebaiknya diangkat dari purnawirawan ABRI. Sebagai imbalannya mereka juga harus digaji. Tugas pengawas adalah mengawasi pelaksanaan pemeliharaan kebersihan, disiplin dan ketertiban di pemukiman, dipasar, di bioskop, di jalan dan di terminal.

Dalam melaksanakan tugasnya, pengawas cukup hanya mencatat nama, dan alamat pelanggan, nomor KTP atau SIM pelanggar dan alamat pelanggar. Melaporkan temuannya kepada Tim Justisi atau pejabat yang ditunjuk oleh Pemda. Tim Justisi yang memanggil pelanggar melalui Lurahnyanya, untuk kemudian dijatuhkan denda. Uang denda inilah yang kemudian di kumpulkan dan dipergunakan untuk menggaji pengawas dan pasukan kuning dan lain-lain yang berhubungan pembinaan disiplin masyarakat.

Sementara itu Ketua RT, Ketua RW dan Kepala Lingkungan disamping bertanggung jawab atas pelaksanaan pemeliharaan kebersihan dan ketertiban di lingkungannya masing-masing juga bertugas memonitor, membina, membimbing, mengarahkan dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan tanggung jawab warga masyarakatnya secara kontinu. Sasaran terakhir dari semua usaha diatas adalah perubahan sikap mental masyarakat menjadi masyarakat yang senang pada kebersihan dan ketertiban yang diwujudkan dalam disiplin yang dinamis.

## DAFTAR KEPUSTAKAAN

1. Abdurahman May, dkk 1989 Tata kelakuan di lingkungan pergaulan keluarga dan masyarakat Nusa Tenggara Barat, Mataram, Proyek IDKD NTB
2. Barata Adya Atep, 1991 Pengantar Bisnis, Jakarta, Armico.
3. Hartono H, Drs dkk, 1979 Ilmu Sosial Dasar, Jakarta, Bumi Aksara
4. Harian Suara Karya, tanggal 16 Januari 1993
5. Harian Suara Nusa tanggal 17 Desember 1992
6. Kanwil Departemen Pekerjaan Umum, Rumah Sehat Dalam 1989/1990 Lingkungan Sehat, Nusa Tenggara Barat PITB.
7. Kaur Pemerintahan Kelurahan Ampenan Utara, Monografi 1992 Kelurahan Ampenan Utara Bulan Januari s.d. Juni 1992.
8. Mantri Statistik Kecamatan Ampenan, Publikasi 1991 Kecamatan Ampenan Dalam Angka
9. Otto Sumarwoto, Prof. Dr, Ekologi Lingkungan Hidup dan 1989 Pembangunan, Jakarta, Jambatan.
10. Pemda Tingkat I NTB, Perda Nomor 1 Tahun 1984. 1989
11. Pemda Tingkat II Lombok Barat, Perda Nomor 5/1974 1974
12. Pemda Tingkat II Lombok Barat, Perda Nomor 5/1985 1985
13. \_\_\_\_\_, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 Tentang 1992 Lalu Lintas Angkutan Jalan, Jakarta, Reneka Cipta.

14. \_\_\_\_\_, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1965  
1965
15. Wacana Lalu, dkk, Sejarah Kota Ampenan, Jakarta, Proyek  
Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional  
(naskah belum dicetak)

## DAFTAR INFORMAN

Lampiran : 1

No.	Nama	Umur (th)	Jenis Kelamin	Pendidikan	Pekerjaan	Agama	Alamat
1.	Abdullah Kamarudin	40	Pria	SMA	Pengurus Masjid	Islam	Otak Desa
2.	Agil Abdullah	58	Pria	SD	Dagang	Islam	Telagamas
3.	Ayudin	40	Pria	SD	Swasta	Islam	Dayan Peken
4.	Alimudin	60	Pria	SR	Pemuka Agama	Islam	Kp. Bugis
5.	Ali Umar	56	Pria	SR 6 th	Pens. PNS	Islam	Pondok Perasi
6.	Aminah	50	Wanita	SD 3 th	Dagang	Islam	Kr. Kerem
7.	Bakri	23	Pria	SMP	Anggota Kr. Taruna	Islam	Telagamas
8.	Budha I wayan	54	Pria	SMP	Ketua RT	Hindu	Kr. Ujung
9.	Brata I Nengah	65	Pria	SR	Dagang	Hindu	Kr. Ujung
10.	Chadijah	50	Wanita	SD	Dagang	Islam	Telagamas
11.	Dewi Ni Komang	21	Wanita	SMEA	NPS	Hindu	Kr. Ujung
12.	Djaisa	35	Pria	-	Kusir Cidomo	Islam	Tingar
13.	Elya	26	Wanita	SMA	PNS	Islam	Telagamas
14.	Hadi Abdullah	52	Pria	SD	Ket.RT/Swasta	Islam	Telagamas
15.	Hamdan	34	Pria	SD	Sopir	Islam	Dayan Peken
16.	Hanafi	31	Pria	SMA	Ketua RT	Islam	Otak Desa
17.	Hasan	24	Pria	SMA	Sopir	Islam	Telagamas
18.	Hasnah	40	Wanita	SD	W raswasta	Islam	Telagamas
19.	Ibrahim	21	Pria	SMA	Remaja Masjid	Islam	Telagamas
20.	I c a h	53	Wanita	-	Buruh	Islam	Kp. Bugis
21.	Ismail Ahmad	60	Pria	-	Penghulu	Islam	Otak Desa
22.	Ismail H.	34	Pria	SMP	Kaling	Islam	Telagamas
23.	Ismail Jamil	46	Pria	PGA 4 th	Kaling	Islam	Pondok Perasi
24.	Iskandar Alex	50	Pria	SR	Purnawirawan	Islam	Ling. Bugis

No.	Nama	Umur (th)	Jenis Kelamin	Pendidikan	Pekerjaan	Agama	Alamat
25.	Ja'far. H.	49	Pria	KPA	PNS	Islam	Tinggar
26.	Jamil	36	Pria	SMP	Petugas Parkir	Islam	Karang Baru
27.	Karya	54	Pria	SMA	Kaling	Islam	Tinggar
28.	M. Abdullah	50	Pria	SD	PNS	Islam	Telagamas
29.	Mahmud	50	Pria	-	Nelayan	Islam	Pondok Perasi
30.	Mahnhan	40	Pria	SD	Dagang	Islam	Telagamas
31.	Mahsun	45	Pria	-	Kusir Cidomo	Islam	Tinggar
32.	Mas'ud	50	Pria	SD	Tukang Jahit	Islam	Pelembak
33.	Miskin Lalu	39	Pria	SD	Ketua RT	Islam	Tinggar
34.	Muhasin	41	Pria	SMA	Guru SMP	Islam	Otak Desa
35.	Mu'in Abdul	47	Pria	Aliyah	Guru	Islam	Jempong Wareng
36.	Mustafa	47	Pria	SMP	Pegawai Pos	Islam	Otak Desa
37.	Mustka Ketut	25	Pria	SMEA	Guru	Hindu	Kr. Ujung
38.	Nasrudin	28	Pria	D III Unram	Guru SMP	Islam	Tinggar
39.	Nurachman	40	Pria	SMA	Pedagang	Islam	Dayan Peken
40.	Nurahman	38	Pria	SD	Kaling	Islam	Otak Desa
41.	Nursi.M. Ny	33	Wanita	SD	Tukang Jahit	Islam	Kp. Bugis
42.	Nuryadi	27	Pria	SMP	Guru SD	Islam	Telagamas
43.	Partha Komang	37	Pria	SMEA	Kaling	Hindu	Kr. Ujung
44.	Raodah	60	Pria	-	Penghulu	Islam	Otak Desa
45.	Ridwan Moh. H.	50	Pria	SMEA	Kaling	Islam	Pelembak
46.	Rozali Abd.	42	Pria	SMA	Montir/Ket. RT	Islam	Dayan Peken
47.	Rusmiayadi	33	Pria	SMA	LLAJR	Islam	Karang Barau
48.	Saenal Johny	39	Pria	SMP	PNS	Islam	Dayan Peken
49.	Sahar	45	Pria	SMP	Swasta	Islam	Mataram
50.	Salahuddin	22	Pria	SPG	Swasta	Islam	Dayan Peken
51.	Said. M.	51	Pria	SMA	Kaling	Islam	Dayan Peken
52.	Saimah Ny.	40	Wanita	SD	Pengurus PKK	Islam	Dayan Pekeen

No.	Nama	Umur (th)	Jenis Kelamin	Pendidikan	Pekerjaan	Agama	Alamat
53.	Samiin H.	36	Pria	SMP	Tani/Ket. RT	Islam	Jempong Wareng
54.	Sandio	52	Pria	SR 6 th	Ket.RT/Pet.Keaman an ps.Kbn.Roek	Islam	Dayan Peken
55.	Salam	47	Pria	SD	Sopir	Islam	Dayan Peken
56.	Sarma	41	Pria	SD	Nelayan	Islam	Pondok Perasi
57.	Supratman Lalu	33	Pria	SMP	Ket. RT	Islam	Kp. Bugis
58.	Syafri Ahmad H	44	Pria	SMA	Swasta/Kaling	Islam	Pelembak
59.	Tahir M.	45	Pria	SMP	Kaling	Islam	Kp. Bugis
60.	Tasan	48	Pria	SD	Swasta/Ket.RT 01	Islam	Dayan Peken
61.	Taufik	27	Pria	SMP	Petr. Ayam	Islam	Kp. Bugis
62.	Tayib M.	54	Pria	SMA	Ket. RT	Islam	Karang Unung
63.	Y e i n	47	Wanita	SMP	Dagang	Konghuchu	Dayan Peken
64.	Zaenuddin	60	Pria	SGA	Pensiun Guru	Islam	Dayan Peken
65.	Zaenudin	25	Pria	SMA	Ket.Remaja masjid	Islam	Otak Desa

## DAFTAR ISTILAH

Lampiran : 2

1. Amaq kaka : Kakak laki-laki dari bapak atau ibu.
2. Amaq rari : Adik laki-laki dari bapak atau ibu.
3. Ane : Ayo
4. Ao' : Ya
5. Belah komak : Bagi dua sama banyak
6. Belembah : Memikul
7. Berson : Menjunjung
8. Bau isik pemanggang: Turut isteri
9. Buluan : Rambutan
10. Cidomo : Kendaraan yang ditarik oleh kuda, sejenis dokar yang memakai velg dan roda mobil
11. Doang : saja
12. Empak sampi : Daging sapi
13. Entengan : Berikan/kasih
14. Hinterland : Daerah belakang
15. Inaq kaka : Adik perempuan dari bapak atau ibu
16. Inaq rari : Adik perempuan dari bapak atau ibu
17. Isiq : Oleh
18. Jarang : Jarang
19. Jajar karang : Orang keturunan biasa
20. Kadang Jari : Keluarga terdekat dari pihak perempuan
21. Kadang waris : Keluarga dekat dari pihak laki-laki, ahli waris
22. Koren : Keluarga batih, keluarga inti
23. Kebeng : Kuberikan
24. Ketimbangan : Saya timbangkan
25. Laguq : Mungkin

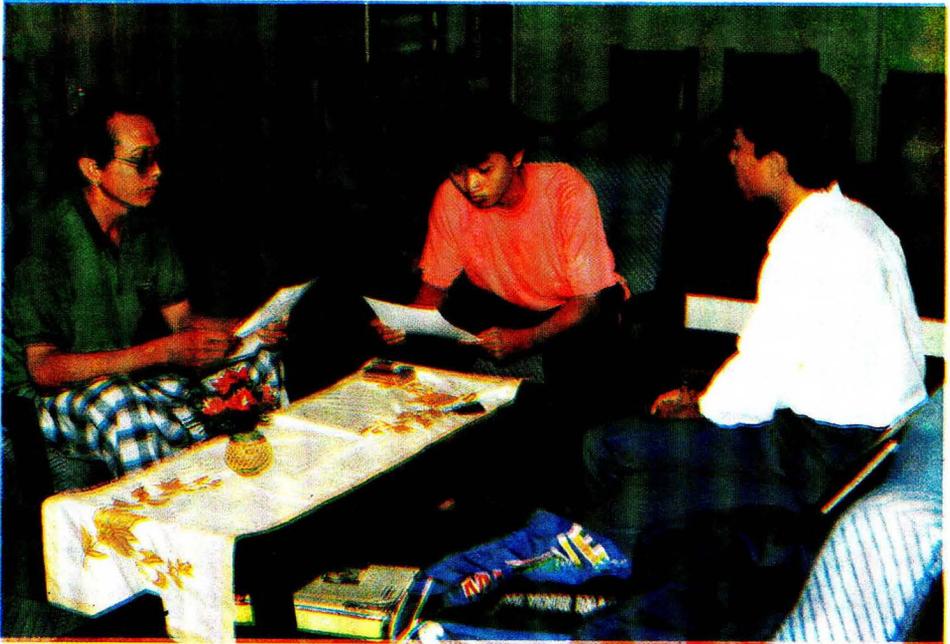
26. Lugu : Polos
27. Marak : Seperti
28. Matrilokal : Pola menetap di lingkungan keluarga isteri setelah perkawinan
29. Merangken : Pedagang bumbu
30. Muraan : Murahan
31. Nendak : Membeli barang untuk dijual lagi.
32. Neolokal : Pola menetap di tempat baru setelah perkawinan.
33. Ngelas : Menunggu giliran, menunggu kelas.
34. Niki : Ini
35. Nina : Perempuan/betina
36. Partrilokal : Pola menetap di lingkungan keluarga suami setelah perkawinan
37. Pemanggang : Pemanggang
38. Rombok : Tambah
39. Sak : Yang
40. Sakap menyakap : Bagi hasil
41. Sanitasi : Pemeliharaan kesehatan
42. Seberembe : Seberapa
43. Sekediq : Sedikit
44. Semeton : Saudara
45. Siq : Akan
46. Solah : Baik atau Bagus
47. Stereotipe : Memberi bentuk tetap
48. Subandar : Perantara
49. Subsistensi : Kebutuhan hidup
50. Supermarket : Toko serba ada
51. Tiang : Saya
52. Turut nina : Turut isteri
53. Turut : Turut, mengikuti
54. Utilitas : Kegunaan

Foto No. 1



Kantor Kelurahan Ampenan Utara

Foto No. 2



Salah satu aspek penting yang menunjang ketertiban masyarakat adalah tertibnya administrasi.

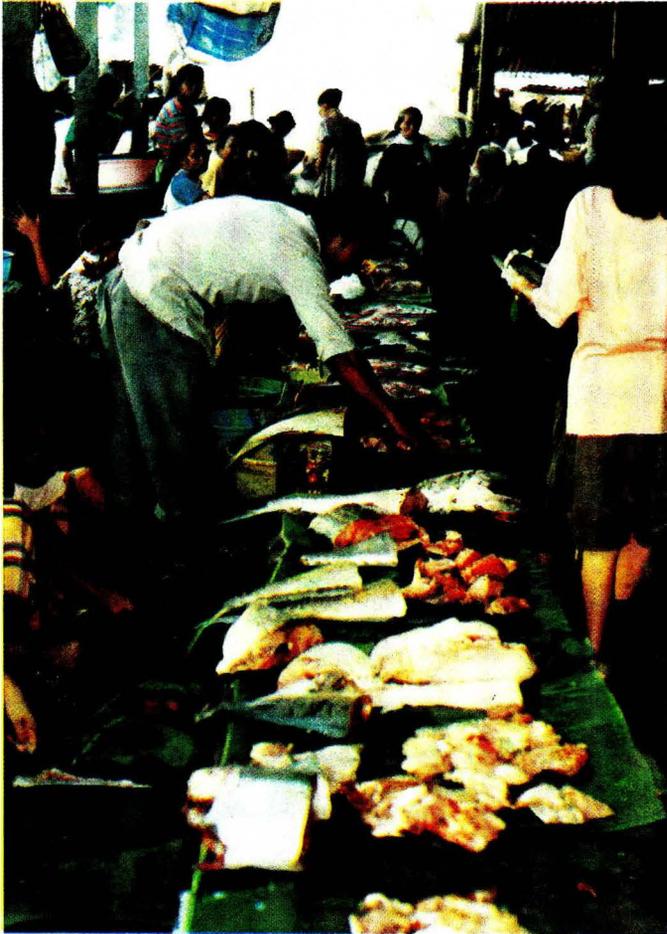
Pada gambar nampak penduduk baru sedang melaporkan diri kepada Kepala Lingkungan.

Foto No. 3



Disiplin masyarakat dalam hal berpartisipasi dibidang kebersihan antara lain dengan melakukan gotong royong.

Foto No. 4



Situasi pasar Kebonroek, Ampenan Utara.  
Pengaturan tempat penjualan ikan laut cukup rapi.



Foto No. 5

Terminal Kebonroek Kelurahan Ampenan Utara



Foto No. 6

Barisan Angkutan Tradisional (Cidomo) sedang menanti penumpang.



Foto No. 7 Petugas kebersihan sedang mengangkut limbah keluarga dari tempat pembuangan sementara (TPS).



Foto No. 8 Halaman rumah penduduk yang cukup bersih di Lingkungan Tinggar, Kelurahan Ampenan Utara

Di Daerah Nusa Tenggara Barat

PERPUSTAKAAN  
NUSANTARA MASYARAKAT

Perpustakaan  
Jenderal Ke

711.4

L

p

A

TIDAK DIPERDAGANGKAN